



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi tanggal 18 Oktober 2021 dan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 050/9923/201.4/2023 Perihal : Penyampaian Hasil Review RADPG Kabupaten Gresik tanggal 9 Juni 2023, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik Tahun 2023-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 59 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 18);

21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 58);
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah serangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik Tahun 2023-2024 yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Pembangunan Pangan dan Gizi di Daerah Tahun 2023-2024.

BAB II

RAD-PG

Pasal 2

- (1) RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta sub kegiatan.
- (2) RAD-PG menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : ANALISIS SITUASI;
 - c. BAB III : RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI;
 - d. BAB IV : PELAKSANAAN RENCANA AKSI;
 - e. BAB V : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN; dan
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) Dokumen RAD-PG dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Matrik Strategi dan Aksi RAD-PG, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD-PG.
- (2) Tata cara pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 63

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN
GRESIK TAHUN 2023-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
1.1.1 Peran Pangan dan Gizi terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pangan dan gizi merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dalam pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan pangan dan gizi adalah sebuah investasi strategis yang akan memberikan dampak dalam jangka panjang bagi peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia. Pengaruh pangan dan gizi begitu signifikan sehingga pemerintah menetapkan program percepatan pangan dan gizi utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan (Perpres No. 42 Tahun 2013).

Sejalan dengan hal tersebut, maka ketahanan pangan dan gizi menjadi salah satu keadaan yang hendak dicapai dalam pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 untuk mendukung upaya membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pendekatan multisektor menjadi pilihan pendekatan yang akan diterapkan dalam mewujudkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021 – 2024. Aspek kesehatan menjadi indikator dominan dalam output rencana aksi pangan dan gizi, sehingga dalam pencapaian aspek ini sangat membutuhkan dukungan dari multi sektor yang saling bersinergi dalam proses dan pendekatannya. Keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental kuat, kesehatan yang prima serta cerdas. Hal tersebut sangat ditentukan oleh gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh asupan pangan yang dikonsumsi dan status kesehatan.

Progam-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu, terukur keberhasilannya dan berkesinambungan yang selaras



dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021 – 2024, demikian pula Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2021 – 2024, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh daerah. Maka dari itu, diperlukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik dalam penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Gresik dalam pembangunan pangan dan gizi yang bersifat terpadu (integrated), bertahap dan berkesinambungan (sustainability), serta terukur keberhasilannya (measurable), yang berisi panduan dan arahan serta acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi bagi Institusi Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perguruan tinggi/ litbang, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan stakeholder lain.

1.2. DETERMINAN MASALAH PANGAN DAN GIZI

Pengaturan tentang pangan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi dasar setiap rakyat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. Berbagai penelitian membuktikan bahwa masalah gizi adalah masalah intergenerasi, yaitu ibu hamil yang kurang gizi akan melahirkan bayi kurang gizi. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pelayanan berkelanjutan pada periode kesempatan emas kehidupan (windows of opportunities), yaitu sejak janin dalam kandungan, dan bayi baru lahir sampai anak berusia 2 tahun. Penurunan stunting dapat diselesaikan dengan meningkatkan akses keterjangkauan pangan setiap rumah tangga, dimana akses pangan setiap individu dalam rumah tangga sangat tergantung pada ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya secara berkelanjutan. Kemampuan mengakses yang dimaksud memiliki makna kemampuan mengakses yang dipengaruhi oleh daya yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kemiskinan seseorang.

Rendahnya aksesibilitas pangan, yaitu kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota keluarganya, mengancam penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya akan berdampak pada semakin beratnya masalah kekurangan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi, dan anak. Solusi yang dapat diambil dalam penyelesaian permasalahan tersebut



dapat melalui perbaikan gizi masyarakat, aksesibilitas pangan, mutu dan keamanan pangan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan koordinasi dalam kelembagaan pangan dan gizi juga dapat menjadi solusi terkait permasalahan tersebut. Dimana keberhasilan dalam penyelesaian permasalahan tersebut ditandai dengan status gizi masyarakat yang semakin membaik dan ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan penduduk Kabupaten Gresik.

1.3. KEDUDUKAN RAD-PG DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Melihat komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional serta ketahanan pangan dan gizi, telah ditetapkan beberapa kebijakan strategis, rencana aksi atau strategi nasional sehingga menjadi hal penting untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan kebijakan tersebut. Posisi RAN-PG terhadap kebijakan strategis, strategi nasional maupun RAN lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat dilihat dalam Gambar 1.1. yang menunjukkan RAN-PG berfungsi sebagai strategi implementasi tematik pembangunan pangan dan gizi dan merupakan bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengacu Kepada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan nasional atau rencana aksi lain yang mendukung pembangunan pangan dan gizi seperti Stranas Percepatan Penurunan *Stunting*, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas PUG melalui PPRG.

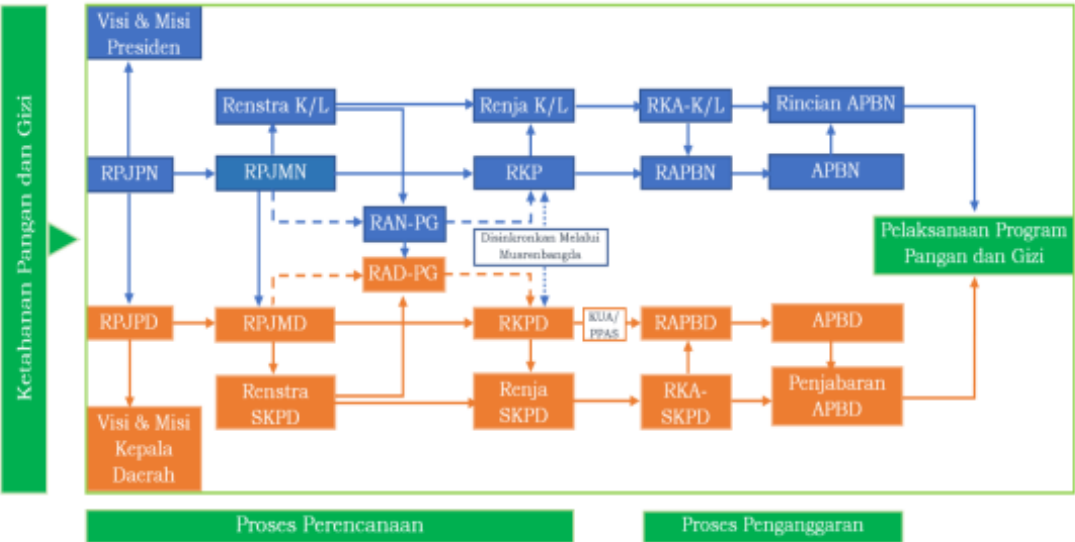


Gambar 1.1 Posisi RAN-PG dan RAD-PG Dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RAN-PG di Indonesia menjadi penting sebagai salah satu instrumen koordinasi pemerintah dengan



sektor atau pemangku kepentingan dalam mencapai TPB, terutama tujuan kedua. Sedangkan dalam mendukung pencapaian tujuan RPJMN, penyusunan RAN-PG diarahkan untuk penajaman program/kegiatan dalam pencapaian tujuan pembangunan di bidang pangan dan gizi dalam RPJMN termasuk yang sudah dijabarkan di dalam Renstra Kementerian dan Lembaga. Dengan demikian dokumen RAN-PG dapat diacu untuk menyusun Renja kementerian/lembaga dan RKP. Sama halnya di daerah, RAD-PG yang disusun pemerintah daerah pada dasarnya merupakan penajaman program dan kegiatan di bidang pangan dan gizi dalam RPJMD dan Renstra SKPD, sehingga dapat diacu untuk menyusun Renja SKPD dan RKPD. Adapun Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.2.



(Sumber: Dimodifikasi dari Bappenas, 2020)

Gambar 1.2 Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

Rencana aksi pangan dan gizi telah dikembangkan dengan mempertimbangkan determinan dan permasalahan multisektoral di berbagai level. RAD-PG akan disusun oleh pemerintah daerah dengan mengacu kepada RAN-PG dengan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu aksi penajaman terhadap kegiatan pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap yang belum terfasilitasi ke dalam dokumen perencanaan yang sudah ada.



1.4. TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud :

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan panduan, arahan, serta acuan kepada OPD, DPRD, Perguruan Tinggi/ Litbang, Institusi Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan penurunan stunting di Kabupaten Gresik.

Tujuan :

Berdasarkan maksud dari kegiatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik, maka kegiatan tersebut bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder terkait dari masyarakat dalam peran sertanya untuk pemantapan ketahanan pangan dan penurunan stunting;
- 2) Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah di Kabupaten Gresik sehingga mampu menetapkan prioritas penanganan dalam masalah pangan dan gizi, serta mampu memantau dan mengevaluasi perkembangan pangan dan gizi di Kabupaten Gresik;
- 3) Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan penurunan stunting secara jelas dan terinci untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas tugas masing-masing stakeholder.

1.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RAD-PG

Landasan hukum Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Gresik antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, 2012. Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5360);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Interventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - j. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024;
 - k. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
 - l. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.



BAB II

ANALISIS SITUASI

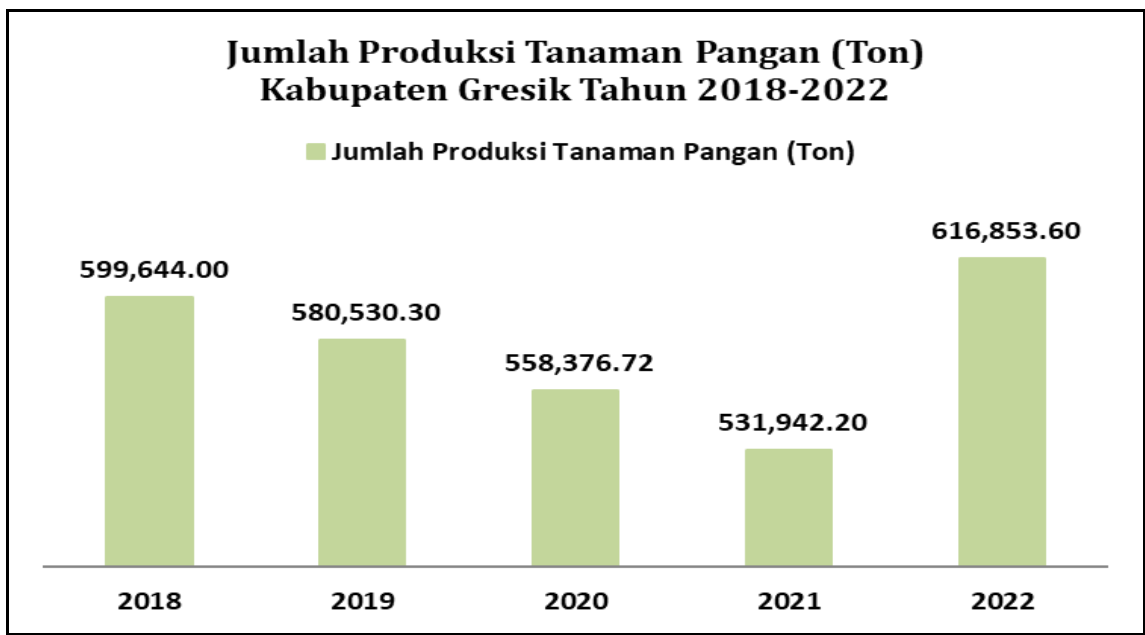
2.1. ANALISIS SITUASI

2.1.1 Bidang Pangan

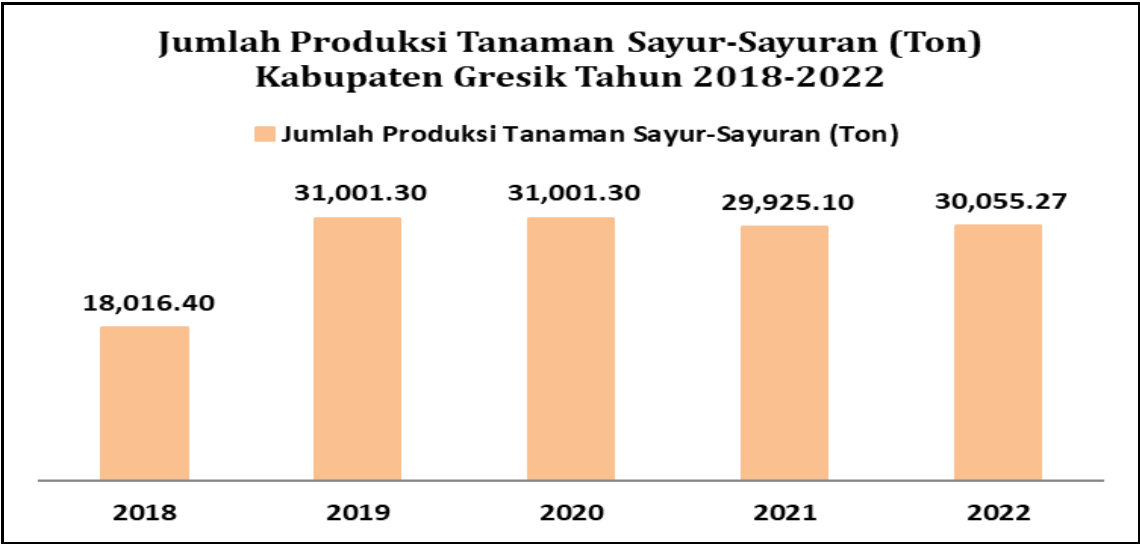
1. Ketersediaan Pangan

Aspek Ketersediaan pangan (*food availability*) adalah jumlah produksi bahan pangan serealial yang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi seperti beras, jagung, ubi, gandum, ketela. Ketersediaan pangan yang cukup diartikan bahwa jumlah pangan yang dibutuhkan cukup bagi masyarakat baik berupa bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, hewan ternak dan lain-lain (Sumarsono dkk, 2017). Ketersediaan bahan pangan tersebut harus dalam jumlah yang cukup, aman dikonsumsi, bergizi serta mampu mencukupi kebutuhan kalori tiap individu (Rustanti, 2016).

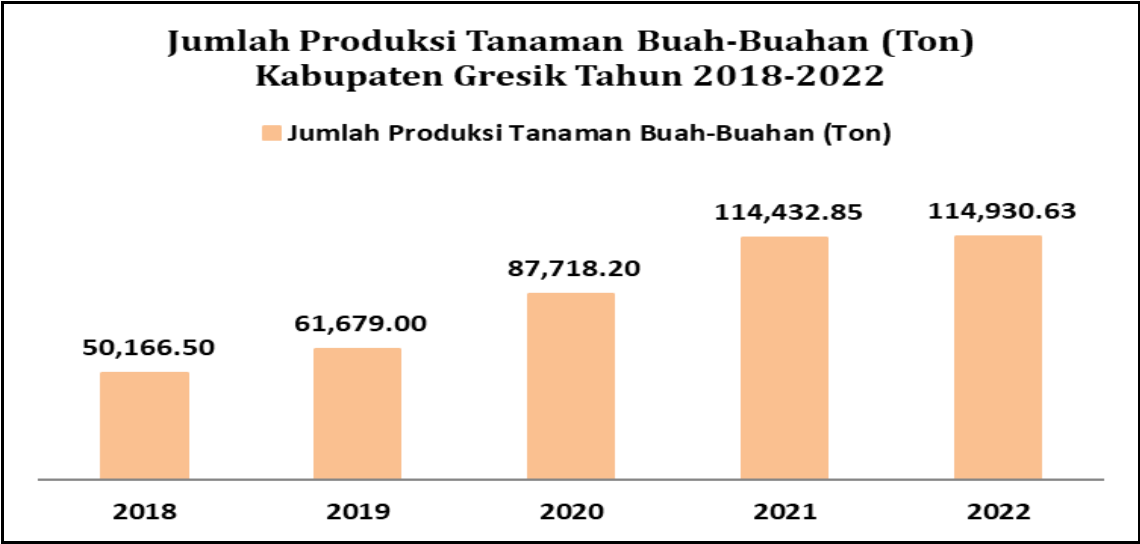
Ketersediaan Pangan Kabupaten Gresik ditunjukkan dengan data produksi dan produktivitas tanaman pangan, tanaman sayuran, buah, perikanan dan peternakan serta perbandingan antara ketersediaan dengan kebutuhan pangan Kabupaten Gresik.



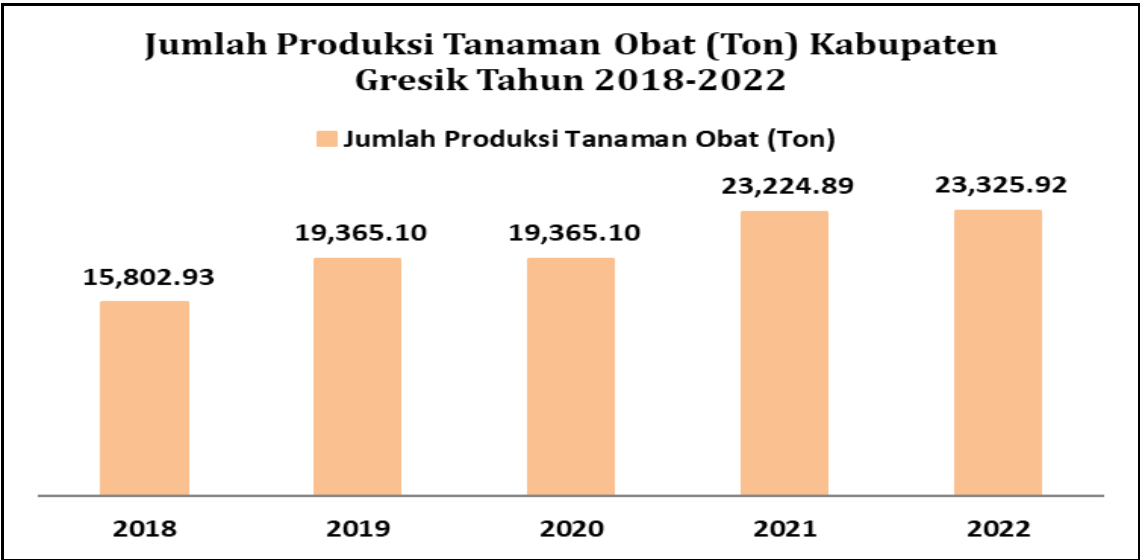
Gambar 2. 1 Grafik Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022



Gambar 2. 2 Grafik Jumlah Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Ton) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022



Gambar 2. 3 Grafik Jumlah Produksi Tanaman Buah-Buahan (Ton) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022



Gambar 2. 4 Grafik Produksi Tanaman Obat (Ton) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022



Berdasarkan grafik diatas menyatakan bahwa jumlah produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura sangat berbeda, tanaman hortikultura memberikan peran yang menonjol terkait peningkatan produksi setiap tahunnya. Sebaliknya produksi tanaman pangan cenderung fluktuatif lebih baik dari 4 tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya covid-19. Namun produksi tanaman bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang sangat baik karena bisa mengembalikan jumlah produksi.

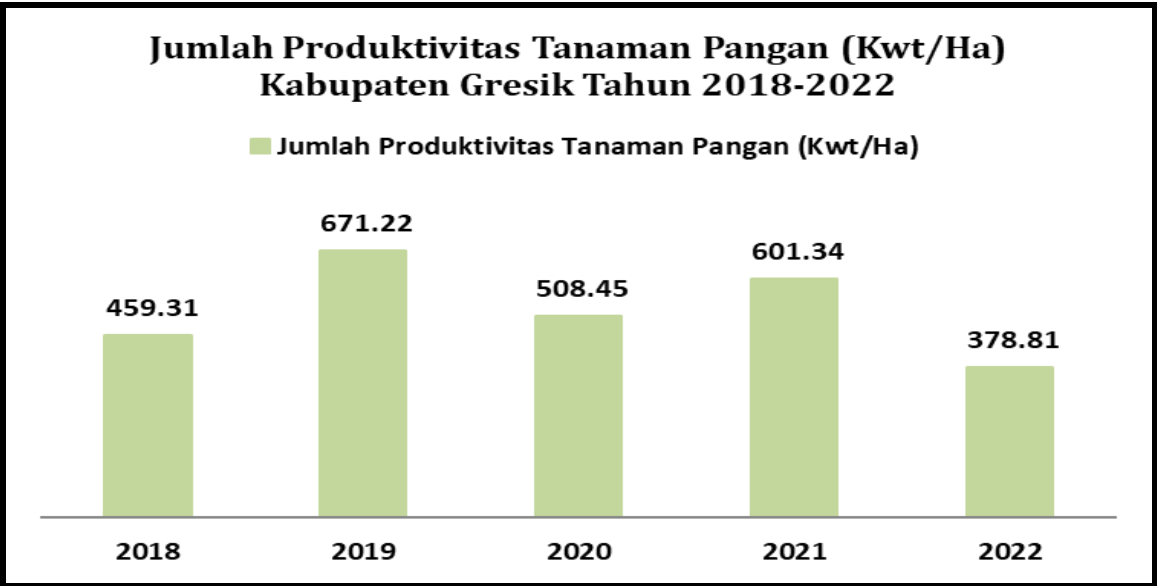
**Tabel 2. 1 Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)
Kabupaten Gresik 2018 - 2022**

NO	JENIS TANAMAN	2018	2019	2020	2021	2022
Tanaman Pangan						
1	Padi	428.837,50	419.167,40	413.995,55	391.460,60	422.680,40
2	Jagung	158.136,60	145.856,20	132.555,11	125.041,00	176.773,10
3	Kedelai	279,90	107,70	103,78	164,50	433,60
4	Kacang Tanah	1.582,00	1.580,10	1.303,29	2.058,30	1.569,00
5	Kacang Hijau	1.854,50	347,90	8.710,94	332,40	684,60
6	Ubi kayu	8.775,00	13.059,30	972,05	11.914,50	14.712,90
7	Ubi jalar	178,50	411,70	736,00	970,90	-
Tanaman Hortikultura						
Sayur-Sayuran						
1	a.1 Sawi	300,40	204,80	204,80	322,00	323,40
2	a.2 Kacang panjang	541,30	521,60	521,60	317,20	318,58
3	a.3 Cabe	13.089,90	25.994,70	25.994,70	27.812,20	27.933,18
4	a.4 Tomat	829,30	1.107,10	1.107,10	152,30	152,96
5	a.5 Terong	1.775,80	1.744,40	1.744,40	279,10	280,31
6	a.6 Ketimun	423,80	351,50	351,50	13,10	13,16
7	a.7 Labu Siam	-	-	-	-	-
8	a.8 Kangkung	619,70	659,40	659,40	646,10	648,91
9	a.9 Bayam	436,20	417,80	417,80	383,10	384,77
Tanaman Buah-Buahan						
1	b.1 jambu biji	498,80	515,00	515,00	1.549,70	1.556,44
2	b.2 Jeruk	143,00	518,80	518,80	626,10	628,82
3	b.3 Mangga	27.203,00	37.922,70	63.961,90	78.365,80	78.706,69
4	b.4 Pepaya	515,80	848,60	848,60	2.009,10	2.017,84
5	b.5 Pisang	20.093,00	19.513,50	19.513,50	28.133,10	28.255,48
6	b.6 Belimbing	378,00	539,90	539,90	689,60	692,60
7	b.7 Sawo	176,90	246,10	246,10	987,20	991,49

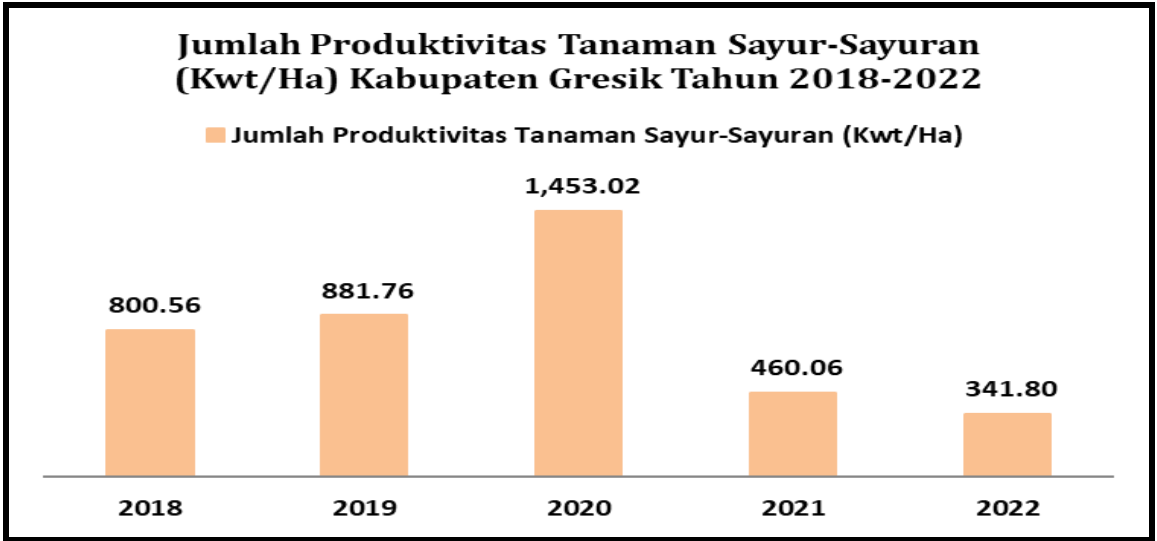
NO	JENIS TANAMAN	2018	2019	2020	2021	2022
8	b.8 Sirsak	78,00	74,40	74,40	565,20	567,66
9	b.9 Buah Naga	1.080,00	1.500,00	1.500,00	1.507,05	1.513,61
Tanaman Obat						
1	c.1 Kunyit	15.696,67	19.259,30	19.259,30	23.118,59	23.219,16
2	c.2 Jahe	106,26	105,80	105,80	106,30	106,76

Sumber : Data Dinas Pertanian, 2023

Dari data yang diperoleh dari Dinas Pertanian pada tahun 2023, produksi yang mengalami komoditas unggulan perkebunan dari tanaman jagung, kedelai, ubi kayu, cabe, jambu biji, manga, pisang, belimbing, sawo, dan sirsak. Secara kumulasi jumlah produksi dalam 5 tahun kebelakang cenderung mengalami peningkatan.

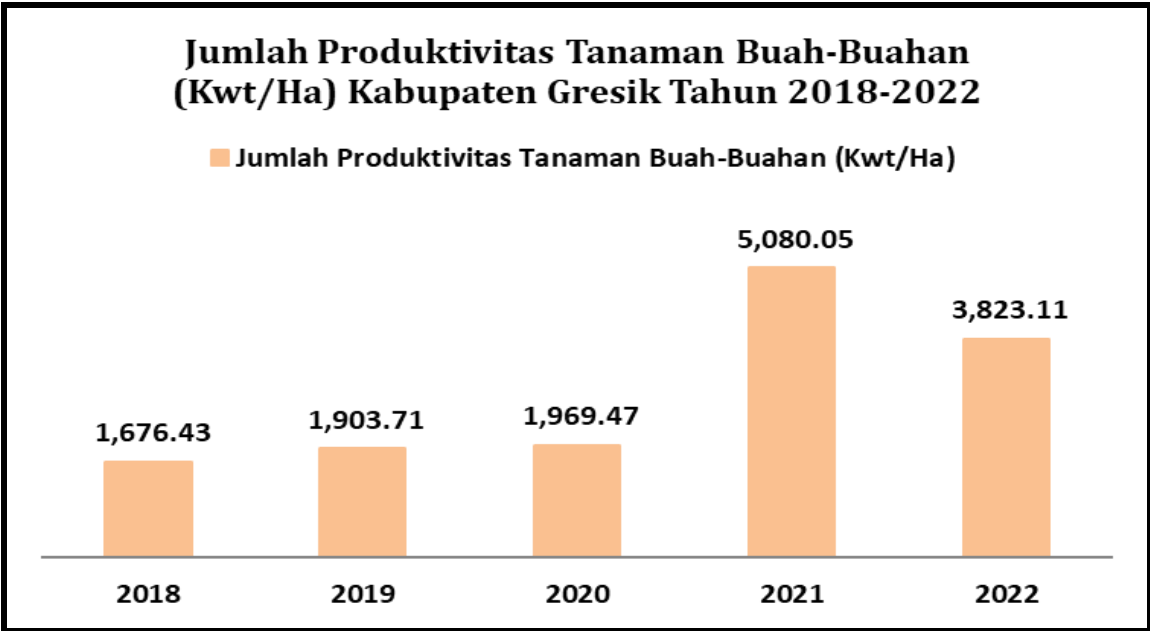


Gambar 2. 5 Grafik Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Kwt/Ha) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022

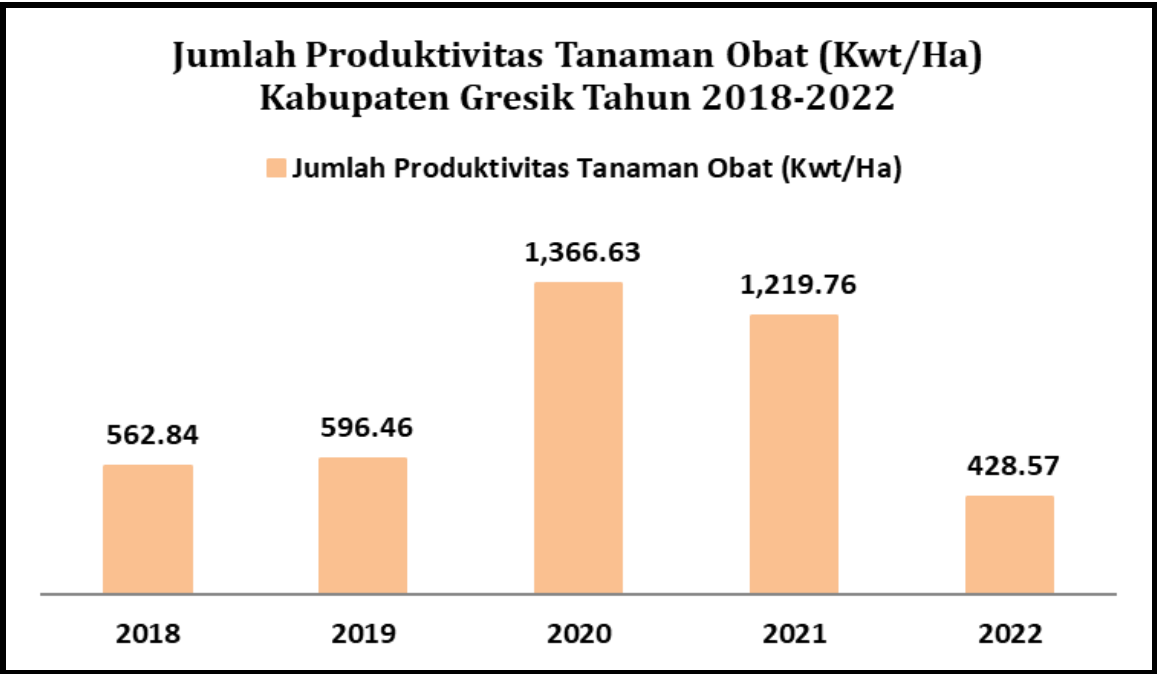


Gambar 2. 6 Grafik Jumlah Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Kwt/Ha) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022





Gambar 2. 7 Grafik Jumlah Produksi Tanaman Buah-Buahan (Kwt/Ha) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022



Gambar 2. 8 Grafik Produktivitas Tanaman Obat (Kwt/Ha) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022

Grafik Produktivitas pada tanaman pangan dan tanaman hortikultura terus bergerak fluktuatif. Produktivitas merupakan kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman dengan melihat kemampuan tanah untuk menghasilkan produksi tanaman tertentu.

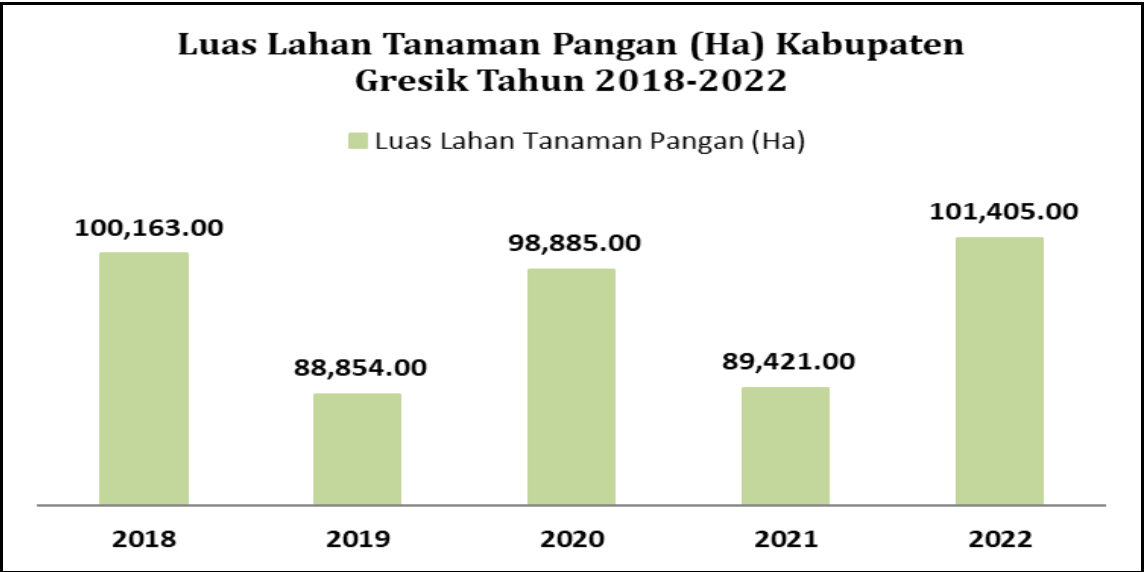


Tabel 2. 2 Data Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022

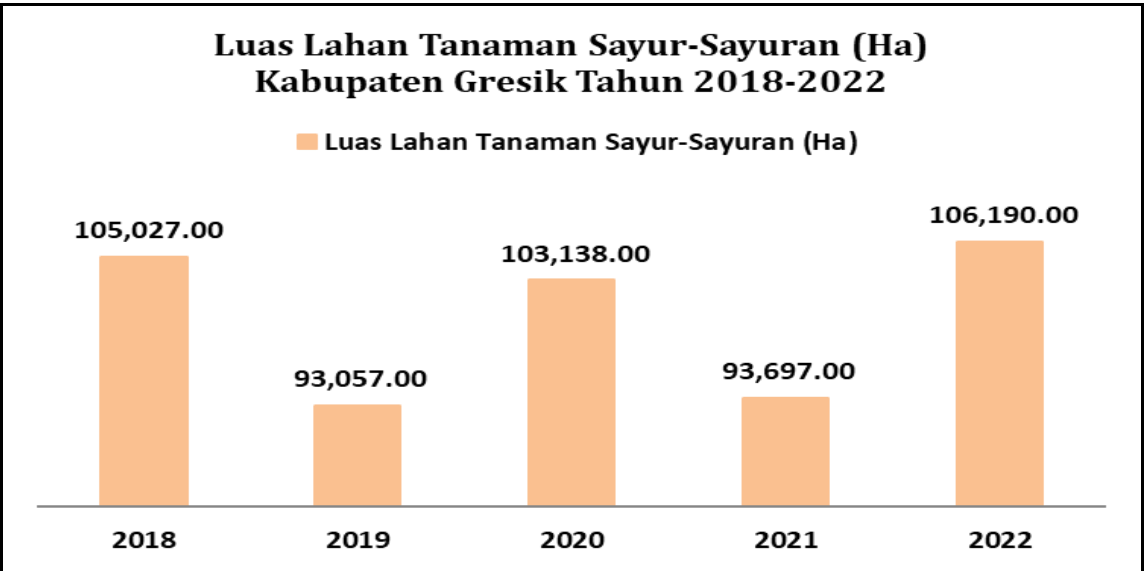
NO	JENIS TANAMAN	2018	2019	2020	2021	2022
Tanaman Pangan						
1	Padi	66,31	64,18	62,54	63,76	62,50
2	Jagung	53,00	59,41	62,87	65,30	63,36
3	Kedelai	13,00	18,43	16,30	22,51	17,94
4	Kacang Tanah	14,00	18,08	15,06	28,10	18,42
5	Kacang Hijau	13,00	11,90	16,00	12,88	13,32
6	Ubi kayu	150,00	250,65	128,86	228,98	203,27
7	Ubi jalar	150,00	248,57	206,82	179,81	-
Tanaman Hortikultura						
Sayur-Sayuran						
1	a.1 Sawi	54,62	42,67	30,57	53,67	27,64
2	a.2 Kacang panjang	75,18	88,41	118,55	-	-
3	a.3 Cabe	72,64	130,82	116,20	127,40	103,49
4	a.4 Tomat	106,32	178,56	276,78	58,58	43,70
5	a.5 Terong	174,10	207,67	311,50	93,03	80,09
6	a.6 Ketimun	249,29	146,46	502,14	32,75	-
7	a.7 Labu Siam	-	-	-	-	-
8	a.8 Kangkung	38,73	48,84	48,13	41,42	41,07
9	a.9 Bayam	29,67	38,33	49,15	53,21	45,81
Tanaman Buah-Buahan						
1	b.1 jambu biji	126,00	129,27	145,30	394,19	326,00
2	b.2 Jeruk	17,52	192,91	151,81	16,59	10,35
3	b.3 Mangga	62,35	118,45	141,78	167,59	167,68
4	b.4 Pepaya	297,87	299,25	389,91	461,54	595,72
5	b.5 Pisang	824,88	720,77	703,45	1.045,38	854,72
6	b.6 Belimbing	170,30	227,49	241,67	341,05	301,04
7	b.7 Sawo	94,35	116,91	78,13	247,67	137,29
8	b.8 Sirsak	83,16	98,67	117,41	767,93	553,09
9	b.9 Buah Naga	-	-	-	1.638,10	877,20
Tanaman Obat						
1	c.1 Kunyit	307,05	255,70	310,63	644,08	358,05
2	c.2 Jahe	255,78	340,76	1.055,99	575,68	70,53

Sumber : Data Dinas Pertanian, 2023

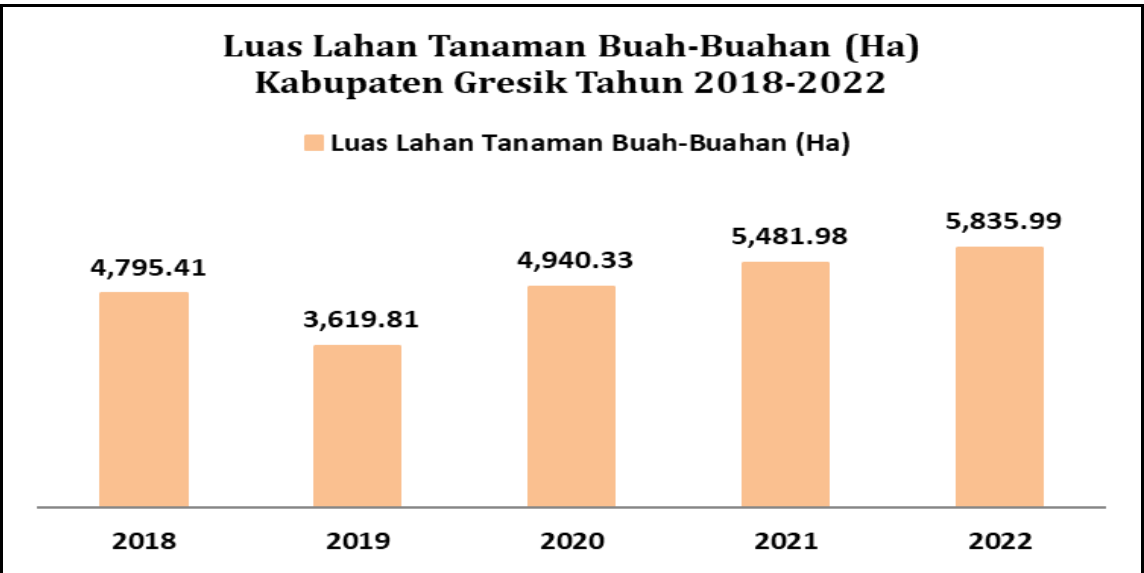




Gambar 2. 9 Grafik Luas Lahan Tanaman Pangan (Ha) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022

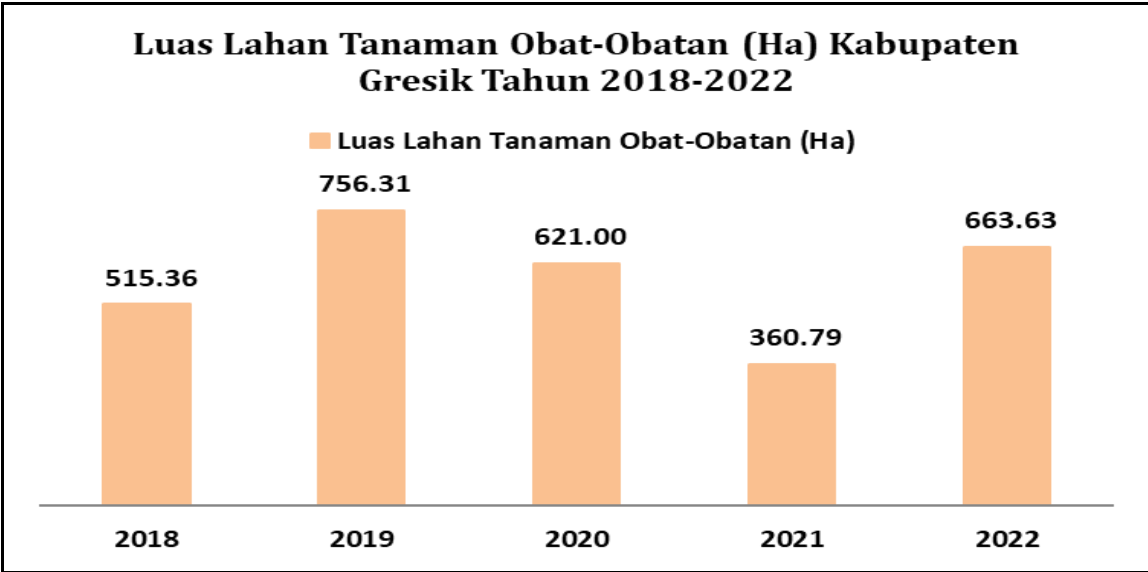


Gambar 2. 10 Grafik Luas Lahan Tanaman Sayur-sayuran (Ha) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022



Gambar 2. 11 Grafik Luas Lahan Tanaman Buah-buahan (Ha) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022





Gambar 2. 12 Grafik Luas Lahan Tanaman Obat-obatan (Ha) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022

Perkembangan luasan lahan pangan terus bergerak fluktuatif selama lima tahun terakhir Berdasarkan grafik luas lahan pada tanaman pangan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2022. Sedangkan pada tanaman hortikultura lebih kepada kestabilan luas lahan yang dibutuhkan.

Tabel 2. 3 Data Luas Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha) di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022

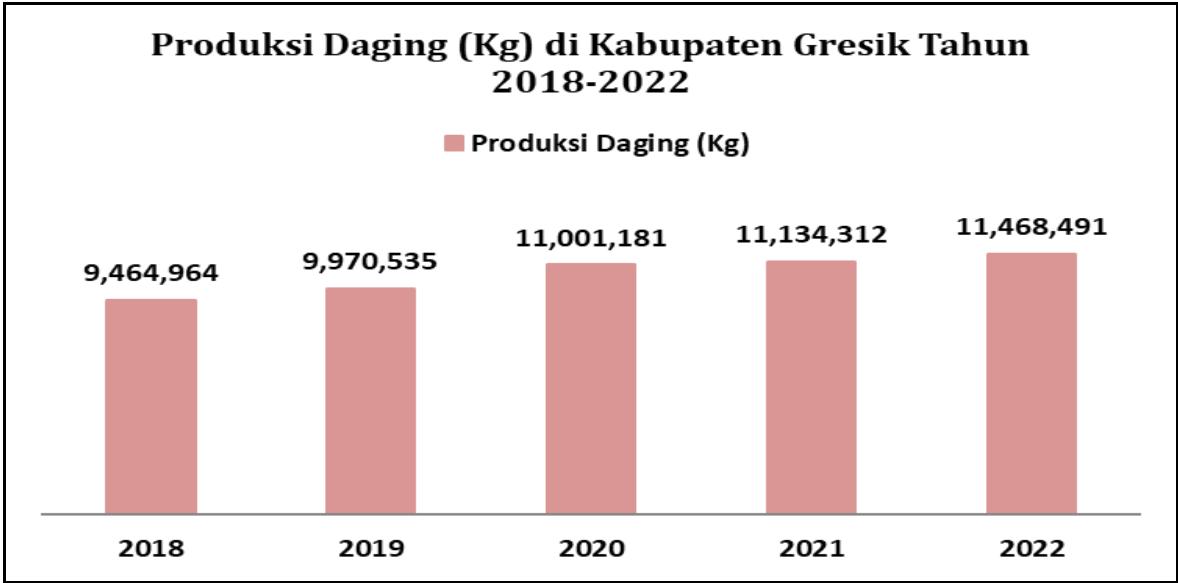
NO	JENIS TANAMAN	2018	2019	2020	2021	2022
Tanaman Pangan						
1	Padi	64.703,00	61.433,00	73.451,00	65.889,00	69.328,00
2	Jagung	32.493,00	25.314,00	23.494,00	21.450,00	29.894,00
3	Kedelai	110,00	60,00	75,00	75,00	249,00
4	Kacang Tanah	973,00	1.326,00	783,00	763,00	831,00
5	Kacang Hijau	1.259,00	274,00	427,00	261,00	632,00
6	Ubi kayu	599,00	402,00	653,00	928,00	471,00
7	Ubi jalar	26,00	45,00	2,00	55,00	-
Tanaman Hortikultura						
Sayur-Sayuran						
1	a.1 Sawi	55,00	48,00	67,00	60,00	117,00
2	a.2 Kacang panjang	72,00	59,00	44,00	-	-
3	a.3 Cabe	1.802,00	1.987,00	2.237,00	2.183,00	2.699,00
4	a.4 Tomat	78,00	62,00	40,00	26,00	35,00
5	a.5 Terong	102,00	84,00	56,00	30,00	35,00
6	a.6 Ketimun	17,00	24,00	7,00	4,00	-
7	a.7 Labu Siam	-	-	-	-	-
8	a.8 Kangkung	160,00	135,00	137,00	156,00	158,00
9	a.9 Bayam	147,00	109,00	85,00	72,00	84,00



NO	JENIS TANAMAN	2018	2019	2020	2021	2022
Tanaman Buah-Buahan						
1	b.1 jambu biji	39,59	39,84	35,44	39,31	47,74
2	b.2 Jeruk	81,63	26,89	34,17	377,40	607,30
3	b.3 Mangga	4.362,96	3.201,67	4.511,38	4.675,98	4.693,75
4	b.4 Pepaya	17,32	28,36	21,76	43,53	33,87
5	b.5 Pisang	243,59	270,73	277,40	269,12	330,58
6	b.6 Belimbing	22,20	23,73	22,34	20,22	23,01
7	b.7 Sawo	18,75	21,05	31,50	39,86	72,22
8	b.8 Sirsak	9,38	7,54	6,34	7,36	10,26
9	b.9 Buah Naga	-	-	-	9,20	17,26
Tanaman Obat						
1	c.1 Kunyit	511,21	753,21	620,00	358,94	648,50
2	c.2 Jahe	4,15	3,10	1,00	1,85	15,14

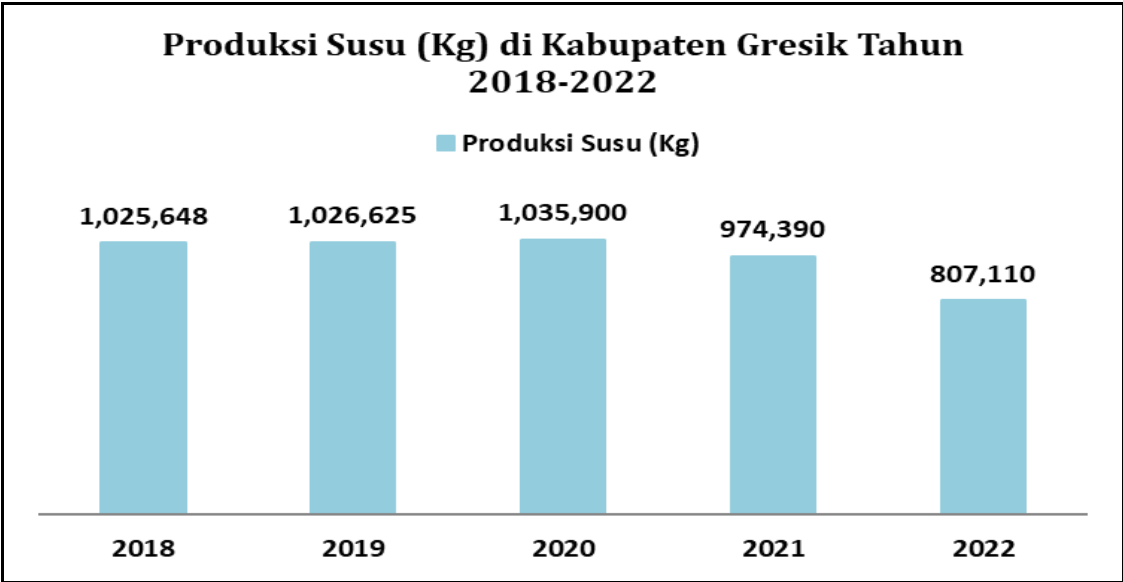
Sumber : Data Dinas Pertanian, 2023

Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2018-2022 cenderung mengalami penambahan. Tanaman yang luas lahannya mengalami penambahan yakni sama dengan tanaman yang mengalami produksi yang mengalami komoditas unggulan. Maka dari itu jumlah produksi, produktivitas, sumber daya manusia, dan luas lahan saling berkaitan dan saling mendukung. Namun hal tersebut juga menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar.

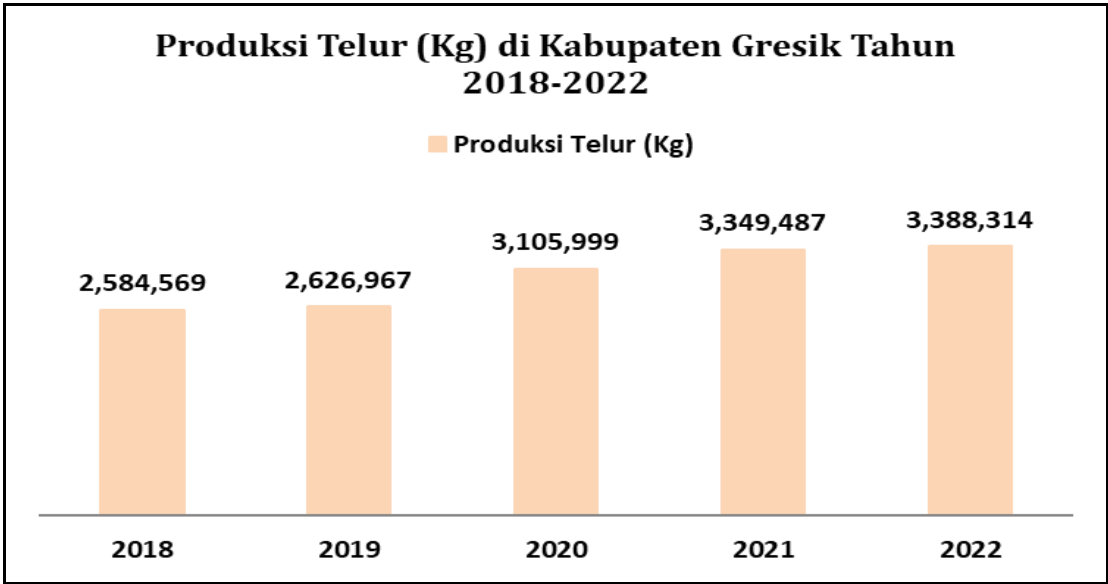


Gambar 2. 13 Grafik Produksi Daging (Kg) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022





Gambar 2. 14 Grafik Produksi Susu (Kg) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022



Gambar 2. 15 Grafik Produksi Telur (Kg) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022

Tabel 2. 4 Data Pertumbuhan Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Gresik Tahun 2019-2020

NO	KOMODITAS	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Daging (Kg)						
1	Sapi Potong	2.696.262	2.748.340	2.271.086	2.434.826	2.521.392
2	Kambing	799.788	867.663	882.750	846.860	1.072.341
3	Domba	115.206	116.875	118.560	121.680	141.492
4	Itik	220.200	260.715	131.100	107.150	107.050
5	Ayam ras petelur	488.961	491.524	374.000	332.750	332.970
6	Ayam ras pedaging	3.956.142	4.161.900	5.760.000	5.889.293	5.890.500
7	Ayam buras	1.188.405	1.320.000	1.330.000	1.301.400	1.300.800
8	Babi	-	3.443	3.443	1.711	2.979
9	Entok	-	-	130.050	98.450	98.775

NO	KOMODITAS	2018	2019	2020	2021	2022
10	Puyuh	-	14	30	30	30
11	Burung Dara	-	61	162	162	162
Produksi Susu (Kg)						
1	Susu Sapi	1.025.648	1.026.625	1.035.900	974.390	807.110
Produksi Telur (Kg)						
1	Telur Entok	19.341	19.534	19.514	16.328	38.521
2	Telur Burung Puyuh	11.468	12.390	12.395	12.497	12.574
3	Telur Ayam Buras	416.510	419.048	385.891	270.498	418.120
4	Telur Ayam Ras Petelur	1.909.692	1.945.498	2.458.131	2.827.019	2.668.534
5	Telur Itik	227.558	230.497	230.068	223.145	250.565

Sumber : Data Dinas Pertanian, 2023

Produksi komoditas peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari produksi daging dengan komoditas produksi daging, telur, dan susu. Produksi daging terdiri dari sapi potong, kambing, domba, itik, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, babi, entok, puyuh, dan burung dara; produksi susu terdiri dari susu sapi; dan produksi telur terdiri dari telur entok, telur burung puyuh, telur ayam buras, telur ayam ras petelur, dan telur itik.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, produksi hasil peternakan di Kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2022 khususnya pada komoditas daging dan telur. Pada tahun 2019, total produksi daging mencapai 9.464.964 Kg dan naik sebesar 11.468.491 Kg pada tahun 2022. Ayam ras pedaging, sapi potong, ayam buras, dan kambing menjadi penyumbang terbesar naiknya jumlah produksi peternakan. Sementara itu produksi susu terus mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir dari 1.025.648 Kg pada tahun 2019 menjadi 807.110 Kg pada tahun 2022.

Selanjutnya adalah gambaran produksi perikanan di Kabupaten Gresik. Ditunjukkan dengan data produksi perikanan budidaya, produksi ikan menurut jenisnya dan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Gresik.



Tabel 2. 5 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	18,786.01	19,221.00	23,458.45	22,450.50	10,553.77	11,458,526
2	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap	juta rupiah	237,380.59	528,189.88	397,234.24	439,714.53	202,761.56	284,109,13
3	Jumlah Jenis Penangkapan	jenis	42	42	42	42	42	42
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	ton	442.55	510	821.47	1,055.76	561.600	589.200
5	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	juta rupiah	6,807.10	7,809.08	8,579.11	22,916.93	16,154.70	16,948,653
6	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	89,233.41	102,114	129,214	141,119.32	138,579.34	142,746026
7	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Budidaya	juta rupiah	1,991,058.56	1,395,800.13	2,460,086.22	2,564,279.89	2,549,295.68	3,274,293,08
8	Jumlah Jenis Budidaya	jenis	8	8	8	8	8	8
9	Luasan kawasan Konsevasi yang direhabilitasi	Ha	31.00	35.60	53.60	11.95	77.00	75.48

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, 2021



Tabel 2. 6 Perkembangan Hasil Laut Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
a.	Produksi							
	▪ Garam	Ton	4,500.00	4,716.00	5,944.00	11,564.90	2,600.00	1.545
	▪ Rajungan	Ton	250.3	351.42	320.04	164.32	70.35	96.1
	▪ Kepiting	Ton	152.55	226.2	224.91	92.72	75.52	144.6
	▪ Kerang	Ton	7,949.00	8,055.70	8,162.00	9,924.62	695.28	1.139.1
	▪ Ikan Krapu	Ton	460.6	279.31	157.09	131,381.42	53.77	283.615
	▪ Tuna	Ton	-	-	-	-	-	
	▪ Udang	Ton	2,514.98	2,435.48	1,410.08	1,371.29	352.17	669.32
	▪ Kakap Merah	Ton	252.01	244.34	253.72	167.64	49.14	818.076
	▪ Lainnya	Ton	15,155.57	15,463.76	19,446.54	17,436.26	9,819.14	6.928.79
b.	Volume Ekspor							
	▪ Udang	Ton	-	-	-	-	-	-
c.	Nilai Ekspor							
	▪ Udang	Juta	-	-	-	-	-	-
d.	Industri Pengolahan							
	▪ Garam	Unit	3	3	3	3	4	5

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, 2021



Tabel 2. 7 Perkembangan Perikanan Darat di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
a.	Tambak							
	1. Luas Areal	Ha	17,335.02	17,335.02	17,335.02	30,129.00	30,279.00	28.653.27
	2. Jumlah Produksi Udang Windu	Ton	3,679.28	2,610.17	2,623.22	2,643,781	2,557.62	112,169
	3. Jumlah Produksi Udang Vanname	Ton	7,087.64	10,463.95	10,516.27	10,599,493	10,549.84	715,962
	4. Jumlah Produksi Ikan Patin	Ton	9.06	10.14	10.19	10,422	10.54	785
	5. Jumlah Produksi Ikan Bandeng	Ton	75,836.73	87,970.57	88,410.43	89,925,371	87,119.30	90,397,8
	6. Jumlah Produksi Ikan Tambak Lainnya	Ton	4,019.81	2,873.26	2,887.63	37,940.25	3,069.37	12.367
	7. Nilai Produksi Usaha Tambak (Rp.000,-)	Juta	1,805,420.00	2,094,700.10	2,106,200.73	1,585,967,073.4	2,366,890.42	1,569,314,273
b.	Kolam Air Tenang							
	1. Luas Areal	Ha	100.95	100.95	100.95	95.00	80.00	105
	2. Jumlah Produksi Ikan Sidat	Ton	-		-	-	-	-
	3. Jumlah Produksi Ikan Nila	Ton	17.71	37	5,274.26	5,393.41	5301	5,432,2
	4. Jumlah Produksi Ikan Lele	Ton	155.39	1,153.68	1,159.45	1,193.98	1220	1,215,4
	5. Jumlah Produksi Ikan Gurami	Ton	3.09	2.62	2.63	2.48	2.73	2.491.02
	6. Jumlah Produksi Ikan	Ton	170.9	186.92	251.46	101.99	18,699.	67,610



NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
	Tawar Lainnya							
	7. Nilai Produksi Usaha Kolam Air Tenang (Rp. 1000,-)	Juta	3,827.45	18,750.93	18,959.06	262.72	182,405	919,117
c.	Sawah/Mina padi							
	1. Luas Areal	Ha	14,402.05	14,402.05	14,629.05	14,550.00	12,750.00	14.500
	2. Jumlah Sawah	Petak	-	-	-	-	-	-
	3. Jumlah Produksi Ikan Mas	Ton	1,842.37	2,291.96	2,303.42	2,325.66	2.303.00	2,326,09
	4. Jumlah Produksi Ikan Nila	Ton	2,493.59	5,211.00	5,237.07	5,393.41	5,301	5,432,1
	5. Jumlah Produksi Ikan Hias	Ton			-	-	-	-
	6. Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya	Ton	12,363.23	15,723.40	15,802.02	17,376.77	18,699.90	15,608.66
	7. Nilai Produksi Usaha Sawah/ Mina Padi	Juta	139,969.85	241,844.71	251,037.24	262,715.97	182.405.26	-
d.	Penangkapan ikan Perairan Umum							
	1. Luas Areal	Ha	937.69	937.69	937.69	937.69	937.69	937.69
	2. Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll)	Ton	442.55	499.65	821.47	602.25	561.6	589.2
	3. Nilai Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll)	Juta	6,426.79	7,809.08	12,914	23,953	16,154	4.713.600

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, 2021

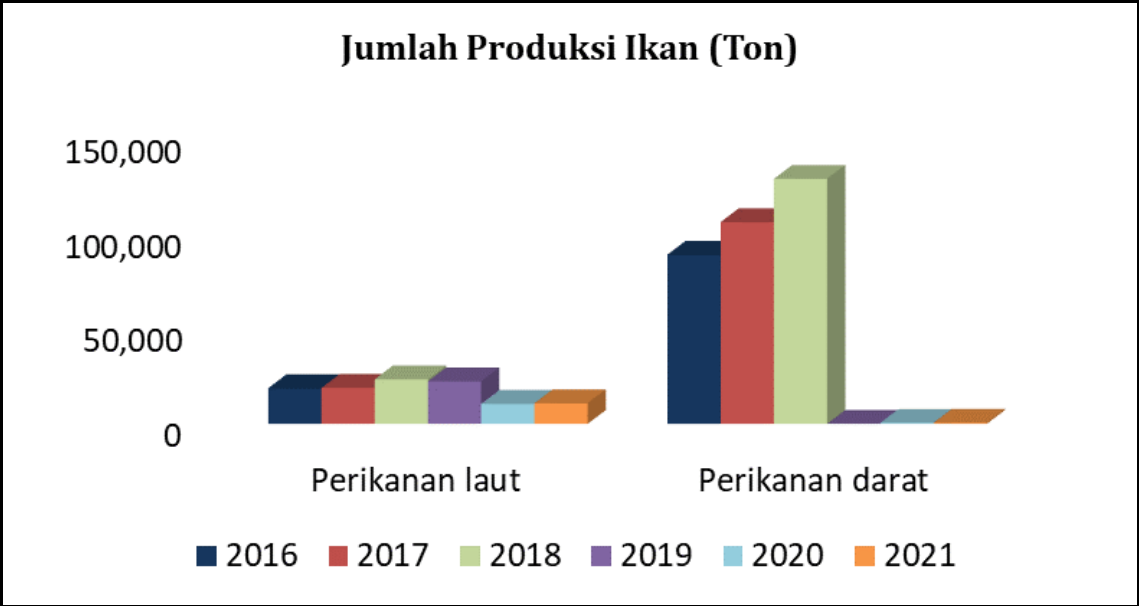


Tabel 2. 8 Jumlah Produksi Ikan dan Target Daerah Produksi Ikan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
I.	Jumlah Produksi Ikan							
	1)Perikanan laut	Ton	18,786.01	19,000.51	23,458.45	22,423.47	10,553.77	10.869,33
	2)Perikanan darat	Ton	89,233	106,421	129,214	865.76	561	589
II.	Target Daerah Produksi Ikan							
	1)Perikanan laut	Ton	19,221	19,509	19,802	20,690	21,316.20	10.672
	2)Perikanan darat	Ton	102,114	113,516	126,260	250.50	1,134.30	565

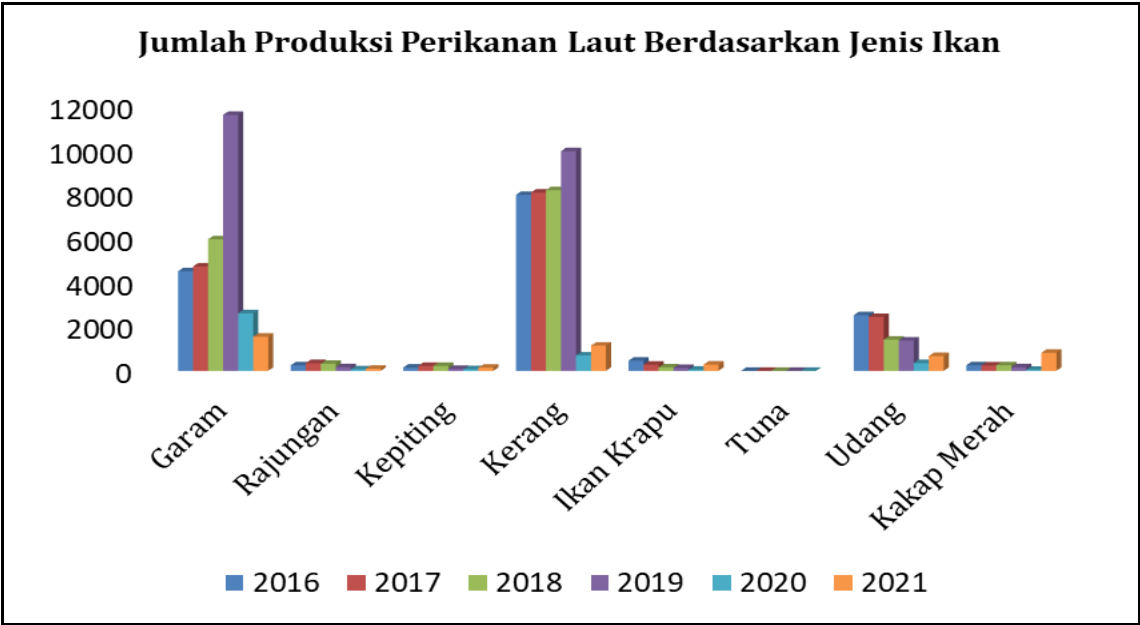
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, 2021





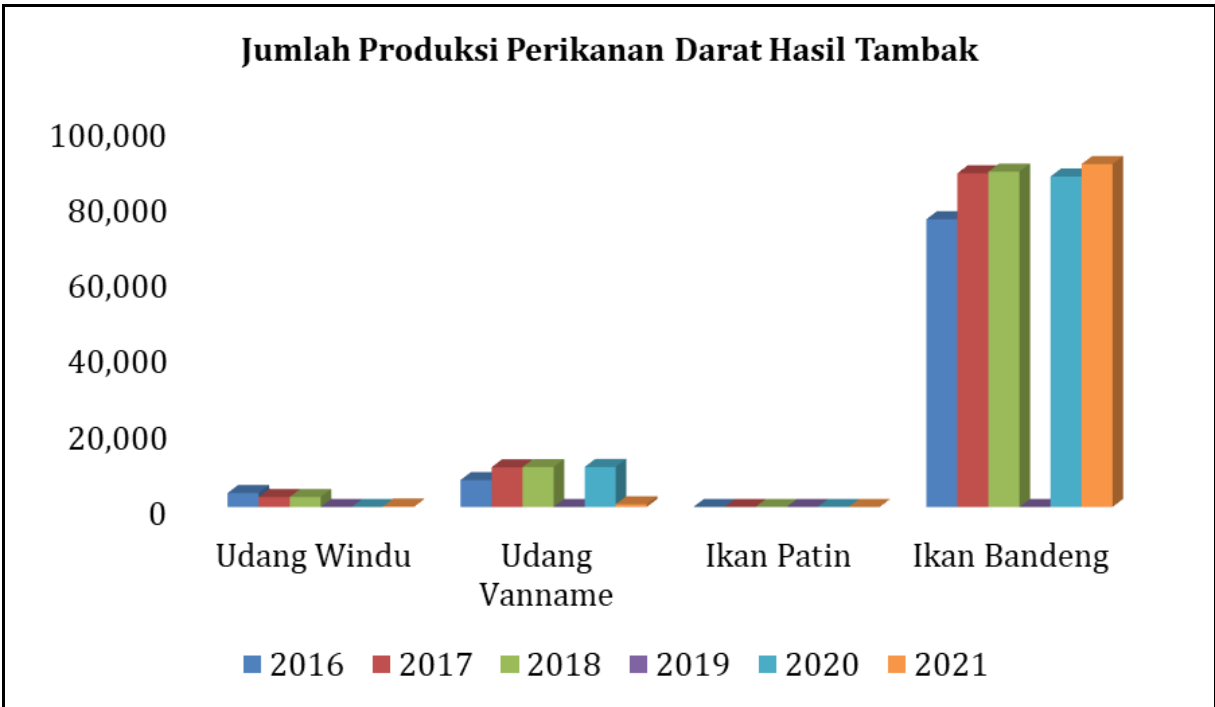
Gambar 2. 16 Grafik Jumlah Produksi Ikan (Ton) Tahun 2016-2021

Berdasarkan jumlah produksi ikan pada tahun 2016-2021, dapat dilihat bahwa produksi ikan dari perikanan laut mengalami penurunan produksi dari tahun 2016 dengan produksi sebesar 18.786,01 ton menurun ditahun 2021 menjadi 10.869,33 ton. Sedangkan untuk produksi perikanan darat mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 89,233 ton, turun menjadi 589 ton di tahun 2021.

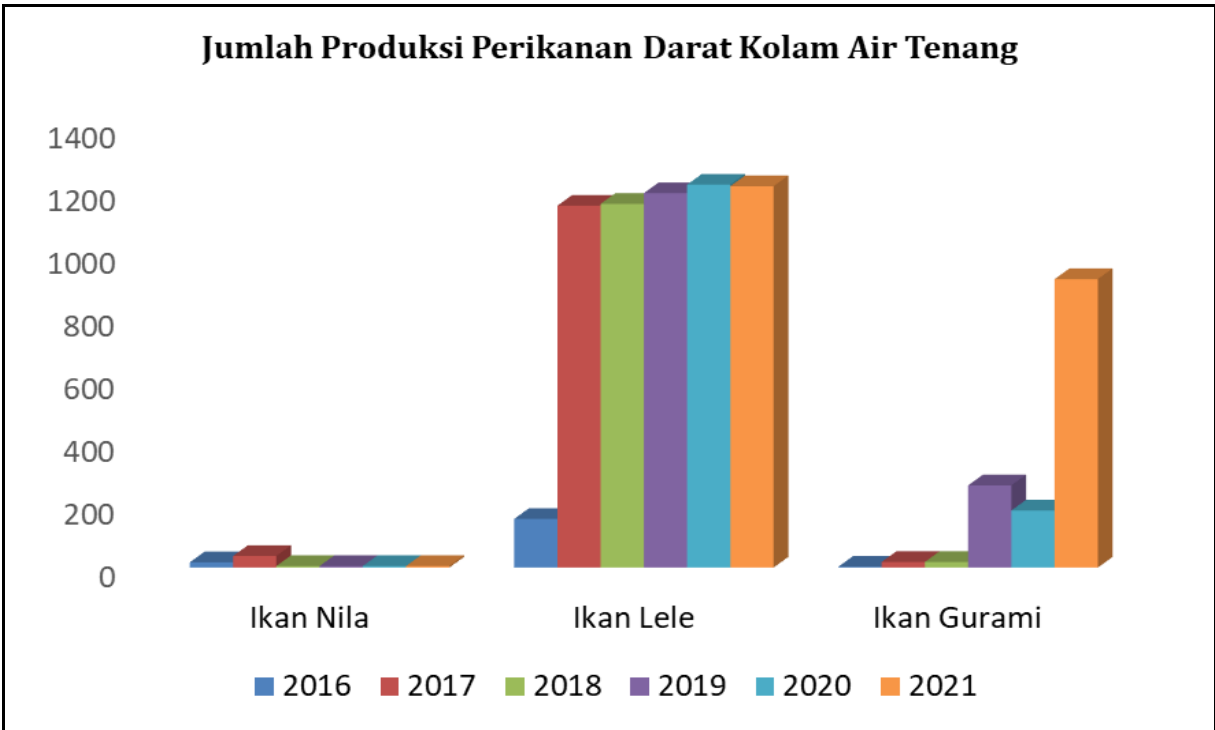


Gambar 2. 17 Grafik Jumlah Produksi Perikanan Darat Berdasarkan Jenis Ikan (Ton) Tahun 2016-2021



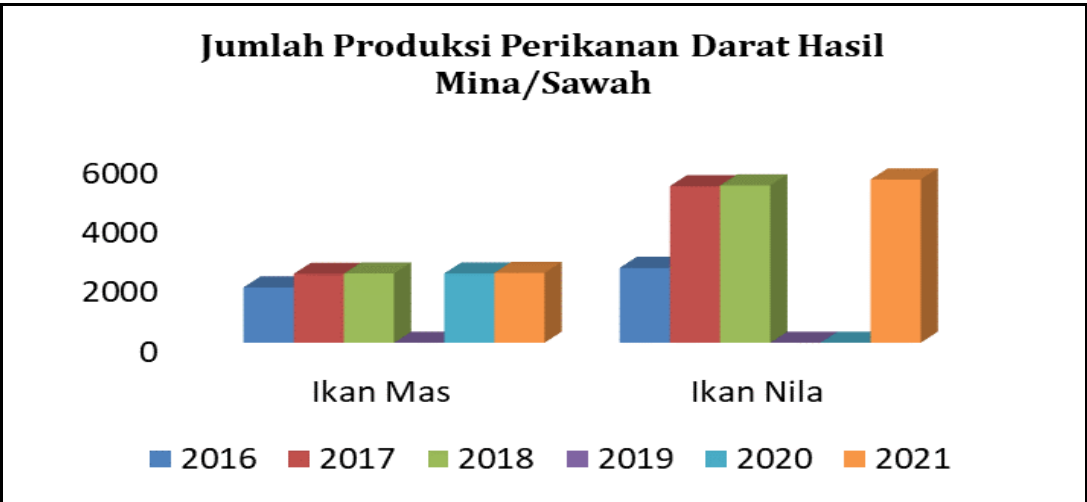


Gambar 2. 18 Grafik Jumlah Produksi Perikanan Darat Hasil Tambak (Ton) Tahun 2016-2021



Gambar 2. 19 Grafik Jumlah Produksi Perikanan Darat Kolam Air Tenang (Ton) Tahun 2016-2021





Gambar 2. 20 Grafik Jumlah Produksi Perikanan Darat Hasil Mina/Sawah (Ton) Tahun 2016-2021

Berdasarkan jenisnya, produksi budidaya perikanan laut yang menjadi unggulan di Kabupaten Gresik adalah komoditas garam dan komoditas kerang. Jumlah produksi komoditas garam pada tahun 2016 sebesar 4.500 ton dan mengalami penurunan produksi pada tahun 2021 sebesar 1.545 ton. Untuk jumlah produksi komoditas kerang pada tahun 2016 sebesar 7.949 ton dan mengalami penurunan produksi pada tahun 2021 sebesar 1.139.1 ton. Produksi budidaya perikanan darat yang menjadi unggulan di Kabupaten Gresik adalah komoditas ikan bandeng, komoditas ikan lele, dan komoditas ikan nila. Jumlah produksi ikan bandeng pada tahun 2016 sebesar 75,836.73 ton dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 90,397,8 ton. Jumlah produksi ikan lele pada tahun 2016 sebesar 155.39 ton dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 1,215,4 ton. Jumlah produksi ikan nila pada tahun 2016 sebesar 2,493.59 ton dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 5,432,1 ton.

Ketersediaan pangan dan produksi pangan memiliki makna yang berbeda, ketersediaan adalah terpenuhinya kebutuhan bahan pangan yang diperoleh dari dari luar produksi sendiri, sedangkan produksi pangan merupakan hasil dari tanah sendiri (Sumarsono, dkk 2017). Menurut FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas). Menghitung ketersediaan pangan dilakukan dengan mengetahui rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih bahan pangan. Berikut merupakan estimasi kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Gresik.



Tabel 2. 9 Estimasi Kebutuhan Pangan Penduduk Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Indonesia Tahun 2021

KELOMPOK/JENIS PANGAN	RATA-RATA KEBUTUHAN PANGAN (KG/KAPITA/TAHUN)						
	TAHUN DASAR 2021	PROYEKSI					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Padi-padian							
Beras	89,4	89	88,5	88	87,5	87	86,5
Jagung	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Terigu	20	19,9	19,8	19,7	19,6	19,4	19,3
Subtotal padi-padian	111,1	110,4	109,8	109,2	108,6	108,0	107,4
2. Umbi-umbian							
Singkong	9,6	11,6	13,7	15,8	17,9	20,0	22,1
Ubi jalar	2,9	3,6	4,2	4,9	5,5	6,2	6,8
Kentang	2,4	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,5
Sagu	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Umbi lainnya	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Subtotal umbi-umbian	15	18,3	21,6	24,9	28,2	31,5	34,8
3. Pangan hewani							
Daging ruminansia	5,9	5,8	5,8	5,7	5,6	5,6	5,5
Daging unggas	9,4	9,3	9,2	9,1	9,0	8,9	8,7
Telur	9,1	9,0	8,9	8,7	8,6	8,5	8,4
Susu	3,7	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	3,4
Ikan	30,6	30,2	29,9	29,5	29,1	28,8	28,4



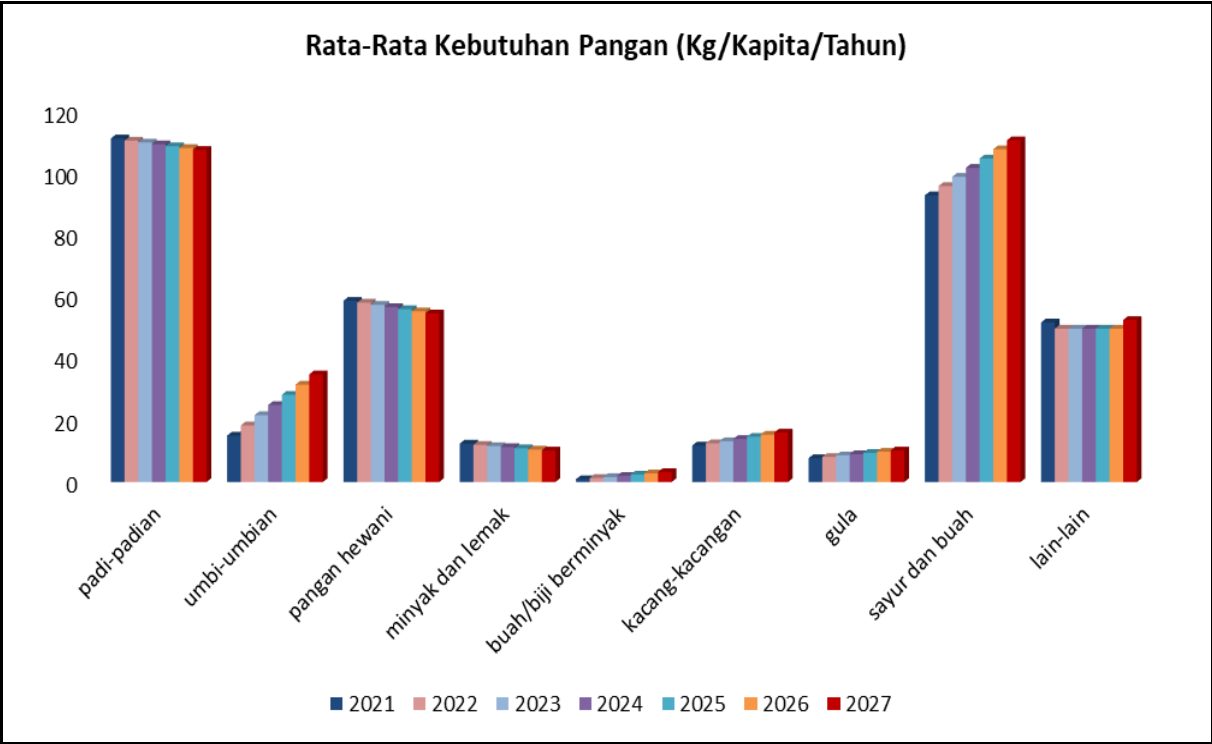
KELOMPOK/JENIS PANGAN	RATA-RATA KEBUTUHAN PANGAN (KG/KAPITA/TAHUN)						
	TAHUN DASAR 2021	PROYEKSI					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Subtotal pangan hewani	58,6	58,0	57,3	56,6	55,9	55,2	54,5
4. Minyak dan Lemak							
Minyak kelapa	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Minyak lainnya	11,4	11,1	10,7	10,4	10,1	9,7	9,4
Margarin	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Subtotal minyak dan lemak	12,4	12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	10,2
5. Buah/biji berminyak							
Kelapa	0,5	0,7	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9
Kemiri	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3
Subtotal buah/biji berminyak	0,9	1,3	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2
6. Kacang-kacangan							
Kacang kedelai	10,4	11,0	11,6	12,3	12,9	13,5	14,1
Kacang tanah	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Kacang hijau	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Kacang lain	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9
Subtotal kacang-kacangan	11,8	12,5	13,2	13,9	14,6	15,3	16,0
7. Gula							
Gula pasir	7,6	8,0	8,4	8,8	9,2	9,6	10,0
Gula merah	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2



KELOMPOK/JENIS PANGAN	RATA-RATA KEBUTUHAN PANGAN (KG/KAPITA/TAHUN)						
	TAHUN DASAR 2021	PROYEKSI					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Subtotal gula	7,7	8,1	8,6	9,0	9,4	9,8	10,2
8. Sayur dan Buah							
Sayur	53,6	55,3	57,1	58,8	60,5	62,2	63,9
Buah	39,1	40,4	41,6	42,9	44,1	45,4	46,6
Subtotal sayur dan buah	92,7	95,7	98,7	101,6	104,6	107,6	110,5
9. Lain-Lain							
Minuman	47,0	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	47,7
Bumbu	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,7
Subtotal lain-lain	51,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	52,4

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2021





Gambar 2. 21 Grafik Rata-Rata Kebutuhan Pangan Tahun 2021-2027

Berdasarkan data rata-rata kebutuhan pangan penduduk tahun 2021-2027, dapat diketahui bahwa kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Gresik tahun 2021-2027 didominasi oleh padi-padian dan sayur buah. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk tersebut, perlu adanya ketersediaan produksi dari masing-masing komoditas pangan untuk menghindari terjadinya kelangkaan pangan.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan utama dalam kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian, upaya-upaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan utama di daerah menjadi sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk secara langsung dan menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan secara sistemik. Penyelenggaraan urusan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada Tahun 2020 dilakukan oleh Bidang Pangan yang terdiri dari 1 Program dan 3 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 452.815.000,- . Capaian indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2020 dengan sasaran Mencapai Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Pelaku Pertanian serta Target indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2020, dapat diuraikan sebagaimana berikut :



Tabel 2. 10 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2020

NO		KOMODITAS	2018	2019	2020	2021	2022
1		Rasio Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)	187,55	194,00	180,10	167,38	180,70
2		Rasio Konsumsi Pangan (Kg/Kapita/Tahun)	96,32	96,32	96,74	94,02	94,02

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2023

Rasio keterserdiaan pangan utama di Kabupaten Gresik terus berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Rasio ketersediaan pangan tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 dengan angka 180,41 kg/kapita/tahun, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2021 dengan rasio 167,4 kg/kapita/tahun. Rasio ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mencapai kemandirian pangan. Rasio ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan jumlah ketersediaan pangan utama (ton per tahun) dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun (jiwa) dan rasio konsumsi pangan dihitung berdasarkan jumlah konsumsi total (ton) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (jiwa). Pertumbuhan rasio konsumsi pangan di Kabupaten Gresik juga mengalami fluktuasi selama tahun 2017-2022. Rasio konsumsi pangan tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 dengan angka 96,74 kg/kapita/tahun. Rasio pangan dapat menggambarkan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Gresik. Ketahanan pangan terjadi bila jumlah ketersediaan pangan lebih besar 1,2 kali atau lebih tinggi 20% dibanding dengan jumlah konsumsi pangan. Pada kondisi ini, ketahanan pangan akan tetap aman meskipun terjadi gagal panen di Kabupaten Gresik maupun daerah pemasok pangan di sekitarnya, karena kebutuhan konsumsi pangan akan dipenuhi dari stok pangan tahun sebelumnya.

2. Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup. Aspek keterjangkauan pangan (food



accessibility) berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan (jumlah, kualitas, ruang dan waktu) harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

a. **Angka Konsumsi Energi (AKE) dan Angka Konsumsi Protein (AKP)**

Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah banyaknya asupan makanan dari seseorang yang seimbang dengan pengeluarannya sesuai dengan susunan dan ukuran tubuh, tingkat kegiatan jasmani dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara ekonomis dalam jangka waktu lama. Sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) adalah protein makanan paling sedikit yang seimbang dengan hilangnya nitrogen yang dikeluarkan oleh tubuh dalam keseimbangan energi pada tingkat kegiatan jasmani yang dilakukan. AKE, AKP dan angka kecukupan zat gizi lainnya berguna untuk mengukur tingkat konsumsi. Angka Kecukupan Protein (AKP) orang dewasa sebesar 0,75 gr. Protein Senilai Telur (PST) per kilogram berat badan per hari. Kondisi capaian AKE dan AKP Kabupaten Gresik tahun 2022 seperti terlihat pada Tabel 2.13 di bawah ini.

Tabel 2. 11 Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022

KELOMPOK/JENIS PANGAN	TOTAL WILAYAH			
	KANDUNGAN GIZI		BERAT PANGAN	
	ENERGI KKAL /KAPITA /HARI	PROTEIN GRAM /KAPITA /HARI	GRAM /KAPITA /HARI	KILOGRAM /KAPITA /TAHUN
1.Padi-padian				
Beras	892,20	20,00	235,30	85,90
Jagung	9,80	0,30	6,30	2,30
Terigu	240,70	4,70	41,90	15,30
Subtotal padi-padian	1.142,60	25,00	283,60	103,50
2.Umbi-umbian				
Singkong	35,20	0,30	29,40	10,70
Ubi jalar	6,80	0,10	5,40	2,00
Kentang	3,30	0,10	6,30	2,30
Sagu	0,30	0,00	0,10	0,00
Umbi lainnya	1,90	0,00	1,60	0,60
Subtotal umbi-umbian	47,40	0,50	42,90	15,70
3.Pangan hewani				
Daging ruminansia	62,60	3,80	19,10	7,00
Daging unggas	69,10	4,80	22,70	8,30
Telur	27,30	2,20	19,80	7,20



KELOMPOK/JENIS PANGAN	TOTAL WILAYAH			
	KANDUNGAN GIZI		BERAT PANGAN	
	ENERGI KKAL /KAPITA /HARI	PROTEIN GRAM /KAPITA /HARI	GRAM /KAPITA /HARI	KILOGRAM /KAPITA /TAHUN
Susu	28,50	1,20	7,30	2,70
Ikan	77,00	12,70	69,90	25,50
Subtotal pangan hewani	264,50	24,60	138,80	50,70
4.Minyak dan Lemak				
Minyak kelapa	6,90	0,00	0,80	0,30
Minyak lainnya	243,20	0,00	27,00	9,80
Margarin	7,90	0,00	1,00	0,40
Subtotal minyak dan lemak	258,00	0,00	28,70	10,50
5.Buah/biji berminyak				
Kelapa	6,60	0,10	1,20	0,40
Kemiri	6,60	0,20	1,00	0,40
Subtotal buah/biji berminyak	13,10	0,30	2,30	0,80
6.Kacang-kacangan				
Kacang kedelai	50,50	5,30	22,70	8,30
Kacang tanah	2,30	0,10	0,50	0,20
Kacang hijau	1,30	0,10	0,70	0,30
Kacang lain	1,40	0,10	0,50	0,20
Subtotal kacang-kacangan	55,50	5,60	24,40	8,90
7.Gula				
Gula pasir	58,80	0,00	15,70	5,70
Gula merah	1,80	0,00	0,50	0,20
Subtotal gula	60,60	0,10	16,20	5,90
8.Sayur dan Buah				
Sayur	48,20	2,50	129,40	47,20
Buah	50,80	0,50	91,70	33,50
Subtotal sayur dan buah	99,10	3,00	221,20	80,70
9.Lain-Lain				
Minuman	45,20	1,60	93,50	34,10
Bumbu	9,10	0,40	9,00	3,30
Subtotal lain-lain	54,30	2,00	102,50	37,40

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2023



Tabel 2. 12 Tingkat Kecukupan Gizi Konsumsi Pangan Penduduk Tahun 2022

Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
	Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Gram/ Kapita	%	% AKP**))
1. Padi-padian	1.142,64	57,3	53,1	25,0	57,3	43,8
2. Umbi-umbian	47,4	2,4	2,2	0,5	2,4	0,8
3. Pangan hewani	264,5	13,3	12,3	24,6	13,3	43,2
4. Minyak dan Lemak	258,0	12,9	12,0	0,0	12,9	0,0
5. Buah/biji berminyak	13,1	0,7	0,6	0,3	0,7	0,5
6. Kacang-kacangan	55,5	2,8	2,6	5,6	2,8	9,9
7. Gula	60,6	3,0	2,8	0,1	3,0	0,1
8. Sayur dan Buah	99,1	5,0	4,6	3,0	5,0	5,3
9. Lain-Lain	54,3	2,7	2,5	2,0	2,7	3,4
Total	1.995,26	100,0	92,8	61,0	100,0	107,0

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2023

Berdasarkan data terkait tingkat kecukupan gizi konsumsi pangan penduduk tahun 2022, dapat diketahui bahwa angka kecukupan gizi masyarakat Kabupaten Gresik sebesar 1.995,26 Kkal/Kapita dimana angka tersebut masih dibawah standar nasional yang ditentukan yakni angka kecukupan energi nasional sebesar 2.150 Kkal/Kapita/Hari. Untuk angka konsumsi protein masyarakat Kabupaten Gresik sebesar 61,0 Gram/Kapita dimana angka tersebut sudah melampaui dengan standar nasional yang ditentukan yakni angka kecukupan protein nasional sebesar 57,0 Gram/Kapita/Hari. Untuk proyeksi konsumsi pangan penduduk Tahun 2021-2027 dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut ini.



Tabel 2. 13 Proyeksi Konsumsi Energi Penduduk Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Indonesia Tahun 2021

KELOMPOK/JENIS PANGAN	RATA-RATA KONSUMSI ENERGI (KKAL/KAPITA/HARI)						
	TAHUN DASAR 2021	PROYEKSI					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Padi-padian							
Beras	811,2	806,7	802,2	797,7	793,2	788,7	784,2
Jagung	5,9	5,8	5,8	5,8	5,7	5,7	5,7
Terigu	356,5	354,5	352,5	350,5	348,6	346,6	344,6
Subtotal padi-padian	1,173,5	1.167,0	1.160,5	1.154,0	1.147,5	1.141,0	1.134,5
2. Umbi-umbian							
Singkong	28,8	35,1	41,4	47,7	54,0	60,4	66,7
Ubi jalar	9,2	11,2	13,2	15,2	17,2	19,2	21,2
Kentang	3,1	3,7	4,4	5,1	5,7	6,4	7,1
Sagu	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5
Umbi lainnya	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7
Subtotal umbi-umbian	42,0	51,2	60,4	69,6	78,8	88,0	97,2
3. Pangan hewani							
Daging ruminansia	81,8	80,9	79,9	79,0	78,0	77,0	76,1
Daging unggas	71,2	70,4	69,6	68,7	67,9	67,1	66,3
Telur	31,2	30,8	30,4	30,1	29,7	29,4	29,0
Susu	31,0	30,6	30,3	29,9	29,5	29,2	28,8
Ikan	77,6	76,7	75,8	74,9	74,0	73,0	72,1



KELOMPOK/JENIS PANGAN	RATA-RATA KONSUMSI ENERGI (KKAL/KAPITA/HARI)						
	TAHUN DASAR 2021	PROYEKSI					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Subtotal pangan hewani	292,7	289,3	285,9	282,5	279,1	275,7	272,3
4. Minyak dan Lemak							
Minyak kelapa	7,9	7,7	7,4	7,2	7,0	6,7	6,5
Minyak lainnya	256,4	248,7	241,1	233,4	225,8	218,1	210,5
Margarin	12,1	11,7	11,4	11,0	10,6	10,3	9,9
Subtotal minyak dan lemak	276,4	268,2	259,9	251,7	243,4	235,2	226,9
5. Buah/biji berminyak							
Kelapa	6,9	10,0	13,0	16,1	19,1	22,2	25,2
Kemiri	5,5	8,0	10,4	12,9	15,3	17,8	20,2
Subtotal buah/biji berminyak	12,4	17,9	23,4	28,9	34,5	40,0	45,5
6. Kacang-kacangan							
Kacang kedelai	57,7	61,2	64,6	68,1	71,6	75,0	78,5
Kacang tanah	4,4	4,7	4,9	5,2	5,4	5,7	6,0
Kacang hijau	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
Kacang lain	4,8	5,1	5,4	5,7	5,9	6,2	6,5
Subtotal kacang-kacangan	68,6	72,7	76,8	80,9	85,0	89,2	93,3
7. Gula							
Gula pasir	69,8	73,5	77,3	81,0	84,8	88,5	92,3
Gula merah	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0



KELOMPOK/JENIS PANGAN	RATA-RATA KONSUMSI ENERGI (KKAL/KAPITA/HARI)						
	TAHUN DASAR 2021	PROYEKSI					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Subtotal gula	71,3	75,1	78,9	82,8	86,6	90,4	94,3
8. Sayur dan Buah							
Sayur	49,6	51,2	52,8	54,4	56,0	57,6	59,2
Buah	49,4	50,9	52,5	54,1	55,7	57,3	58,8
Subtotal sayur dan buah	99,0	102,2	105,3	108,5	111,7	114,9	118,0
9. Lain-Lain							
Minuman	53,6	54,0	54,4	54,8	55,3	55,7	56,1
Bumbu	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0
Subtotal lain-lain	65,0	65,5	66,0	66,5	67,1	67,6	68,1

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2021



Tabel 2. 14 Proyeksi Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Indonesia Tahun 2021

KELOMPOK/JENIS PANGAN	RATA-RATA KONSUMSI PANGAN (GRAM/KAPITA/HARI)						
	TAHUN DASAR 2021	PROYEKSI					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Padi-padian							
Beras	222,8	221,5	220,3	219,1	217,8	216,6	215,4
Jagung	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9
Terigu	49,8	49,5	49,5	49,0	48,7	48,4	48,2
Subtotal padi-padian	276,6	275,1	273,5	272,0	270,5	269,0	267,4
2. Umbi-umbian							
Singkong	23,8	29,0	34,2	39,4	44,6	49,8	55,0
Ubi jalar	7,3	8,9	10,5	12,1	13,7	15,3	16,9
Kentang	5,9	7,2	8,5	9,7	11,0	12,3	13,6
Sagu	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
Umbi lainnya	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6
Subtotal umbi-umbian	37,4	45,6	53,8	62,0	70,2	78,4	86,6
3. Pangan hewani							
Daging ruminansia	14,7	14,6	14,4	14,2	14,0	13,9	13,7
Daging unggas	23,4	23,1	22,9	22,6	22,3	22,1	21,8
Telur	22,6	22,3	22,1	21,8	21,5	21,3	21,0



KELOMPOK/JENIS PANGAN	RATA-RATA KONSUMSI PANGAN (GRAM/KAPITA/HARI)						
	TAHUN DASAR 2021	PROYEKSI					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Susu	9,2	9,1	9,0	8,9	8,8	8,7	8,6
Ikan	76,1	75,2	74,3	73,5	72,6	71,7	70,8
Subtotal pangan hewani	146,1	144,4	142,7	141,0	139,3	137,6	135,9
4. Minyak dan Lemak							
Minyak kelapa	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7
Minyak lainnya	28,4	27,6	26,7	25,9	25,0	24,2	23,3
Margarin	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
Subtotal minyak dan lemak	30,8	29,9	29,0	28,0	27,1	26,2	25,3
5. Buah/Biji Berminyak							
Kelapa	1,3	1,9	2,4	3,0	3,6	4,2	4,7
Kemiri	0,9	1,3	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2
Subtotal buah/biji berminyak	2,2	3,1	4,1	5,0	6,0	6,9	7,9
6. Kacang-Kacangan							
Kacang kedelai	25,9	27,4	29,0	30,5	32,1	33,6	35,2
Kacang tanah	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3
Kacang hijau	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3
Kacang lain	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
Subtotal kacang-kacangan	29,4	31,1	32,9	34,7	36,4	38,2	39,9
7. Gula							



KELOMPOK/JENIS PANGAN	RATA-RATA KONSUMSI PANGAN (GRAM/KAPITA/HARI)						
	TAHUN DASAR 2021	PROYEKSI					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gula pasir	18,9	19,9	20,9	21,9	22,9	23,9	24,9
Gula merah	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Subtotal gula	19,3	20,3	21,3	22,4	23,4	24,4	25,5
8. Sayur dan Buah							
Sayur	133,5	137,8	142,1	146,4	150,6	154,9	159,2
Buah	97,4	100,5	103,6	106,8	109,9	113,0	116,1
Subtotal sayur dan buah	230,9	238,3	245,7	253,1	260,5	267,9	275,3
9. Lain-Lain							
Minuman	117,1	112,6	112,6	112,6	112,6	112,6	118,9
Bumbu	11,4	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,6
Subtotal lain-lain	128,5	123,6	123,6	123,6	123,6	123,6	130,5

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2021



b. Kondisi Kemiskinan

Menurut BPS (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak di anggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing (Haughton dan Shahidur, 2012).

Kemiskinan diukur menggunakan Garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kkalori/perkapita/per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan dihitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Ukuran kemiskinan yang lain selain angka kemiskinan adalah:

- a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1) adalah ukuran pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk terhadap garis Kemiskinan.
- b. Indeks Keparahan Kemiskinan (p2) adalah ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi pula pengeluaran penduduk miskin.

Fenomena kemiskinan Kabupaten Gresik merupakan permasalahan pembangunan yang massif meninjau posisi Kabupaten Gresik sebagai hinterland kawasan Surabaya Metropolitan Areal dengan perkembangan perekonomian dan teknologi informasi yang pesat serta bertolak belakang dengan capaian positif di sektor lainnya seperti kinerja pertumbuhan perekonomian yang selalu di atas Jawa Timur dan Nasional, gini ratio dengan ketimpangan rendah, kualitas pembangunan manusia di atas rerata nasional, bahkan Kabupaten Gresik merupakan tujuan investasi dengan proporsi realisasi terbesar di Jawa timur baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman



Dalam Negeri (PMA). Kemiskinan di Kabupaten Gresik merupakan kantong kemiskinan dalam pembangunan Kota metropolitan yang digerakkan dengan industri manufaktur.

Perkembangan pembangunan di berbagai dimensi tersebut ternyata tidak diiringi dengan pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang selama ini masih di atas rerata nasional dan Jawa Timur. Sejak diukur pada tahun 2003, kemiskinan Kabupaten Gresik terus mengalami penurunan. Puncak kenaikan kemiskinan di Kabupaten Gresik terjadi pada tahun 2006 dengan tingkat kemiskinan mencapai 25,19% atau seperempat penduduk Gresik hidup di bawah garis kemiskinan. Sejak Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 atau selama 5 (lima) tahun, kemiskinan Kabupaten Gresik mengalami penurunan yang masif sebesar 8,77% dari 25,19% menuju 16,42%. Laju penurunan kemiskinan Gresik mencapai 2,19% per tahun. Pada periode pemerintahan 2010 s.d. 2015, penurunan kemiskinan Kabupaten Gresik terus menunjukkan penurunan secara konsiten namun dengan nilai yang minor cenderung stagnan. Selama 5 (lima) tahun penurunan kemiskinan Kabupaten Gresik sejak Tahun 2010 s.d. 2014 hanya mengentaskan 3,01% atau 0,6% per tahun bahkan tahun 2015 mengalami peningkatan untuk pertama kalinya sebesar 0,22% atau terdapat 3.900 jiwa penduduk miskin baru pada tahun tersebut.



Gambar 2. 22 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2003-2022

Kinerja pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir, 5 (lima) kali lebih rendah dibandingkan kinerja pengentasan kemiskinan dalam 1 (satu) dekade terakhir. Laju



pengentasan cenderung berjalan lambat pada tahun 2018 hingga 2022 dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.380 jiwa. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 merupakan yang terendah sejak mulainya perhitungan pada tahun 2003, yakni sebanyak 149.640 jiwa.

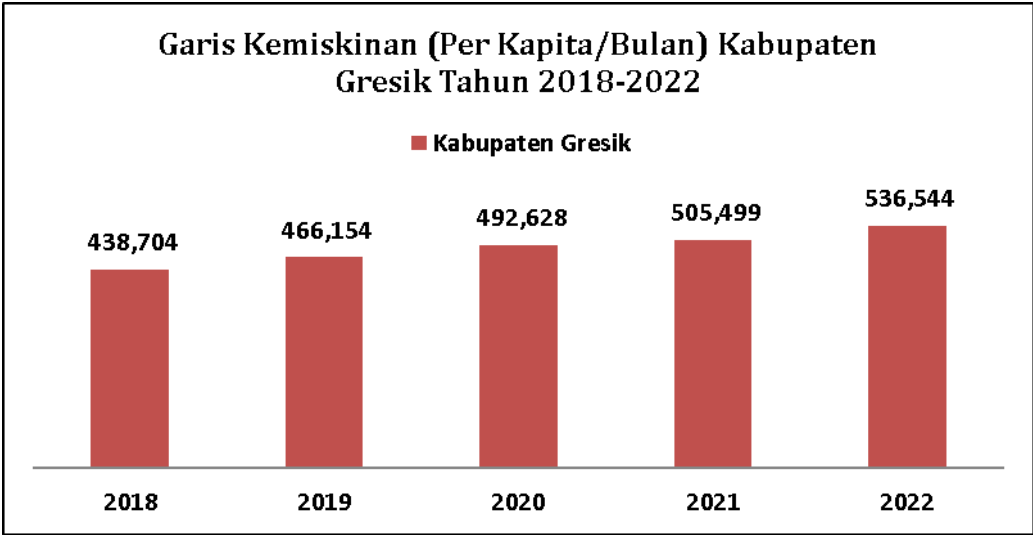
Fluktuasi tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik secara mutlak dipengaruhi besarnya pengeluaran di bawah Garis Kemiskinan sebagai kebutuhan minimal yang layak atau batas minimal pengeluaran “konsumsi” untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan yang bersifat mendasar (pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan). Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.

Kebutuhan minimal yang layak tersebut kemudian dicerminkan kedalam Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimal pengeluaran “konsumsi” untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan yang bersifat mendasar (pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan). Sedangkan arti kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan makanan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan energi minimal sebanyak 2.100 kkal/kapita/hari. Garis Kemiskinan non pangan yaitu nilai rata-rata pengeluaran dalam rupiah dari jenis komoditi dasar non pangan di perkotaan maupun di pedesaan. Dengan menggunakan Garis Kemiskinan ini, dapat diidentifikasi bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan Kabupaten Gresik selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya yang bermakna bahwa batas minimal untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan selalu meningkat tiap tahunnya. Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik dari Tahun 2018



hingga Tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Garis kemiskinan menerangkan bahwa besarnya konsumsi perkapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 maksimal sebesar Rp. 536.544. Selama periode 2018-2022, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp. 97.840 (22,30%) yaitu dari Rp. 438.704 perkapita pada Tahun 2018 menjadi Rp. 536.544 pada Tahun 2022.



Gambar 2. 23 Grafik Garis Kemiskinan (Per Kapita/Bulan) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022

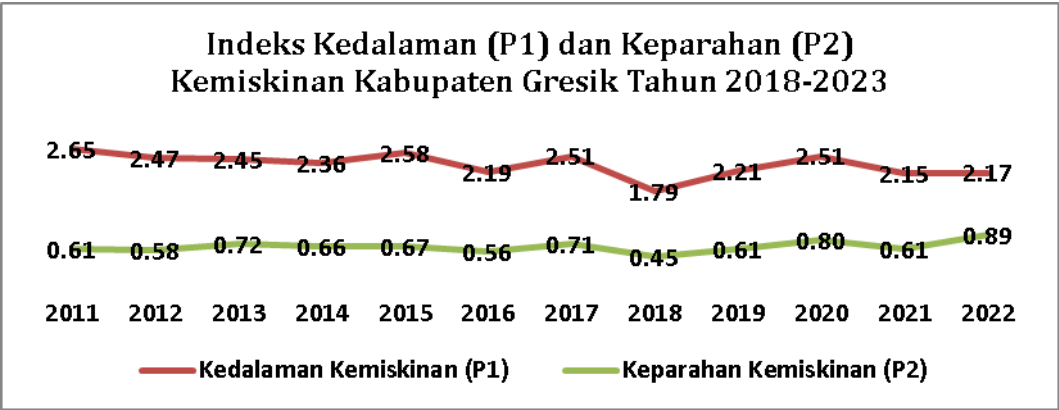
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan P1, nilai agregat dari poverty gap index menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indikator yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai distributionally sensitive index, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kegunaan P2, memberikan informasi yang saling melengkapi pada



insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Sepanjang perkembangannya dari tahun 2011 hingga tahun 2022, kedalaman kemiskinan Kabupaten Gresik terus mengalami fluktuasi dengan nilai tertinggi pada tahun 2011 sebesar 2,65 dan terendah pada tahun 2018 sebesar 1,79. Kedalaman kemiskinan gagal ditekan hingga mencapai titik terendahnya dan justru mengalami peningkatan pada Tahun 2020. Indeks kedalaman kemiskinan Gresik mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 mencapai 0,2 poin dari tahun sebelumnya. Kondisi ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.



Gambar 2. 24 Grafik Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2018-2023

Perkembangan keparahan kemiskinan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan rata-rata nilai indeks yang rendah. Sejak titik tertinggi pada Tahun 2011 sebesar 0,61, kedalaman kemiskinan kembali meningkat pada tahun 2022 yakni mencapai 0,89 setelah selama 10 tahun terakhir selalu berada di rentang 0,4-0,65. Keparahan kemiskinan Gresik mengalami fluktuasi dan gagal menekan justru kembali meningkat sejak penurunan tahun 2018 dan menunjukkan tingginya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



c. Kondisi Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil analisa, desa-desa dikelompokkan kedalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 terdapat di wilayah Kecamatan Dukun (2 desa). Desa rentan kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Wringinanom (1 desa), Kecamatan Cerme (1 desa), Kecamatan Duduk Sampeyan (2 desa), Kecamatan Bungah (2 desa), Kecamatan Dukun (3 desa), Kecamatan Panceng (1 desa), Kecamatan Sangkapura (4 desa), dan Kecamatan Tambak (1 desa). Desa rentan kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Wringinanom (4 desa), Kecamatan Driyorejo (2 desa), Kecamatan Kedamean (3 desa), Kecamatan Menganti (1 desa), Kecamatan Benjeng (2 desa), Kecamatan Duduk Sampeyan (5 desa), Kecamatan Kebomas (1 desa), Kecamatan Gresik (1 desa), Kecamatan Manyar (9 desa), Kecamatan Bungah (2 desa), Kecamatan Sidayu (5 desa), Kecamatan Dukun (10 desa), Kecamatan Panceng (6 desa), Kecamatan Ujungpangkah (5 desa), Kecamatan Sangkapura (8 desa), dan Kecamatan Tambak (5 desa).



Tabel 2. 15 Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan Analisis FSVA Tahun 2021

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	WRINGINANOM	KEDUNGANYAR	3	3	5	4	4	1	70,95	189	4
2	WRINGINANOM	SUMBERAME	3	3	5	4	3	5	72,91	154	4
3	WRINGINANOM	WRINGINANOM	3	1	6	4	4	4	68,74	242	4
4	WRINGINANOM	LEBANISUKO	3	2	5	4	4	1	68,36	257	4
5	WRINGINANOM	LEBANIWARAS	3	2	6	4	4	2	68,22	262	4
6	WRINGINANOM	SUMENGKO	2	1	4	4	4	3	66,98	283	3
7	WRINGINANOM	PASINAN LEMAHPUTI	3	1	4	4	2	2	66,08	298	3
8	WRINGINANOM	WATESTANJUNG	3	2	3	4	2	5	69,70	215	4
9	WRINGINANOM	PEDAGANGAN	3	1	4	4	4	1	66,08	297	3
10	WRINGINANOM	SEMBUNG	3	2	3	4	4	1	69,46	226	4
11	WRINGINANOM	SUMBERWARU	3	1	5	4	3	3	72,75	157	4
12	WRINGINANOM	KEPUHLAGEN	3	2	3	4	3	3	71,80	172	4
13	WRINGINANOM	SUMBERGEDE	3	2	3	4	2	2	76,93	57	4
14	WRINGINANOM	MONDOLUKU	3	3	1	4	2	1	77,26	52	4
15	WRINGINANOM	KESAMBENKULON	3	1	2	3	3	2	47,85	353	2
16	WRINGINANOM	SOKO	3	2	2	4	4	1	63,72	310	3

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
17	DRIYOREJO	KRIKILAN	2	1	6	4	4	3	68,34	258	4
18	DRIYOREJO	DRIYOREJO	2	1	6	4	4	6	67,85	270	3
19	DRIYOREJO	CANGKIR	2	2	6	4	3	5	70,10	206	4
20	DRIYOREJO	BAMBE	2	1	6	4	4	5	67,93	269	3
21	DRIYOREJO	MULUNG	3	1	6	4	3	4	68,69	245	4
22	DRIYOREJO	TENARU	3	1	4	4	3	5	69,54	221	4
23	DRIYOREJO	PETIKEN	2	1	6	4	4	6	68,24	260	4
24	DRIYOREJO	KESAMBENWETAN	3	5	4	4	4	3	77,05	54	4
25	DRIYOREJO	SUMPUT	3	1	6	4	3	4	68,46	251	4
26	DRIYOREJO	TANJUNGAN	3	2	5	4	4	6	71,11	184	4
27	DRIYOREJO	BANJARAN	3	2	4	4	4	6	69,85	210	4
28	DRIYOREJO	KARANGANDONG	3	3	5	4	4	3	74,64	99	4
29	DRIYOREJO	MOJOSARIREJO	2	3	6	4	4	6	71,79	173	4
30	DRIYOREJO	WEDOROANOM	3	4	3	4	4	1	76,94	56	4
31	DRIYOREJO	RANDEGANSARI	3	1	5	4	4	4	71,79	174	4
32	DRIYOREJO	GADUNG	3	1	6	4	4	4	68,37	256	4

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
33	KEDAMEAN	MOJOWUKU	3	3	3	4	4	2	71,72	177	4
34	KEDAMEAN	SIDORAHARJO	3	2	4	4	4	1	66,63	288	3
35	KEDAMEAN	SLEMPIT	3	3	4	4	4	1	65,52	302	3
36	KEDAMEAN	BELAHANREJO	3	5	2	4	4	3	80,49	14	5
37	KEDAMEAN	MENUNGGAL	3	3	5	4	4	1	70,31	201	4
38	KEDAMEAN	BANYUURIP	3	3	4	4	4	3	69,77	212	4
39	KEDAMEAN	NGEPUNG	3	5	3	4	4	2	82,93	4	5
40	KEDAMEAN	KEDAMEAN	3	4	5	4	3	3	76,85	58	4
41	KEDAMEAN	TANJUNG	3	5	4	4	4	1	80,12	17	5
42	KEDAMEAN	KATIMOHO	3	6	4	4	3	3	85,62	1	6
43	KEDAMEAN	TURIREJO	3	2	3	4	3	3	72,51	160	4
44	KEDAMEAN	TULUNG	3	4	3	4	3	3	80,02	18	5
45	KEDAMEAN	GLINDAH	3	4	2	4	2	1	71,22	181	4
46	KEDAMEAN	LAMPAH	3	2	4	4	2	1	67,97	267	3
47	KEDAMEAN	CERMENLEREK	3	4	2	4	2	3	74,89	96	4



No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
48	MENGANTI	PRANTI	3	4	3	4	1	4	75,53	81	4
49	MENGANTI	BRINGKANG	3	6	6	4	4	5	81,30	10	5
50	MENGANTI	MOJOTENGAH	3	6	5	4	4	5	79,17	28	5
51	MENGANTI	MENGANTI	3	5	5	4	4	3	76,99	55	4
52	MENGANTI	HULAAN	3	6	6	4	4	5	79,55	25	5
53	MENGANTI	SIDOWUNGU	3	4	5	4	4	5	74,21	112	4
54	MENGANTI	SETRO	3	2	4	4	4	4	69,60	218	4
55	MENGANTI	LABAN	3	4	5	4	4	5	74,99	94	4
56	MENGANTI	PENGALANGAN	3	4	4	4	4	4	75,17	89	4
57	MENGANTI	RANDUPADANGAN	3	4	3	4	4	3	74,57	100	4
58	MENGANTI	DRANCANG	3	3	4	4	4	4	72,97	151	4
59	MENGANTI	PELEMWATU	2	5	4	4	4	3	74,96	95	4
60	MENGANTI	SIDJANGKUNG	2	4	5	4	4	6	73,35	140	4
61	MENGANTI	DOMAS	3	6	4	4	3	4	79,31	27	5
62	MENGANTI	GADINGWATU	3	4	6	4	4	4	74,28	109	4
63	MENGANTI	BETON	3	1	3	4	2	1	67,43	274	3
64	MENGANTI	PUTAT LOR	3	6	4	4	2	3	77,60	46	5
65	MENGANTI	BOTENG	2	5	5	4	2	5	75,02	93	4
66	MENGANTI	BOBOH	3	5	5	4	4	1	75,43	85	4
67	MENGANTI	GEMPOLKURUNG	3	5	5	4	4	4	76,15	68	4
68	MENGANTI	KEPATIHAN	2	5	6	4	4	6	76,69	62	4
69	MENGANTI	HENDROSARI	3	6	6	4	4	4	83,24	2	6

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
70	CERME	DADAPKUNING	3	6	3	4	1	5	75,92	71	4
71	CERME	NGEMBUNG	3	4	4	4	3	4	77,76	42	5
72	CERME	SUKOANYAR	3	4	3	4	1	3	72,02	168	4
73	CERME	MOROWUDI	3	5	3	4	4	4	75,26	87	4
74	CERME	GURANGANYAR	3	4	5	4	3	5	76,83	59	4
75	CERME	DAMPAAN	3	4	3	4	1	5	73,06	149	4
76	CERME	DOORO	3	4	1	4	1	4	53,36	346	2
77	CERME	LENGKONG	3	5	2	4	2	6	73,16	146	4
78	CERME	KANDANGAN	3	2	2	4	3	2	73,25	141	4
79	CERME	DUNGUS	3	4	1	4	1	4	73,50	134	4
80	CERME	NGABETAN	3	3	6	4	4	6	74,07	115	4
81	CERME	BETITING	3	2	6	4	4	4	70,96	187	4
82	CERME	IKERIKERGEGER	3	5	4	4	4	4	78,47	36	5
83	CERME	CERME KIDUL	3	3	5	4	4	6	73,82	119	4
84	CERME	PANDU	3	4	4	4	4	6	80,46	16	5
85	CERME	JONO	3	2	4	4	2	3	71,90	171	4
86	CERME	TAMBAKBERAS	3	5	6	4	4	4	77,53	48	5
87	CERME	CERME LOR	3	6	3	4	2	6	78,80	31	5
88	CERME	CAGAKAGUNG	2	2	5	4	4	6	68,37	255	4
89	CERME	SEMAMPIR	3	1	5	4	4	4	73,04	150	4
90	CERME	KAMBINGAN	3	2	3	4	1	3	69,11	237	4
91	CERME	WEDANI	3	1	3	4	4	4	69,45	227	4
92	CERME	GEDANGKULUT	3	1	4	4	2	3	69,61	216	4
93	CERME	PADEG	3	2	4	4	1	3	76,18	67	4
94	CERME	BANJARSARI	3	4	6	4	4	5	75,57	80	4

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
95	BENJENG	LUNDO	3	4	2	4	3	3	75,15	90	4
96	BENJENG	BALONGTUNJUNG	3	4	1	4	2	4	81,09	11	5
97	BENJENG	BALONGMOJO	3	6	2	4	2	3	79,94	19	5
98	BENJENG	BULANGKULON	3	3	4	4	2	3	75,49	82	4
99	BENJENG	SEDAPURKLAGEN	3	3	4	4	4	3	73,74	122	4
100	BENJENG	DELIKSUMBER	3	2	2	4	3	4	69,53	223	4
101	BENJENG	KEDUNGRUKEM	3	6	3	4	2	3	82,21	5	5
102	BENJENG	MUNGUGIANTI	3	4	4	4	3	3	76,49	64	4
103	BENJENG	BENGKELOLOR	3	4	1	4	3	2	71,96	169	4
104	BENJENG	GLURANPLOSO	3	4	2	4	2	4	77,33	51	4
105	BENJENG	BULUREJO	3	4	5	4	4	4	74,85	97	4
106	BENJENG	DERMO	3	4	4	4	2	4	72,67	158	4
107	BENJENG	KEDUNGSEKAR	3	3	4	4	2	6	73,10	148	4
108	BENJENG	KLAMPOK	3	3	2	4	1	5	69,52	224	4
109	BENJENG	SIRNOBOYO	3	2	2	4	2	4	68,60	248	4
110	BENJENG	KALIPADANG	3	3	2	4	2	1	67,53	273	3
111	BENJENG	KARANGANKIDUL	3	3	3	4	1	1	68,39	253	4
112	BENJENG	MUNGUGGEBANG	3	4	1	4	1	1	59,73	324	3
113	BENJENG	BANTER	3	3	3	4	1	2	73,46	135	4
114	BENJENG	METATU	3	3	4	4	1	2	70,89	191	4
115	BENJENG	JOGODALU	3	3	2	4	1	3	70,98	186	4
116	BENJENG	PUNDUTTRATE	3	1	3	4	1	4	69,12	236	4
117	BENJENG	JATIREMBE	3	1	3	4	4	3	74,04	116	4

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
118	BALONGPANGGANG	JOMBANGDELIK	3	5	2	4	3	2	73,67	126	4
119	BALONGPANGGANG	BRANGKAL	3	4	2	4	4	3	73,17	145	4
120	BALONGPANGGANG	NGAMPEL	3	5	3	4	4	2	75,85	74	4
121	BALONGPANGGANG	TANAHANDEAN	3	3	2	4	4	2	73,42	138	4
122	BALONGPANGGANG	DAPET	3	4	3	4	4	3	74,50	102	4
123	BALONGPANGGANG	WONOREJO	3	5	3	4	4	2	76,37	65	4
124	BALONGPANGGANG	SEKARPUTIH	3	4	4	4	3	3	79,55	26	5
125	BALONGPANGGANG	WOTANSARI	3	4	4	4	3	4	77,18	53	4
126	BALONGPANGGANG	BANJARAGUNG	3	4	4	4	4	3	75,13	91	4
127	BALONGPANGGANG	KARANGSEMANDING	3	3	4	4	4	4	76,61	63	4
128	BALONGPANGGANG	WAHAS	3	4	3	4	4	2	79,91	20	5
129	BALONGPANGGANG	BANDUNGSEKARAN	3	2	4	4	3	3	75,48	84	4
130	BALONGPANGGANG	MOJOGEDE	3	4	2	4	3	4	77,95	39	5
131	BALONGPANGGANG	KEDUNGPRING	3	6	5	4	2	5	82,98	3	5
132	BALONGPANGGANG	PUCUNG	3	5	4	4	2	6	78,87	29	5
133	BALONGPANGGANG	BALONGPANGGANG	3	6	3	4	1	5	77,39	50	4
134	BALONGPANGGANG	KEDUNGSUMER	3	2	3	4	4	3	73,12	147	4
135	BALONGPANGGANG	BABATAN	3	5	2	4	4	3	81,66	8	5
136	BALONGPANGGANG	PACUH	3	4	4	4	2	3	78,13	38	5
137	BALONGPANGGANG	TENGGOR	3	2	2	4	3	5	75,88	72	4
138	BALONGPANGGANG	DOHOAGUNG	3	4	3	4	4	4	81,47	9	5
139	BALONGPANGGANG	PINGGIR	3	4	2	4	3	3	82,20	6	5
140	BALONGPANGGANG	KLOTOK	3	3	4	4	4	3	81,70	7	5
141	BALONGPANGGANG	GANGGANG	3	4	2	4	2	3	78,46	37	5
142	BALONGPANGGANG	NGASIN	3	1	3	4	2	3	80,54	13	5

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
143	DUDUKSAMPEYAN	KANDANGAN	3	5	1	4	4	5	77,68	43	5
144	DUDUKSAMPEYAN	TUMAPEL	3	4	3	4	2	2	72,13	166	4
145	DUDUKSAMPEYAN	PANJUNAN	3	3	1	4	1	3	70,22	203	4
146	DUDUKSAMPEYAN	TAMBAKREJO	3	3	3	4	1	2	74,08	114	4
147	DUDUKSAMPEYAN	SETRHADI	3	3	5	4	3	3	78,74	32	5
148	DUDUKSAMPEYAN	SUMENGKO	3	2	6	4	4	5	74,44	104	4
149	DUDUKSAMPEYAN	GREDEK	3	1	3	4	3	2	73,65	128	4
150	DUDUKSAMPEYAN	SUMARI	3	1	4	4	4	3	75,63	79	4
151	DUDUKSAMPEYAN	TIREM	3	1	4	4	4	3	80,66	12	5
152	DUDUKSAMPEYAN	AMBENG AMBENG WA	3	3	6	4	3	2	74,78	98	4
153	DUDUKSAMPEYAN	TEBALOAN	3	2	5	4	3	2	71,47	179	4
154	DUDUKSAMPEYAN	SAMIRPLAPAN	2	2	5	4	3	4	69,38	229	4
155	DUDUKSAMPEYAN	DUDUKSAMPEYAN	3	4	4	4	2	5	75,84	75	4
156	DUDUKSAMPEYAN	PETISBENEM	2	6	3	4	3	3	74,14	113	4
157	DUDUKSAMPEYAN	PALEBON	3	3	3	4	1	2	67,24	278	3
158	DUDUKSAMPEYAN	GLANGGANG	3	3	6	4	3	2	80,48	15	5
159	DUDUKSAMPEYAN	PANDANAN	3	5	3	4	1	3	76,14	69	4
160	DUDUKSAMPEYAN	BENDUNGAN	2	2	2	4	1	6	53,05	347	2
161	DUDUKSAMPEYAN	WADAK LOR	2	3	2	4	2	3	66,19	294	3
162	DUDUKSAMPEYAN	WADAK KIDUL	2	2	4	4	1	3	63,50	312	3
163	DUDUKSAMPEYAN	KAWISTOWINDU	2	2	2	4	3	5	66,28	292	3
164	DUDUKSAMPEYAN	KEMUDI	2	5	3	4	4	1	57,00	330	3
165	DUDUKSAMPEYAN	KRAMAT	2	3	2	4	1	2	54,12	342	2

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
166	KEBOMAS	KEDANYANG	2	5	6	4	4	6	75,48	83	4
167	KEBOMAS	PRAMBANGAN	3	6	6	4	3	3	78,61	33	5
168	KEBOMAS	GULOMANTUNG	1	3	5	4	3	4	70,62	197	4
169	KEBOMAS	SUKOREJO	1	4	5	4	4	6	72,15	165	4
170	KEBOMAS	SEGOROMADU	1	6	6	4	4	4	79,55	24	5
171	KEBOMAS	TENGULUNAN	2	5	5	4	3	6	73,67	125	4
172	KEBOMAS	KARANGKERING	2	5	6	4	4	3	74,42	105	4
173	KEBOMAS	INDRO	1	5	6	4	4	4	74,46	103	4
174	KEBOMAS	SINGOSARI	1	4	6	4	3	6	73,77	121	4
175	KEBOMAS	SIDOMORO	1	1	6	4	4	5	66,31	291	3
176	KEBOMAS	GENDING	1	5	6	4	4	6	74,37	107	4
177	KEBOMAS	NGARGOSARI	1	3	6	4	4	5	70,95	188	4
178	KEBOMAS	KAWISANYAR	1	3	5	4	4	6	70,91	190	4
179	KEBOMAS	SIDOMUKTI	1	4	5	4	3	6	71,91	170	4
180	KEBOMAS	GIRI	1	6	5	4	2	6	78,55	35	5
181	KEBOMAS	KLANGONAN	1	2	6	4	3	6	69,53	222	4
182	KEBOMAS	SEKARKURUNG	1	4	6	4	4	6	72,38	161	4
183	KEBOMAS	KEMBANGAN	2	2	6	4	4	6	69,47	225	4
184	KEBOMAS	DAHANREJO	3	2	6	4	3	6	71,52	178	4
185	KEBOMAS	RANDUAGUNG	1	4	6	4	4	6	73,70	124	4
186	KEBOMAS	KEBOMAS	1	4	5	4	3	6	72,87	155	4

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
187	GRESIK	NGIPIK	1	3	6	4	4	6	71,20	182	4
188	GRESIK	TLOGOPATUT	1	6	6	4	4	6	79,86	21	5
189	GRESIK	SIDOKUMPUL	1	3	5	4	3	6	70,76	194	4
190	GRESIK	KRAMATINGGIL	1	1	6	4	4	6	68,23	261	4
191	GRESIK	SIDORUKUN	1	2	6	4	3	4	69,31	230	4
192	GRESIK	PULOPANCIKAN	1	3	4	4	4	6	70,83	192	4
193	GRESIK	GAPUROSUKOLILO	1	3	5	4	4	5	69,56	220	4
194	GRESIK	TLOGOBENDUNG	1	5	6	4	4	6	76,13	70	4
195	GRESIK	PEKAUMAN	2	4	5	4	4	6	72,95	153	4
196	GRESIK	SUKORAME	1	2	6	4	4	6	69,24	233	4
197	GRESIK	KARANGTURI	1	4	4	4	4	6	72,86	156	4
198	GRESIK	TRATE	1	1	4	4	4	6	66,81	285	3
199	GRESIK	KARANGPOH	1	3	4	4	4	6	70,17	204	4
200	GRESIK	BEDILAN	1	6	6	4	4	6	76,76	61	4
201	GRESIK	KEBUNGSON	1	3	5	4	2	6	69,07	238	4
202	GRESIK	PEKELINGAN	1	2	6	4	3	6	69,75	214	4
203	GRESIK	KEMUTERAN	2	3	5	4	4	6	70,27	202	4
204	GRESIK	SUKODONO	2	4	4	4	4	6	72,96	152	4
205	GRESIK	KROMAN	1	4	4	4	4	6	71,75	176	4
206	GRESIK	LUMPUR	1	3	4	4	4	6	69,15	235	4
207	GRESIK	TLOGOPOJOK	1	2	4	4	4	6	68,71	243	4

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
208	MANYAR	TEBALO	3	3	5	4	3	4	75,03	92	4
209	MANYAR	SUCI	2	2	6	4	4	3	69,05	239	4
210	MANYAR	YOSOWILANGUN	1	4	6	4	4	6	73,78	120	4
211	MANYAR	ROOMO	1	4	6	4	4	2	70,68	196	4
212	MANYAR	SUKOMULYO	1	5	6	4	4	3	73,46	137	4
213	MANYAR	PONGANGAN	1	4	6	4	4	5	73,23	143	4
214	MANYAR	PEGANDEN	2	1	5	4	4	3	67,10	282	3
215	MANYAR	BANJARSARI	2	2	4	4	4	2	66,08	295	3
216	MANYAR	LERAN	2	3	3	4	3	1	62,88	313	3
217	MANYAR	MANYAREJO	1	4	6	4	3	2	72,65	159	4
218	MANYAR	MANYARSIDOMUKTI	1	6	6	4	4	1	78,83	30	5
219	MANYAR	MANYARSIDORUKUN	1	1	5	4	4	6	68,27	259	4
220	MANYAR	BANYUWANGI	1	2	3	4	3	1	61,31	321	3
221	MANYAR	KARANGREJO	1	6	5	4	4	4	77,64	44	5
222	MANYAR	SEMBAYAT	1	2	5	4	4	4	68,79	241	4
223	MANYAR	BETOYOGUCI	2	4	4	4	2	3	70,06	207	4
224	MANYAR	BETOYOKAUMAN	2	3	6	4	3	2	68,68	246	4
225	MANYAR	SUMBEREJO	2	1	3	4	4	4	65,42	303	3
226	MANYAR	TANGGULREJO	2	4	3	4	1	3	67,11	281	3
227	MANYAR	GUMENO	1	1	4	4	2	1	58,17	328	3
228	MANYAR	NGAMPEL	2	3	4	4	4	5	69,26	232	4
229	MANYAR	PEJANGGANAN	2	2	4	4	1	3	64,42	306	3
230	MANYAR	MOROBAKUNG	3	3	3	4	1	3	62,60	314	3

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
231	BUNGAH	SIDOMUKTI	3	6	2	4	1	4	68,93	240	4
232	BUNGAH	MOJOPUROGEDE	3	5	3	4	3	5	77,61	45	5
233	BUNGAH	MOJOPURO WETAN	3	6	4	4	1	4	77,76	41	5
234	BUNGAH	MELIRANG	3	3	3	4	1	4	70,55	198	4
235	BUNGAH	SIDOREJO	2	6	2	4	4	6	76,27	66	4
236	BUNGAH	MASANGAN	2	3	4	4	4	5	70,82	193	4
237	BUNGAH	SUKOWATI	2	4	2	4	4	6	69,77	211	4
238	BUNGAH	BUNGAH	2	5	5	4	3	6	75,79	76	4
239	BUNGAH	SUKOREJO	2	4	4	4	4	2	72,37	162	4
240	BUNGAH	BEDANTEN	2	5	3	4	4	2	71,12	183	4
241	BUNGAH	WATUAGUNG	1	4	1	4	1	1	54,47	340	2
242	BUNGAH	KRAMAT	1	3	1	4	1	1	53,79	344	2
243	BUNGAH	TAJUNG WIDORO	1	6	1	4	4	1	68,70	244	4
244	BUNGAH	SUNGONLEGOWO	2	5	4	4	4	2	73,63	129	4
245	BUNGAH	INDRODELIK	3	3	4	4	3	3	71,40	180	4
246	BUNGAH	KISIK	3	2	4	4	3	2	72,11	167	4
247	BUNGAH	ABAR-ABIR	2	5	5	4	3	6	74,25	110	4
248	BUNGAH	SIDOKUMPUL	3	2	4	4	3	6	73,18	144	4
249	BUNGAH	RACIWETAN	3	1	1	4	1	3	57,16	329	3
250	BUNGAH	PEGUNDAN	2	4	3	4	1	6	61,43	320	3
251	BUNGAH	KEMANGI	3	2	4	4	2	4	73,93	118	4
252	BUNGAH	GUMENG	3	2	3	4	3	3	70,42	200	4

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
253	SIDAYU	SUKOREJO	3	3	4	4	4	3	73,55	132	4
254	SIDAYU	LASEM	3	5	3	4	4	3	78,55	34	5
255	SIDAYU	KERTOSONO	3	4	3	4	3	3	73,66	127	4
256	SIDAYU	RACIKULON	3	4	3	4	4	1	67,82	272	3
257	SIDAYU	RACITENGGAH	3	2	4	4	2	3	69,60	219	4
258	SIDAYU	NGAWEN	2	5	4	4	3	4	74,22	111	4
259	SIDAYU	RANDUBOTO	1	5	1	4	1	3	64,09	308	3
260	SIDAYU	MOJOASEM	2	6	4	4	4	2	75,78	77	4
261	SIDAYU	ASEMPAPAK	2	6	4	4	2	6	76,83	60	4
262	SIDAYU	MRIYUNAN	1	6	4	4	2	5	79,85	22	5
263	SIDAYU	SIDOMULYO	2	5	6	4	2	6	74,56	101	4
264	SIDAYU	PURWODADI	2	6	2	4	1	6	75,38	86	4
265	SIDAYU	BUNDERAN	2	4	4	4	4	6	73,51	133	4
266	SIDAYU	KAUMAN	2	2	6	4	3	6	68,48	250	4
267	SIDAYU	PENGULU	1	5	6	4	2	6	75,87	73	4
268	SIDAYU	SEDAGARAN	2	3	3	4	4	4	67,97	268	3
269	SIDAYU	SROWO	2	5	3	4	2	1	66,28	293	3
270	SIDAYU	GOLOKAN	2	2	5	4	3	6	68,68	247	4
271	SIDAYU	SAMBIPONDOK	3	6	2	4	1	3	75,18	88	4
272	SIDAYU	WADENG	2	6	3	4	4	2	79,83	23	5
273	SIDAYU	GEDANGAN	2	3	4	4	3	3	68,10	265	3

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
274	DUKUN	SAWO	3	1	3	4	4	3	69,40	228	4
275	DUKUN	KARANGCANGKRING	3	1	4	4	2	2	66,91	284	3
276	DUKUN	GEDONGKEDOAN	2	2	1	4	1	4	42,20	355	1
277	DUKUN	BULANGAN	3	1	1	4	3	1	65,76	299	3
278	DUKUN	WONOKERTO	3	1	3	4	4	4	67,12	280	3
279	DUKUN	BANGERAN	3	1	1	4	1	1	59,65	325	3
280	DUKUN	TIREMENGGAH	3	1	1	4	1	1	53,36	345	2
281	DUKUN	LOWAYU	3	1	4	4	3	2	67,26	277	3
282	DUKUN	PETIYIN TUNGGAL	3	1	3	4	4	2	69,76	213	4
283	DUKUN	TEBUWUNG	3	1	2	4	2	2	68,22	263	4
284	DUKUN	DUKU KEMBAR	3	2	1	4	1	4	39,51	356	1
285	DUKUN	MADUMULYO	3	1	1	4	1	5	58,62	327	3
286	DUKUN	MENTARAS	3	1	4	4	4	4	74,00	117	4
287	DUKUN	MOJOPETUNG	3	1	3	4	4	2	77,57	47	5
288	DUKUN	BARON	3	1	1	4	1	3	59,14	326	3
289	DUKUN	JREBENG	3	2	2	4	4	5	69,61	217	4
290	DUKUN	IMA AN	3	2	2	4	4	3	72,26	163	4
291	DUKUN	SEKARGADUNG	3	1	1	4	1	4	48,45	351	2
292	DUKUN	BABAKBAWO	3	2	4	4	1	3	65,70	300	3
293	DUKUN	BABA SARI	3	2	3	4	3	3	68,38	254	4
294	DUKUN	SAMBOGUNUNG	3	1	3	4	4	2	70,11	205	4
295	DUKUN	KALIREJO	3	2	2	4	1	2	55,86	335	2
296	DUKUN	SEMBUNGAN KIDUL	2	3	5	4	2	4	70,70	195	4
297	DUKUN	SEMBUNG ANYAR	2	2	3	4	4	3	67,41	275	3
298	DUKUN	DUKUN ANYAR	2	2	6	4	4	6	71,00	185	4
299	DUKUN	PADANG BANDUNG	3	1	2	4	1	4	61,47	319	3

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
300	PANCENG	SUMURBER	3	1	3	4	2	4	64,50	305	3
301	PANCENG	SERAH	2	2	1	4	3	4	64,75	304	3
302	PANCENG	SUKODONO	3	3	1	4	4	1	65,56	301	3
303	PANCENG	PETUNG	3	3	2	4	3	3	73,41	139	4
304	PANCENG	WOTAN	3	2	3	4	3	2	66,61	289	3
305	PANCENG	DOUDO	2	4	1	4	4	4	69,20	234	4
306	PANCENG	SUROWITI	2	4	1	4	1	1	45,31	354	2
307	PANCENG	SIWALAN	3	4	1	4	4	2	67,84	271	3
308	PANCENG	KETANEN	3	4	3	4	1	2	72,19	164	4
309	PANCENG	PANTENAN	2	3	3	4	3	1	64,14	307	3
310	PANCENG	PRUPUH	3	5	2	4	1	4	75,70	78	4
311	PANCENG	DALEGAN	3	4	4	4	4	3	73,74	123	4
312	PANCENG	CAMPUREJO	2	4	3	4	2	4	69,86	209	4
313	PANCENG	BANYUTENGAH	2	3	4	4	3	4	69,95	208	4

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
314	UJUNGPAKKAH	SEKAPUK	1	4	2	4	4	5	70,45	199	4
315	UJUNGPAKKAH	BOLO	3	4	5	4	4	3	73,46	136	4
316	UJUNGPAKKAH	GLATIK	3	6	1	4	4	6	77,46	49	4
317	UJUNGPAKKAH	TANJANGAWAN	3	5	2	4	3	1	74,28	108	4
318	UJUNGPAKKAH	KETAPANG LOR	3	6	2	4	4	3	77,88	40	5
319	UJUNGPAKKAH	KARANGREJO	3	2	2	4	4	2	69,26	231	4
320	UJUNGPAKKAH	KEBONAGUNG	3	3	3	4	3	2	73,56	130	4
321	UJUNGPAKKAH	GOSARI	2	3	3	4	4	2	68,00	266	3
322	UJUNGPAKKAH	CANGAAN	3	5	1	4	4	4	74,41	106	4
323	UJUNGPAKKAH	NGEMBOH	2	2	2	4	4	4	66,68	287	3
324	UJUNGPAKKAH	BANYUURIP	2	3	3	4	3	2	67,30	276	3
325	UJUNGPAKKAH	PANGKAH KULON	2	4	2	4	3	2	66,08	296	3
326	UJUNGPAKKAH	PANGKAH WETAN	2	6	2	4	4	1	62,31	316	3

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
327	SANGKAPURA	KUMALASA	1	4	1	4	2	1	54,60	338	2
328	SANGKAPURA	LEBAK	1	5	1	4	2	1	61,18	322	3
329	SANGKAPURA	BULULANJANG	1	3	1	4	1	1	54,09	343	2
330	SANGKAPURA	SUNGAI TELUK	1	6	1	4	4	2	73,56	131	4
331	SANGKAPURA	KOTAKUSUMA	1	6	2	4	1	5	71,76	175	4
332	SANGKAPURA	SAWAHMULYA	1	5	2	4	4	6	73,24	142	4
333	SANGKAPURA	SUNGAIRUJING	1	6	1	4	1	1	62,25	317	3
334	SANGKAPURA	DAUN	1	3	2	4	2	1	62,41	315	3
335	SANGKAPURA	SIDOGEDUNGBATU	1	4	2	4	4	2	66,38	290	3
336	SANGKAPURA	KEBONTELUKDALAM	1	1	1	4	2	1	50,98	348	2
337	SANGKAPURA	BALIKTERUS	1	2	1	4	3	1	48,35	352	2
338	SANGKAPURA	GUNUNGTEGUH	1	4	2	4	4	1	60,03	323	3
339	SANGKAPURA	PATARSELAMAT	1	5	1	4	4	1	55,30	336	2
340	SANGKAPURA	PUDAKITTIMUR	2	4	1	4	1	2	50,70	349	2
341	SANGKAPURA	PUDAKITBARAT	2	5	1	4	4	2	63,62	311	3
342	SANGKAPURA	SUWARI	2	3	1	4	4	1	54,55	339	2
343	SANGKAPURA	DEKATAGUNG	1	3	1	4	4	1	54,15	341	2

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
344	TAMBAK	TELUK JATIDAWANG	1	2	1	4	4	1	56,62	331	3
345	TAMBAK	GELAM	2	3	1	4	4	2	56,60	332	3
346	TAMBAK	SUKAONENG	1	2	1	4	2	1	49,95	350	2
347	TAMBAK	KELOMPANGGUBUG	2	3	1	4	4	1	56,16	333	3
348	TAMBAK	SUKALELA	2	4	1	4	4	4	68,43	252	4
349	TAMBAK	PEKALONGAN	2	3	1	4	4	4	63,82	309	3
350	TAMBAK	TAMBAK	1	3	2	4	4	6	68,14	264	4
351	TAMBAK	GREJEG	2	3	1	4	4	1	62,01	318	3
352	TAMBAK	TANJUNGORI	1	3	2	4	4	3	67,18	279	3
353	TAMBAK	PAROMAN	1	3	1	4	2	1	54,87	337	2
354	TAMBAK	DIPONGGO	2	5	1	4	4	2	68,59	249	4
355	TAMBAK	KEPUH TELUK	1	4	1	4	4	3	66,76	286	3
356	TAMBAK	KEPUH LEGUNDI	1	3	1	4	4	1	55,87	334	2

Desa rentan terhadap kerawanan pangan secara umum disebabkan oleh : (1) Tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah, (2) Ketersediaan dan adanya akses untuk penggunaan air bersih sehari-hari, (3) Luas lahan perhatian yang tersedia semakin berkurang, dan (4) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk pemenuhan pangan.

d. Kondisi Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan penunjang utama mobilitas penduduk dan salah satu faktor penting penunjang ekonomi, sehingga kemantapan infrastruktur jalan merupakan hal yang penting. Kriteria jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalan diukur dengan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat.

Kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 620/503/HK/437.12/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang ruas jalan menurut statusnya ialah jalan Kabupaten dimana terdapat 447 ruas jalan Kabupaten dengan total panjang jalan 512,16 km. Pada tahun 2020 terdapat peningkatan status pada 20 ruas jalan di Kabupaten Gresik, dari status Jalan Poros Desa menjadi Jalan Kabupaten sehingga total panjang jalan menjadi 578,27 km. Saat ini



bidang Bina Marga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sedang menyusun ulang SK Bupati Gresik terbaru untuk status jalan yang sudah dilakukan updating.

Tabel 2. 16 Kondisi Jalan Kabupaten Gresik Tahun 2021

Total Panjang Jalan		512,16 km
Kondisi Baik	248,517 km	55,55 %
Kondisi Sedang	93,508 km	18,26 %
Kondisi Rusak Ringan	125,34 km	24,47 %
Kondisi Rusak Berat	8,80 km	1,72 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gresik Tahun 2021

Panjang jalan sesuai SK Bupati Gresik yaitu 512,16 KM didominasi oleh jenis perkerasan aspal. Jalan Kabupaten sepanjang 248,517 km atau sekitar 55,55 % berada dalam kondisi baik dan 93,508 km atau 18,26 % dalam kondisi sedang, Dengan demikian persentase capaian kemantapan infrastruktur jalan sebesar 342,025 km atau 73,81 %, sedangkan jalan dalam keadaan rusak ringan yaitu sebesar 24,47 % dan rusak berat sebesar 1,72 %. Jika dibandingkan dengan provinsi dan Nasional, diketahui bahwa capaian Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap masih berada dibawahnya.

Pengembangan potensi utama di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah berbasis industri. Dalam rangka menunjang pengembangan industri tersebut, beberapa alternatif dan skenario program nasional diarahkan di Kabupaten Gresik diantaranya melalui Peningkatan Jalan Nasional Kolektor Primer Deandles, Peningkatan Jalan Raya Gresik, serta Pembangunan Jalan Tol Ngawi- Bojonegoro- Tuban- Lamongan- Manyar-dan Bunder. Hadirnya JIPE, mendorong sisi utara Jawa Timur berkembang secara signifikan dan terinterkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan investasi baru dimana ditopang oleh kemudahan akses transportasi dan infrastruktur yang layak dan memadai serta penguatan sistem logistik barang dan jasa.

Sehingga hal ini menjadi komitmen Kepala Daerah untuk terus meningkatkan capaian Persentase kemantapan infrastruktur jalan melalui berbagai program percepatan dan pengalokasian dana pada urusan kebinamargaan demi meningkatkan dan mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik.



e. **Kondisi Akses Layak Air Minum**

Urusan keciptakaryaannya didukung oleh penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kriteria akses air minum yang aman yakni minimal memenuhi kapasitas kebutuhan 60 liter/orang/hari dengan parameter fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berasa dan tidak berbau. Salah satu urusan keciptakaryaannya didukung oleh penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/minum yang aman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Indonesia Nomor: 100 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, Kriteria akses air minum yang aman yakni minimal memenuhi kapasitas kebutuhan 60 liter/orang/hari dengan parameter fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berasa dan tidak berbau. Nilai SPM penyediaan kebutuhan pokok air minum dihitung dengan membandingkan jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui spam (perpipaan) dan bukan perpipaan terhadap jumlah total proyeksi masyarakat pada akhir tahun pencapaian spm. Adapun target akses air minum di Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebesar 100 % dengan realisasi tahun 2020 sebesar 66,27 %.

Tabel 2. 17 Persentase Akses Layak Air Minum

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
Gresik	Presentase Akses Layak Air Minum	61,95 %	75,95 %	61,57 %	58,36 %	66,27 %
Jawa Timur	Presentase Capaian Layanan Air Minum	72,06 %	73,44 %	75,20 %	77,67 %	95,56 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gresik Tahun

2021



Persentase Capaian Akses Air Bersih/Minum di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Persentase akses air bersih/minum di tahun 2016 sebesar 61,95 % mengalami kenaikan sebesar 14 % di tahun 2017 menjadi 75,95%. Kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis sampai pada angka 58,36% di tahun 2019, dan beranjak naik di tahun 2020 menjadi 66,27 %. Capaian akses air bersih/minum di Kabupaten Gresik masih lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur dimana persentase 66,27% diperoleh dari 44,59 % adalah jaringan perpipaan dan 21,68 % non perpipaan. Hasil yang didapat untuk persentase ini masih dibawah dari target RPJMN yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 100 % layak dan 15 % aman.

Hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa kendala permasalahan yaitu permasalahan pada aspek teknis, Pada aspek teknis masalah yang timbul dikarenakan kapasitas jaringan distribusi yang ada masih terbatas dibanding kebutuhan masyarakat, sistem pengaliran pada daerah pelayanan masih ada yang tidak terlayani 24 jam, dan terdapat daerah pelayanan yang sudah tidak dapat dijangkau oleh pengaliran yang ada sehingga menyebabkan persentase cakupan pelayanan air minum yang naik turun di Kabupaten Gresik.

Penyediaan layanan air minum di Kabupaten Gresik dibagi menjadi 3 wilayah pelayanan, yang meliputi Gresik Utara, Gresik perkotaan dan Gresik Selatan, sumber air baku untuk Gresik utara berasal dari intake Bendung Gerak Sembayat (BGS) dengan kapasitas layanan 200 Liter/detik, Gresik perkotaan melalui spam regional umbulan dengan kapasitas terbesar yakni 1.000 liter/detik yang meliputi wilayah pelayanan Kecamatan Gresik, Kebomas sampai dengan Duduksampeyan dan Gresik Selatan melalui SPAM Legundi.

Strategi untuk mencapai target capaian 100% di Kabupaten Gresik yakni melalui skema 55% PDAM, 40% HIPPAM dan 5% BJP. Adapun rencana pengembangan HIPPAM dilakukan dengan 3 tahap (2015-2030) meliputi optimalisasi dan pendirian HIPPAM/KPSAM baru, sedangkan untuk BJP dilakukan dengan pembuatan bak-bak penampungan air baru, hidran umum, dan sumur bor pada lokasi rawan air.



f. Kondisi Pengolahan Air Limbah Domestik

Belum maksimalnya capaian kebutuhan pokok air minum berkaitan erat dengan persoalan sanitasi. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah domestik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Nilai SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai diukur dengan menghitung persentase jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik/MCK Komunal/sistem pengolahan Air Limbah – SPAL Terpusat) pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total penduduk.

Tabel 2. 18 SPM Akses Sanitasi yang Aman dan Layak

INDIKATOR	SPM	TARGET KAB. GRESIK	CAPAIAN TAHUN 2020
Persentase Capaian Akses Sanitasi yang aman dan layak	90 % akses layak, dan 15 % aman	80 %	65,72 %

Sumber : Review RAD-AMPL Kab Gresik, 2020

Tabel 2. 19 Persentase Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

INDIKATOR	TARGET KAB. GRESIK	CAPAIAN TAHUN 2020
Persentase Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	80 %	65,72 %

Sumber : RAD AMPL Kabupaten Gresik, 2020

Adapun target pencapaian persentase pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik tahun 2020 sebesar 80% dengan realisasi capaian di tahun 2020 sebesar 65,72 % dan masih dibawah target RPJMN yang ditetapkan yaitu 90% layak dan 15% Akses Aman.

Permasalahan yang dihadapi terkait masih rendahnya capaian pelayanan pengolahan air limbah domestik ialah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS serta belum adanya kelembagaan pengelola yang memadai untuk air limbah domestik. Kabupaten Gresik saat ini sudah memiliki 134 Unit IPAL dan 1 buah IPLT yang dibangun di tahun 2014 yaitu IPLT Betoyoguci yang berlokasi di Kecamatan Manyar dengan kapasitas design 45 m3/hari.



3. Pemanfaatan Pangan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan dari PPH adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) berdasarkan: cita rasa (palatability), daya cerna (digestibility), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability).

Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Food and Agriculture Organization (FAO) berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak. Jadi Pemanfaatan pangan berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan status gizi.



Tabel 2. 20 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Tahun 2022

NO	KELOMPOK PANGAN	BERAT PANGAN GRAM/ KAPITA/ HARI	PERHITUNGAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)							
			KKAL/ KAPITA	%	% AKE*)	BOBOT	SKOR AKTUAL	SKOR AKE	SKOR MAKS	SKOR PPH
1	Padi-padian	283,6	1142,6	57,3	53,1	0,5	28,6	26,6	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	42,9	47,4	2,4	2,2	0,5	1,2	1,1	2,5	1,1
3	Pangan Hewani	138,8	264,5	13,3	12,3	2,0	26,5	24,6	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	28,7	258,0	12,9	12,0	0,5	6,5	6,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	2,3	13,1	0,7	0,6	0,5	0,3	0,3	1,0	0,3
6	Kacang-kacangan	24,4	55,5	2,8	2,6	2,0	5,6	5,2	10,0	5,2
7	Gula	16,2	60,6	3,0	2,8	0,5	1,5	1,4	2,5	1,4
8	Sayur dan Buah	221,2	99,1	5,0	4,6	5,0	24,8	23,0	30,0	23,0
9	Lain-lain	102,5	54,3	2,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		860,5	1995,3	100,0	92,8	-	95,0	88,2	100,0	85,0

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2023



Tabel 2. 21 Sasaran Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Tahun 2021-2027

NO.	KELOMPOK PANGAN	SKOR POLA PANGAN HARAPAN						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9
3	Pangan Hewani	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
6	Kacang-kacangan	6,4	6,8	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7
7	Gula	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
8	Sayur dan Buah	23,0	23,8	24,5	25,2	26,0	26,7	27,4
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Total		86,3	87,8	89,2	90,7	92,1	93,6	95,0

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2021



Berdasarkan pada gambar di atas menunjukkan bahwa skor PPH konsumsi terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 skor PPH konsumsi.

a. Bidang Gizi

Gizi dapat diartikan sebagai pasokan bahan makanan yang dibutuhkan oleh organisme dan sel untuk tetap hidup. Menurut Ida Purnomowati, Diana H, Cahyo (2008) bahwa gizi merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membantu proses pertumbuhan, mempertahankan dan memperbaiki jaringan yang ada di tubuh, mengatur proses dalam tubuh, dan menyediakan energi guna untuk fungsi tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yaitu jenis kelamin, umur dan status kesehatan.

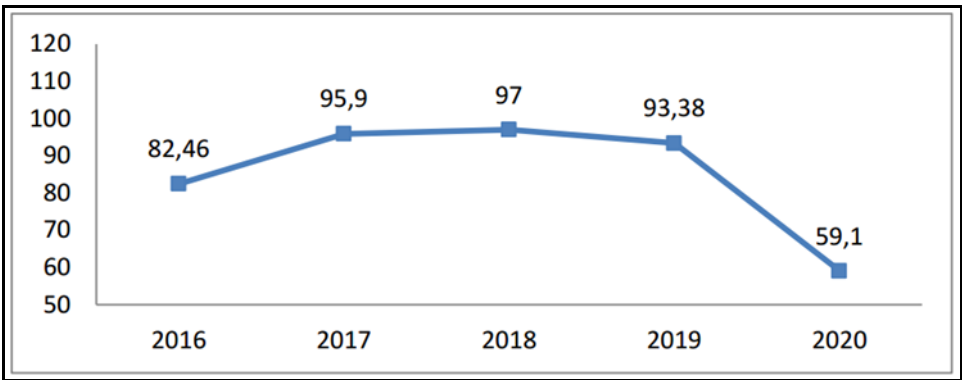
Gizi mempunyai keterkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia. Seseorang yang hidup didukung dengan gizi yang cukup sesuai kebutuhan akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (fisik yang sehat, cerdas, kreatif, produktivitas tinggi). Kekurangan gizi pada awal kehidupan berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Hal ini dikarenakan kurang gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan, berat badan lahir rendah (BBLR), kecil, pendek, kurus, serta daya tahantubuh yang rendah. Dalam perkembangannya, seorang anak yang kurang gizi akan mengalami hambatan perkembangan kognitif dan kegagalan pendidikan sehingga berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas di masa dewasa. Pemberian gizi yang cukup, tubuh akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga akan terlahir penduduk yang memiliki kualitas yang baik, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kondisi kinerja gizi Kabupaten Gresik digambarkan dengan Usia Harapan Hidup, jumlah kematian bayi, angka kematian bayi, angka kematian balita prevalensi stunting, persentase gizi, persentase cakupan neonates, persentase pelayanan kesehatan bayi, dan lainnya.

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka realisasi kematian Ibu pada tahun 2020 sebesar 59,1/100.000 Kelahiran Hidup. Jumlah absolute kematian Ibu pada tahun 2020 sebanyak 12 kematian ibu dari 20.309

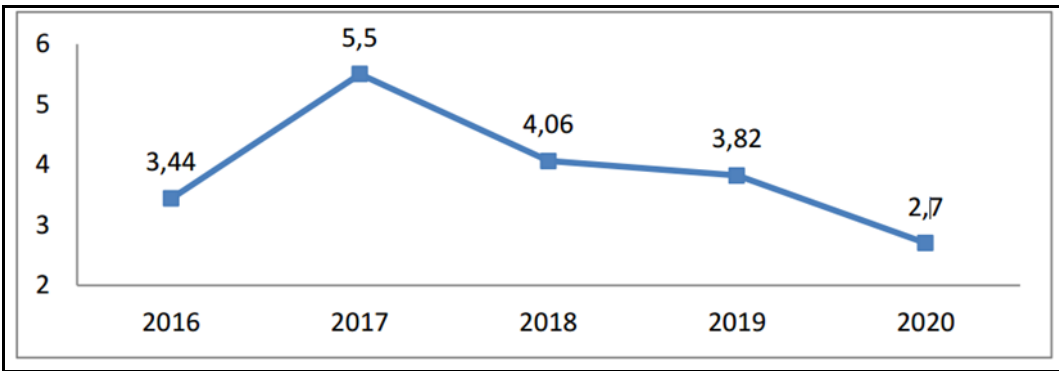


jumlah kelahiran hidup, lebih rendah dari tahun 2019 sebanyak 17 kematian ibu dari 20.388 jumlah kelahiran hidup.



Gambar 2. 25 Trend Realisasi AKI Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Angka Kematian Bayi (AKB), Angka realisasi kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 2,7/1.000 Kelahiran Hidup. Realisasi tersebut lebih rendah dari tahun 2019 yaitu 3,82/1.000 Kelahiran Hidup. Adapun realisasi yang lebih rendah tersebut menunjukkan bahwa kematian bayi mengalami penurunan dari tahun lalu, dari 78 kematian bayi menurun menjadi 54 kematian bayi.

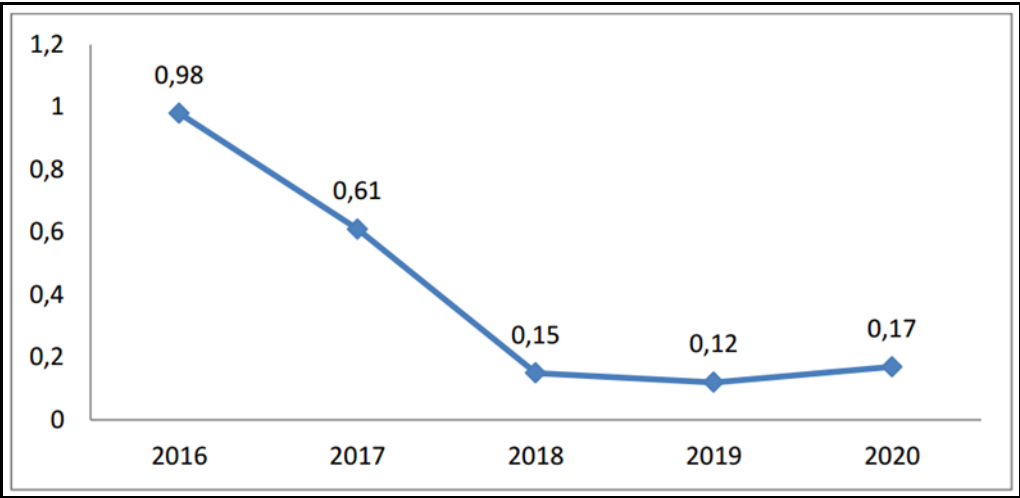


Gambar 2. 26 Trend Realisasi AKB Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Persentase Balita Gizi Buruk, Pada tahun 2020 angka persentase balita gizi buruk mencapai 0.17% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0.12%. Meskipun jumlah balita gizi buruk tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 95 bayi dari 108 bayi di tahun 2019, dan jumlah balita kurang gizi pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 2.005 bayi dari 3.383 bayi di tahun 2019, namun kenaikan persentase balita gizi buruk ini disebabkan karena jumlah balita



pada tahun 2020 adalah 55.383 bayi, lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah bayi pada tahun 2019 yakni sejumlah 94.032 bayi.



Gambar 2. 27 Trend Realisasi Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.

Tabel 2. 22 Prevalensi Data Status Gizi (*Stunting, Wasting, Underweight, Overweight*) berdasarkan data SSGI Tahun 2022

Prevalensi Balita Stunted (Tinggi Badan Menurut Umur)	10,7
Prevalensi Balita Wasted (Berat Badan Menurut Tinggi Badan)	6,4
Prevalensi Balita Underweight (Berat Badan Menurut Umur)	11,2
Prevalensi Balita Overweight (Berat Badan Menurut Tinggi Badan)	4,3

Sumber : Buku Saku SSGI, 2021

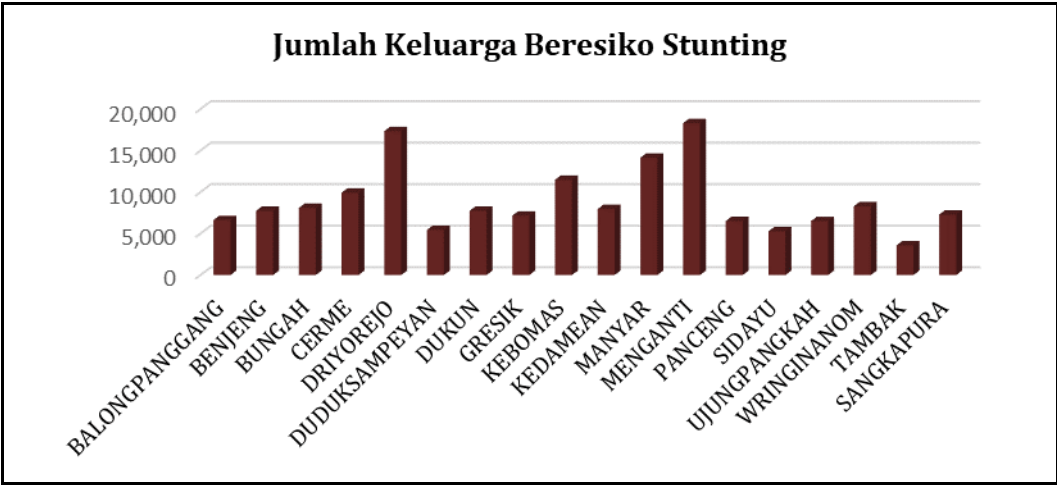
Tabel 2. 23 Data Balita Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021

KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA
Balongpanggang	9.335	6.607	3.187
Benjeng	11.073	7.733	4.124
Bungah	11.493	8.083	4.960



KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA
Cerme	14.356	9.911	5.747
Driyorejo	24.248	17.322	6.300
Duduksampeyan	7.512	5.430	3.238
Dukun	11.100	7.731	4.003
Gresik	9.109	7.148	4.611
Kebomas	16.082	11.466	5.767
Kedamean	11.702	7.949	4.014
Manyar	19.885	14.126	6.384
Menganti	25.553	18.295	8.127
Panceng	9.023	6.500	3.227
Sidayu	7.522	5.264	2.945
Ujungpangkah	9.344	6.492	3.439
Wringinanom	13.118	8.281	4.702
Tambak	4.126	3.570	1.617
Sangkapura	8.049	7.277	4.271

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik, 2021



Gambar 2. 28 Grafik Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan pada Tahun 2021 dapat dilihat bahwa Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Menganti merupakan kecamatan dengan jumlah keluarga beresiko stunting di Kabupaten Gresik. Pada tahun 2021, keluarga beresiko stunting di Kecamatan Driyorejo berjumlah 17.322 KK sedangkan di Kecamatan Menganti berjumlah 18.295 KK. Untuk tahun 2022, lokasi khusus penanganan



stunting berada di 13 desa. Daftar kecamatan dan desa lokasi khusus penanganan stunting, dapat dilihat pada Tabel 2.24 di bawah ini.

Tabel 2. 24 Calon Lokasi Khusus Penanganan Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2022

KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH ANAK STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK)	% PREVALENSI STUNTING
Balongpanggang	Pacuh	465	28	12,96
Benjeng	Jogodalu	524	37	15,04
Benjeng	Metatu	576	41	13,36
Cerme	Banjarsari	1007	70	14,29
Cerme	Betiting	991	33	13,98
Cerme	Cerme Kidul	537	66	13,31
Cerme	Cerme Lor	473	38	14,56
Cerme	Gedangkulut	593	60	14,15
Cerme	Ngabetan	776	72	14,31
Cerme	Kandangan	487	27	12,22
Driyorejo	Bambe	1427	86	23,82
Driyorejo	Cangkir	687	44	14,67
Driyorejo	Driyorejo	722	36	12,37
Driyorejo	Gadung	1332	119	19,80
Driyorejo	Kesambenwetan	753	47	18,29
Driyorejo	Mulung	1054	59	16,21
Driyorejo	Petiken	2480	113	15,48
Driyorejo	Randegansari	1223	80	21,11
Driyorejo	Tenaru	512	29	16,96
Driyorejo	Wedoroanom	806	72	24,32
Driyorejo	Banjaran	886	61	15,06
Driyorejo	Karangandong	577	50	17,54
Driyorejo	Mojosarirejo	1699	142	16,59
Driyorejo	Sumput	1633	66	17,28
Driyorejo	Tanjungan	890	61	15,72
Duduksampeyan	Ambeng Ambeng Watangrejo	481	42	17,00
Duduksampeyan	Tambakrejo	502	40	11,80
Dukun	Lowayu	1156	50	12,79
Gresik	Karangturi	580	35	13,94



KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH ANAK STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK)	% PREVALENSI STUNTING
Gresik	Tlogopojok	532	39	12,19
Kebomas	Gending	492	52	28,57
Kebomas	Indro	646	46	13,90
Kebomas	Sidomoro	817	65	20,50
Kebomas	Singosari	955	59	14,86
Kebomas	Kedanyang	1371	70	13,83
Kebomas	Kembangan	1287	124	13,32
Kebomas	Randuagung	1248	202	20,45
Kebomas	Sekarkurung	569	64	22,94
Kebomas	Sidomukti	666	37	17,54
Kedamean	Turirejo	511	37	13,03
Manyar	Banjarsari	636	56	13,18
Manyar	Leran	705	96	22,27
Manyar	Penganden	962	55	14,25
Manyar	Pongangan	1109	119	17,89
Manyar	Roomo	578	30	12,61
Manyar	Suci	3163	31	13,90
Menganti	Boboh	449	26	17,81
Menganti	Randupadangan	587	41	15,24
Sidayu	Golokan	681	95	27,78
Sidayu	Randuboto	484	63	21,88
Wringinanom	Kepuhklagen	464	31	13,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik, 2021



2.2. TANTANGAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN GRESIK

Ketahanan pangan memiliki dua kata kunci penting yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta akses penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang sangat kompetitif di pasar internasional, setiap daerah di Indonesia menghadapi tantangan berat dalam merumuskan kebijakan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Kebijakan pangan yang dimaksud antara lain adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan ragam komoditas pangan dan upaya peningkatan diversifikasi konsumsi pangan. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berkaitan dengan pangan dan gizi antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 25 Tantangan Pangan Dan Gizi Kabupaten Gresik

NO	TUJUAN STRATEGIS	KETERANGAN
1	Aspek Ketersediaan Pangan	1) Perubahan iklim global yang berpengaruh pada ketersediaan dan keterbatasan infrastruktur pendukung akses dan distribusi pangan 2) Minimnya sarana prasarana penunjang ketahanan pangan 3) Semakin tingginya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian 4) Kurang optimalnya diversifikasi pangan 5) Daya Dukung lahan masih kurang optimal 6) Terdapat alih fungsi tambak akibat tidak adanya perlindungan lahan tambak produktif 7) Sarana dan Prasarana penangkapan ikan kurang memadai sehingga menyebabkan kurang optimalnya hasil tangkapan 8) Belum optimalnya sosialisasi kepada nelayan untuk menerapkan sistem penangkapan atau budidaya yang tidak merusak lingkungan 9) Belum tersedianya data yang memadai karena masih belum optimalnya sistem informasi basis data terutama data saluran tambak 10) Produk pangan segar pertanian belum bersertifikat baik prima tani maupun SNI 11) Insentif untuk pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan 12) Perubahan iklim yang tidak menentu mengakibatkan gangguan produksi 13) Aspek daya saing produk pertanian relative masih



NO	TUJUAN STRATEGIS	KETERANGAN
		<p>rendah</p> <p>14) Masih terbatasnya RPH mosern yang berstandar SNI</p> <p>15) Kelangkaan Pupuk</p> <p>16) Ketergantungan Petani pada pupuk Kimia</p> <p>17) Peserta didik PAUD tidak mendapat pemberian makanan tambahan</p> <p>18) Tidak ada kecamatan yang melaksanakan pengembangan pasar, pemantauan, dan stabilisasi harga</p> <p>19) Tidak ada lumbung pangan yang dikembangkan di daerah rawan pangan</p> <p>20) Jumlah lumbung pangan belum memenuhi target</p> <p>21) Tidak terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan</p> <p>22) Belum ada cadangan pangan pemerintah</p> <p>23) Tidak ada desa mandiri pangan</p> <p>24) Belum ada program sertifikat pangan segar prima</p>
2	Aspek Keterjangkauan Pangan	<p>1) Keterbatasan daya beli masyarakat terhadap pangan</p> <p>2) Tidak terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga, dan akses pangan</p> <p>3) Pangan jajanan anak sekolah tidak ada yang diuji laboratorium</p> <p>4) Tidak ada sampling dan uji pangan untuk keamanan pangan, mutu dan gizi pangan</p> <p>5) Tingkat penguasaan tehnologi petani masih terbatas ditengah persaingan pasar yang semakin ketat</p> <p>6) Garis kemiskinan Gresik pada Tahun 2021 sebesar 505.499 Rupiah/Kapita/Bulan meningkat dibanding-kan tahun sebelumnya</p> <p>7) Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,36 dibandingkan dengan Tahun 2020</p> <p>8) Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 1,9</p>
3	Aspek Pemanfaatan Pangan	<p>1) Belum optimalnya kualitas pelayanan Kesehatan bayi dan balita sehingga berakibat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum seluruhnya bayi mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Masih adanya bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM) Masih adanya bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) <p>2) Belum optimalnya upaya penanganan stunting</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum semua ibu hamil terpenuhi kebutuhan gizinya Belum seluruh Balita terpenuhi kebutuhan gizi nya <p>3) Pelayanan balita sehat dan balita sakit masih belum terlaksana secara optimal</p> <p>4) Pelayanan terhadap anak kelas 1-10 (status gizi, gigi, mata dan telinga) masih belum optimal</p> <p>5) Pergeseran pola konsumsi masyarakat terhadap pangan dari sumber karbohidrat ke non karbohidrat.</p>



NO	TUJUAN STRATEGIS	KETERANGAN
		<p>Menurutnya, pergeseran ini akan berdampak pada kecukupan gizi</p> <p>6) Perubahan gaya hidup yang terkait dengan pola makan, meliputi kebiasaan makan di luar rumah, konsumsi pangan olahan meningkat, makan tidak seimbang (tinggi minyak/lemak/ gula dan rendah sayur/ buah/ pangan hewani)</p>
4	Aspek Kelembagaan	<p>1) Belum adanya sistem pengendalian dan pengawasan pangan</p> <p>2) Masih belum optimalnya perlindungan usaha Tani</p> <p>3) Petugas lapangan pertanian masih belum memiliki peran yang dominan</p> <p>4) Penetapan lahan LP2B minimal di Kabupaten Gresik kurang melibatkan penyuluh pertanian (Dinas Pertanian)</p> <p>5) Tidak ada kecamatan yang melaksanakan pengembangan pasar, pemantauan, dan stabilisasi harga</p> <p>6) Tidak ada kelompok tani yang terlibat pemberdayaan</p> <p>7) Tidak tersedia tenaga penyuluh keamanan pangan dan pengawas pangan</p> <p>8) Tidak ada kelompok usaha pangan lahan kering</p> <p>9) Frekuensi pertemuan Dewan Ketahanan pangan hanya terealisasi pada tahun 2017 – 2018</p> <p>10) Belum ada penyuluh bersertifikat</p> <p>11) Belum ada tim pangan kecamatan yang dibina</p>



BAB III

RENCANA AKSI PANGAN GIZI

3.1. TUJUAN DAN SASARAN PANGAN DAN GIZI

Tujuan utama yang ingin diwujudkan dengan adanya perbaikan pangan dan gizi melalui pendekatan Multi sektor adalah terbentuknya sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Tujuan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik meliputi 4 (empat) tujuan strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA;
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial);
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Tujuan akhir dari pembangunan pangan dan gizi di daerah adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. Hal ini selaras dengan amanat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.Ppn/Hk/10/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi Tahun 2023-2024. RAD-PG Kabupaten Gresik disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2021- 2026 sebagai bagian dari pembangunan bidang Pangan dan Gizi.

Berdasarkan maksud dan tujuan di atas, maka sasaran yang diharapkan dari Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik ini adalah:

- a) Terwujudnya kondisi ketersediaan pangan yang mantap secara mandiri berbasis sumber daya lokal;
- b) Terwujudnya kemudahan dan kemampuan mengakses pangan bagi setiap rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Gresik;
- c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang;



- d) Terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat;
- e) Meningkatkan status gizi masyarakat.

Berikut merupakan *outcome* yang ingin dicapai dari pembangunan bidang pangan dan gizi di Kabupaten Gresik :

Tabel 3. 1 Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi Dalam RPJMN Tahun 2020-2024

NO	KOMODITAS	CAPAIAN		TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
Intermediate Outcome						
1	Jumlah Produksi Padi (Ton)	379.666	411.242	413.195	415.166	Dinas Pertanian
2	Jumlah Produksi Daging (Kg)	11.134.312	11.468.491	11.700.155	11.937.668	Dinas Pertanian
3	Jumlah Produksi Telur (Kg)	3.349.487	3.388.314	3.456.758	3.526.930	Dinas Pertanian
4	Jumlah Produksi Buah (Ton)	114.433	114.931	115.477	116.027	Dinas Pertanian
5	Jumlah Produksi Sayur (Ton)	29.925	30.055	30.198	30.342	Dinas Pertanian
6	Skor Pola Pangan Harapan (%)	86,33	85,02	85,50	86,50	Dinas Pertanian
7	Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/Kapita/Hari)	2101,00	1995,26	1995,26	1995,26	Dinas Pertanian
8	Angka Kecukupan Protein (AKP) (Gram/Kapita/Hari)	64,40	60,99	60,99	60,99	Dinas Pertanian
9	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	-	12%	13%	14%	Dinas Pertanian
10	Angka Konsumsi Ikan	52,96	55,67	55,67	55,67	Dinas Perikanan
11	Rata-Rata Konsumsi Daging Ruminasia (Kg/Kapita/Tahun)	9,1	7	7	7	Dinas Pertanian
12	Rata-Rata Konsumsi Telur (Gram/Kapita/Hari)	22,6	19,8	19,8	19,8	Dinas Pertanian
13	Rata-Rata Konsumsi Susu (Gram/Kapita/Hari)	9,2	7,3	7,3	7,3	Dinas Pertanian
14	Rata-Rata Konsumsi Sayur dan Buah (Gram/Kapita/Hari)	230,9	221,2	221,2	221,2	Dinas Pertanian
15	Persentase Keamanan Pangan	83,33	83,33	80,40	80,60	Dinas Pertanian



NO	KOMODITAS	CAPAIAN		TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
	Segar (%)					
16	Persentase Sarana Pengelolaan Makanan Sesuai Standar dan Berijin (%)	59,00	61,30	62,00	64,00	Dinas Kesehatan
17	Persentase Pengawasan Usaha Perikanan (%)	17,00	26,00	32,00	38,00	Dinas Perikanan
18	Persentase Kepatuhan Pengawasan Usaha Perikanan (%)	10,00	15,00	20,00	25,00	Dinas Perikanan
Outcome						
19	Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) SSGI	23,00	10,70	10 - 9	9 - 8,5	Dinas Kesehatan
20	Prevalensi <i>Wasting</i> (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita (%) Riskesdas	3,77	4,08	7,3	7	Dinas Kesehatan
21	Prevalensi Balita <i>Underweight</i> (Berat Badan Menurut Umur) SSGI	13.6	11.2	11.2	11.2	Dinas Kesehatan
22	Prevalensi Balita <i>Overweight</i> (Berat Badan Menurut Tinggi) SSGI	N/A	4.3	4.3	4.3	Dinas Kesehatan

3.2. RUANG LINGKUP PANGAN DAN GIZI

RAD-PG difokuskan dalam upaya penajaman kontribusi program/kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 dan dokumen kebijakan lain yang relevan seperti Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi tahun 2020-2024 serta Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Tujuan strategi dan aksi penajaman lebih difokuskan untuk menghadirkan daya ungkit sistem pangan dalam perbaikan konsumsi gizi keluarga yang beragam, seimbang dan aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu: 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan



Pelayanan Gizi (Esensial); 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi. Pengembangan aksi di setiap strategi dilakukan dengan prinsip menghadirkan intervensi lintas sektor ditingkat keluarga secara konvergensi dan terintegrasi, memegang teguh prinsip no one left behind dengan memberi prioritas kelompok rawan gizi, implementatif, terukur dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2023-2024 menitikberatkan pada strategi yang spesifik untuk meningkatkan daya ungkit kebijakan pangan dan gizi yang menjamin keberlangsungan produksi hingga konsumsi di tingkat rumah tangga. Selain itu, fokus kepada kelompok paling rentan segala bentuk malnutrisi (gizi kurang maupun gizi lebih) sangat penting untuk mengatasi ketimpangan. Hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien terutama dalam kondisi pandemi dan masa transisi pasca pandemi.

3.3. PENGUATAN RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

Pelaksanaan RAD-PG melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap Daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akademika (perguruan tinggi/organisasi profesi), organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa. Pelaksanaan ada yang bersifat oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi. Dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu:

- a. Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan;
- b. Pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan. Penentuan prioritas daerah juga disinkronisasikan dengan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat;
- c. Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

Rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD, sehingga fungsinya tidak hanya sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi lintas sektor namun juga berisi rekomendasi kegiatan yang diacu untuk menyusun dokumen perencanaan khususnya di bidang pangan dan gizi. Rekomendasi kegiatan yang dimaksud berisi penajaman aksi (baru) yang tidak lagi mengkompilasi program/kegiatan yang sudah ada pada dokumen perencanaan sebelumnya,



dimaksudkan untuk mengisi gap mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD.

Lebih detail mengenai perbedaan konsep lama dan konsep baru rencana aksi pangan dan gizi dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Perbedaan Konsep Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Saat Ini dengan Periode Sebelumnya

PERBEDAAN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Pendekatan Penyusunan Aksi	Dibagi ke dalam 5 pilar rencana aksi pangan dan gizi	Dibagi ke dalam 4 tujuan strategis
Matriks Aksi	Berisi sebagian besar kompilasi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang sudah ada	Berisi penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD
Tujuan dan Fungsi	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan dan instrumen koordinasi lintas sektor	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan tetap sebagai instrumen koordinasi lintas sektor
Aspek Gender	Aksi pangan dan gizi yang responsif gender masih sangat minim	Mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan aksi
Aspek Ketahanan	Aksi yang diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi termasuk perlindungan gizi dalam kedaruratan yang masih terbatas.	Aksi tidak hanya diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi, tetapi juga peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam kondisi kegawat daruratan termasuk pandemi COVID-19

3.4. RESPON KEBIJAKAN PANGAN DAN GIZI DI DAERAH DALAM SITUASI DARURAT

3.4.1 Kebijakan Pangan dan Gizi Dalam Menghadapi Situasi Covid-19

- a. Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Paling tidak dua tanggung jawab pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar kuat agar kebutuhan gizi masyarakat tetap diperhatikan bahkan dalam situasi darurat sekalipun seperti situasi bencana atau pandemi.
- b. Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi hampir di seluruh negara berdampak ke segala dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap



kebutuhan dasar penduduk antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya saat himbauan beraktifitas harus dibatasi mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Menanggapi situasi penyebaran COVID-19 yang begitu cepat, Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status tanggap darurat pada tanggal 17 Maret 2020 Pemerintah juga menetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka percepatan Penanganan COVID-19.

Dengan terjadinya pandemi COVID-19, status tanggap darurat yang diikuti dengan kebijakan PSBB akan berdampak signifikan tidak hanya pada aktivitas masyarakat tetapi juga terhadap kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap menurunnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan pangan bergizi. Himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (working for home) dan menjaga jarak secara fisik (social/physical distancing) serta kebijakan beberapa pemerintah daerah yang mengimplementasikan karantina wilayah secara parsial dan melakukan pembatasan kegiatan di keramaian, telah membuat perubahan situasi yang baru di hampir semua aspek kehidupan, termasuk perubahan pola rantai pasok pangan.

Untuk mengantisipasinya Kementerian Pertanian menerbitkan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 03/SE/KN.230/M/05/2020 tentang Antisipasi Terjadinya Krisis Pangan dengan memastikan kesiapan percepatan tanam Musim Tanam II (MT II) tahun 2020, memastikan kesiapan cadangan beras dengan berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di level desa, serta sosialisasi gerakan diversifikasi pangan lokal.

Dari perspektif produksi, para petani dan produsen pangan mulai merasakan perubahan terkait pasokan input dan juga harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Untuk memastikan keamanan pangan olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kemudian mengeluarkan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan sebagai upaya mendukung pelaku usaha dalam memastikan rantai produksi dan distribusi



pangan olahan berkualitas secara konsisten termasuk pada masa status darurat bencana wabah COVID-19 di Indonesia.

Mobilisasi bahan pangan juga telah mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar yang berbasis online. Sementara itu dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya social/physical distancing atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah, pola transaksi juga mulai berubah yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan platform digital atau online.

Dari perspektif distribusi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga sudah menghimbau seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Indonesia melalui Surat No. AJ.303/I/I/DJPD/2020 agar selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Asosiasi Perusahaan Logistik setempat untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan logistik bagi masyarakat.

Dari perspektif konsumsi, kerawanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah gizi akut (gizi kurang dan gizi buruk) pada kelompok rentan, bahkan masalah gizi kronik (stunting) pun mungkin akan meningkat jika penetapan tanggap darurat COVID-19 berlangsung dalam waktu yang cukup lama (prolonged emergency situation). Pelayanan gizi diharapkan dapat tetap berjalan dengan melakukan beberapa penyesuaian terkait kebijakan pembatasan sosial yang diatur oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 guna meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat dengan memprioritaskan kelompok rawan, yaitu bayi dan balita, remaja putri, ibu hamil dan ibu menyusui pada situasi pandemi COVID-19. Kondisi kedaruratan di berbagai daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Beberapa daerah telah melakukan PSBB atau pembatasan karena terdapat transmisi lokal. Sementara itu, beberapa daerah yang belum menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal virus COVID-19 serta mobilisasi penduduk antar wilayah yang sangat minimal, mereka tetap mematuhi prinsip pencegahan infeksi dan physical distancing.

Untuk daerah yang memiliki kebijakan PSBB atau terdapat transmisi lokal, walau terjadi pembatasan pelayanan, perlu dipastikan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, akan tetap mendapatkan pelayanan gizi selama masa tanggap darurat. Sementara itu, bila untuk daerah tidak menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal serta mobilisasi penduduk yang minimal, pelayanan gizi tetap dilakukan dan disesuaikan dengan



pedoman yang sudah ada. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Pelayanan Gizi pada Masa Tanggap Darurat Pandemi COVID-19 untuk tenaga kesehatan. Tidak ketinggalan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merilis materi edukasi untuk tenaga medis perempuan dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan gizi selama masa tanggap darurat COVID-19.

Kehadiran RAN-PG dan RAD-PG akan mendukung kepatuhan terhadap penyediaan layanan pangan dan gizi yang berkelanjutan selama pandemi, serta berperan dalam memastikan terkoordinasinya kegiatan yang ditujukan untuk melindungi populasi yang rentan dan mencegah situasi pangan dan gizi memburuk, dengan pertimbangan khusus diberikan pada aspek gender dari dampak pandemi dan kondisi merugikan yang dialami perempuan dan anak perempuan.

3.4.2 Kebijakan Pangan dan Gizi Dalam Menghadapi Situasi Darurat

Bencana alam yang menimpa khususnya negara Indonesia merupakan bagian dari kehidupan yang sulit untuk dikendalikan, manusia hanya bisa mencegah dan mengatasi dampaknya apabila bencana sudah terjadi. Untuk mengatasi kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh bencana, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu salah satunya dengan mengonsumsi pangan darurat sebelum pasokan makanan stabil dan dapur umum sudah dapat digunakan secara efektif. Pangan darurat merupakan pangan khusus yang dikonsumsi pada saat darurat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian manusia (2100 kkal). Tujuan utama dari pangan darurat ialah mengurangi timbulnya penyakit atau jumlah kematian diantara para pengungsi dengan menyediakan pangan bergizi lengkap sebagai sumber energi satu satunya selama lima belas (15) hari. Waktu tersebut dihitung mulai dari pengungsian terjadi. Pangan tersebut harus memenuhi karakteristik pangan darurat agar dapat disebut sebagai pangan darurat.

Pangan darurat dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu produk pangan yang dirancang untuk kondisi dimana air bersih dan bahan bakar untuk memasak masih tersedia, dan produk pangan yang dirancang untuk menghadapi situasi dimana air bersih tidak tersedia dan tidak bisa memasak. Di Indonesia saat ini sudah banyak berkembang pangan darurat untuk kepentingan tentara di lapangan namun belum banyak dikembangkan pangan darurat untuk korban bencana alam. Bahan baku pangan darurat yang akan



dikembangkan untuk korban bencana alam dapat berasal dari bahan baku lokal yang dapat meminimalkan biaya produksi.

Pangan darurat yang diberikan diharuskan sesuai dengan kebutuhan manusia berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG), yaitu 2.100 kkal/hari (Institute of Medicine, 1995). Menurut Zoumas et al., (2002) untuk mencapai total kalori tersebut, jumlah makronutrien yang direkomendasikan kandungan protein, lemak, dan karbohidrat berturut turut sebesar 10-15%, 35-45%, dan karbohidrat 40-50%. Sumber utama karbohidrat ialah pati yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik untuk rasa, palatabilitas, stabilitas dan fungsi metabolik. Karbohidrat memberikan sumbangan energi sebesar 40-50% dari total 700 kkal atau 23-35 gram per 50 gram. Karbohidrat merupakan salah satu sumber utama energi pada produk pangan darurat di samping lemak, memberikan rasa manis, menghasilkan sifat-sifat fisik yang diinginkan pada produk dan juga berperan penting dalam penyerapan natrium untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit tubuh. Sumbangan energi lemak, protein, dan karbohidrat ini diperoleh dari nilai energi masing-masing makronutrien terhadap total energi per bar dikalikan 100 persen (Anandito et al., 2016).

Menurut Rauf et al. (2009) potensi bahan pangan di Indonesia sangatlah melimpah dan menempati posisi ketiga sebagai negara dengan jenis bahan makanan terbanyak di dunia. Jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi bahan pangan lokal masih cukup banyak. Indonesia merupakan penghasil berbagai jenis tanaman pangan sebagai sumber karbohidrat seperti sorgum, sagu, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sebagainya. Sebagian besar bahan pangan lokal tersebut telah biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan tepung walaupun belum dikelola secara maksimal. Namun di beberapa daerah tertentu bahan pangan tersebut dijadikan sebagai bahan makanan pokok meskipun hanya digunakan oleh sebagian kecil masyarakat di Indonesia. Tanaman sumber karbohidrat tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan dasar pembuatan pangan darurat yang menjadi solusi dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di daerah terdampak bencana.

Menurut Zoumas et al. (2002) dalam pengembangan pangan darurat terdapat beberapa karakteristik kritis yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Aman
2. Memiliki warna, aroma, tekstur, dan penampakan yang dapat diterima
3. Mudah didistribusikan



4. Mudah digunakan
5. Nutrisi lengkap.

Menurut Ekafitri dan Faradilla (2011) dalam mengembangkan komposisi pangan darurat terdapat beberapa asumsi yang digunakan, yaitu :

1. Potable water, harus disediakan bersamaan dengan pemberian pangan darurat
2. Individu (pengungsi) harus mengonsumsi pangan ini untuk memenuhi kebutuhan energinya
3. Semua individu (pengungsi) dengan usia di atas 6 bulan akan mengonsumsi pangan darurat ini
4. Produk ini merupakan sumber energi utama bagi korban bencana selama 15 hari
5. Kebutuhan nutrisi bagi wanita hamil dan menyusui tidak dimasukkan dalam perhitungan pembuatan pangan darurat, tetapi diasumsikan bahwa mereka harus mengonsumsi pangan darurat melebihi asupan energi rata-rata per harinya (>2100 kkal).

Menurut Zoumas et al. (2002) ada beberapa bahan yang direkomendasikan sebagai sumber gizi:

1. Sumber karbohidrat: tepung terigu, jagung, oats, dan tepung beras
2. Sumber protein: produk-produk kacang seperti konsentrat atau isolat protein; susu bubuk seperti kasein dan turunannya; campuran antara bahan dasar sereal dan protein harus memiliki skor asam amino ≥ 1.0
3. Sumber lemak: hidrogenasi parsial dari kacang kedelai, minyak kanola, minyak bunga matahari
4. Gula: glukosa, high fructose corn syrup, maltodekstrin
5. Vitamin dan mineral juga dapat ditambahkan untuk meningkatkan profil produk

Pangan Darurat telah dikembangkan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Adapun bahan yang digunakan tergantung pada bahan pangan yang tersedia di daerah masing-masing. Ada beberapa jenis produk pangan darurat yang dapat dikembangkan. Salah satu jenis produk pangan darurat yang direkomendasikan untuk dikembangkan yaitu produk bars. Produk ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan jenis produk lainnya dikarenakan memiliki daya awet yang cukup lama dan lebih tinggi. Selain itu, pangan dalam bentuk bars juga tahan terhadap guncangan ataupun lemparan karena memiliki tekstur yang kokoh, tidak mudah hancur dan tidak mudah rapuh sehingga memiliki



ketahanan yang tinggi saat proses distribusi (Luthfiyanti et al., 2011). Adapun jenis produk pangan darurat diantaranya :

1. **Food Bars**

Food bars adalah salah satu produk pangan berupa makanan ringan yang berbentuk batang dan padat. Makanan padat (food bars) merupakan salah satu alternatif bentuk makanan yang dapat dikembangkan dengan kecukupan kalori, protein, lemak, dan nutrisi lainnya (Ladamay et al., 2014). Saat ini food bars yang berada di pasaran terbuat dari tepung terigu (gandum) dan tepung kedelai yang merupakan komoditas import Indonesia. Food bars juga dapat dikategorikan sebagai EFP (Emergency Food Product) yaitu makanan yang dapat digunakan oleh korban bencana karena EFP merupakan pangan yang dikonsumsi pada saat darurat yang memiliki gizi yang beragam dan baik yang dapat memenuhi kebutuhan gizi harian setiap orang yaitu 2100 kkal (Zoumas et al.,2002).

Menurut Luthfiyanti et al. (2011) pembuatan food bars sebagai pangan darurat berbahan baku lokal dirancang untuk menghasilkan bahan makanan bagi korban bencana alam dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal Indonesia seperti pisang nangka, tepung kedelai, dan tepung ubi jalar dalam pembuatan food bars sebagai pangan darurat. Food bars merupakan cookies yang diformulasi secara khusus sehingga tidak menyebabkan rasa haus dan memiliki kandungan protein tinggi, berbentuk batang yang biasa dikonsumsi di sela-sela waktu makan.

2. **Meals Ready to Eat (MRE)**

Produk jenis ini merupakan salah satu bentuk makanan untuk keperluan militer. Awalnya produk ini dikembangkan untuk program luar angkasa dan kemudian berkembang menjadi makanan militer dan sekarang digunakan oleh petualang padang gurun. MRE bisa dibuat dengan mengombinasikan beberapa jenis pangan untuk memenuhi kriteria menu lengkap, dikemas dalam satu wadah yang ringan, sehingga mudah didistribusikan terutama dalam kondisi tempur. MRE dikemas dalam kemasan khusus yang tertutup rapat dan tidak terekspos udara seperti retort pouch. Menurut Hariyadi (2008), sebagai ransum tempur, MRE harus dikembangkan untuk memberikan dukungan gizi bagi seorang tentara untuk melakukan tugas tempur dengan baik; dimana kondisi logistik pangan normal tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, ransum MRE, selain harus aman dan bergizi, juga harus memenuhi beberapa kriteria



logistik yang cukup berat. Kriteria MRE yang dibutuhkan yaitu kuat, awet, dan bermutu.

3. Camping Pouch Product

Produk ini dikemas dalam kemasan alumunium foil dan memiliki umur simpan sekitar dua tahun pada suhu ruang. Pangan ini merupakan pangan hasil freeze drying dan setiap kemasan disemprot dengan nitrogen untuk mencegah deteriorasi dan memperpanjang umur simpan. Produk ini memiliki kandungan energi yang cukup dengan persentase makronutrien didominasi oleh lemak (40-50%). Pangan ini membutuhkan tambahan air panas atau air dingin untuk dapat dikonsumsi.

4. Long Shelf Life Food Supply

Produk ini juga merupakan hasil freeze drying yang dikemas di dalam double-enameled can, disemprot dengan nitrogen sehingga memiliki umur simpan yang sangat tinggi yaitu 10-15 tahun atau lebih. Jenis dari produk ini ada 2 yaitu Ready reserves dan Alpine aire. Perbedaan kedua jenis produk ini adalah komposisi penyusunnya. Kedua jenis dari produk ini memiliki kandungan yang sama per kemasannya untuk kandungan energinya.

3.5. PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

1. Pelaksanaan PUG juga diperkuat pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang ini juga memandatkan keterlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan desa. Dalam konteks ini, strategi PUG melalui PPRG menjadi strategis untuk diintegrasikan di dalam pembangunan desa. Dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan kerangka regulasi, masa berlaku SEB yang sudah selesai, serta kebutuhan kontekstual PPRG di dalam pembangunan desa, maka pada tahun 2017 disusun Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender dan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan PUG pada tahun 2018 sampai saat ini. Penyusunan Perpres ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020.
2. Dalam konteks pembangunan pangan dan gizi, aspek gender menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan. Di dalam Global Nutrition Report 2020 disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan



Outcome gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi. Oleh karena itu, perspektif gender menjadi salah satu pendekatan yang akan diintegrasikan di dalam penyusunan kebijakan/program/intervensi pembangunan pangan dan gizi, baik dari sisi proses maupun substansi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Hal ini terkait dengan Tujuan ke-5 Pembangunan Sosial Berkelanjutan yakni, Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Perhitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP Pada Tahun 2010 dengan indikator sebagai berikut :

- a) Angka Harapan Hidup (e0); Laki-laki dan Perempuan
- b) Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki dan Perempuan
- c) Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki dan Perempuan
- d) Perkiraan pendapatan; Laki-laki dan Perempuan

Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM. Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik selama 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender mengalami penurunan sebesar 0,12 dari Tahun 2019 sebesar 90,05 menjadi 89,93. Tingkat Ketimpangan Indonesia selalu lebih



rendah dari Provinsi Jawa Timur kecuali pada tahun 2020, sedangkan tingkat Ketimpangan Kabupaten Gresik selalu lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Berdasarkan grafik dibawah menunjukkan bahwa angka IDG Kabupaten Gresik dari tahun 2017 sampai tahun 2019 selalu meningkat, namun mengalami penurunan di tahun 2020 dengan angka 63.29 yang masih berada dibawah rata-rata jawa timur dengan angka 73.03 dan nasional dengan angka 75.07.



BAB IV

PELAKSANAN RENCANA AKSI

Pembangunan pangan dan gizi Kabupaten Gresik adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen di pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang lebih. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pembangunan pangan dan gizi harus dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan dan realistis.

Koordinasi dan kolaborasi antar OPD menjadi sangat penting dalam mencapai perbaikan pangan dan gizi di Kabupaten Gresik. Tujuan utama yang ingin diwujudkan dengan adanya perbaikan pangan dan gizi dengan pendekatan Multi sektor adalah terbentuknya Sumber Daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

4.1. STRATEGI DAN AKSI PANGAN DAN GIZI

Dalam rangka mencapai perbaikan pangan dan gizi dalam upaya membentuk sumber daya manusia Kabupaten Gresik yang cerdas produktif dan berdaya saing diperlukan strategi dan aksi pangan dan gizi. Strategi dan aksi pangan dan gizi Kabupaten Gresik dapat diuraikan seperti tabel di bawah ini.



Tabel 4. 1 Strategi dan Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik

NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
TS 1 : PENINGKATAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG, DAN AMAN								
1	PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN BERAGAM	MENINGKATKAN PENGEMBANGAN SENTRA PRODUKSI PANGAN UNGGULAN YANG BERAGAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	1,00	Dinas Pertanian
		MENINGKATKAN PRODUKSI SAYUR, BUAH, PANGAN HEWANI, DAN PANGAN LOKAL DI SETIAP KAB/KOTA	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	1.043,45	Dinas Pertanian
				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	5.496,55	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	40,00	Dinas Pertanian



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	16,00	Dinas Pertanian
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	1,00	Dinas Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4,00	Dinas Pertanian
		MEMPERLUAS UPAYA PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN DAN GIZI KELUARGA SERTA JAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1,00	Dinas Pertanian
		MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMASYARAKATKAN KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN DENGAN						



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
		MENINGKATKAN PENGGUNAAN BENIH BERSERTIFIKAT						
		MEMBERDAYAKAN PERAN PEREMPUAN UNTUK IKUT DALAM KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN SEBAGAI SUMBER PANGAN DAN GIZI KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1,00	Dinas Pertanian
2	PENYEDIAAN PANGAN YANG AMAN (DALAM PROSES PRODUKSI)	MENINGKATKAN KERJASAMA DENGAN BPOM DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DALAM PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2,00	Dinas Pertanian
				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12,00	Dinas Pertanian



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	12,00	Dinas Kesehatan
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	36,00	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	Dinas Pertanian



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
		MENGUATKAN KAPASITAS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKPD) UNTUK KEAMANAN PANGAN ASAL TUMBUHAN						
		PENGUATAN KAPASITAS PENGAWASAN BAGI BALAI VETERINER DALAM RANGKA KEAMANAN PANGAN ASAL HEWAN						
3	PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN MASYARAKAT	MENINGKATKAN KETERSEDIAAN CADANGAN PANGAN DI PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1,00	Dinas Pertanian
				Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1,00	Dinas Pertanian
				Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	Unit	2,00	Dinas Pertanian
				Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	Unit	2,00	Dinas Pertanian
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	120,00	Dinas Pertanian



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Ketahanan Pangan Keluarga			
		MEMBANGUN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA (LPMDES)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia	Unit	45,00	Dinas Pertanian
4	PENANGANAN KERUSAKAN DAN KEHILANGAN HASIL PANEN (FOOD LOSS)	MENGEMBANGKAN PERTANIAN MODERN (SMART FARMING) UNTUK MENGURANGI FOOD LOSS	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	16,00	Dinas Pertanian
		MENYEDIAKAN AKSES/BANTUAN INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN TEKNOLOGI KEPADA PETANI, NELAYAN, DAN PETERNAK TERKAIT	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	16,00	Dinas Pertanian
		MENYEDIAKAN AKSES/BANTUAN INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN TEKNOLOGI KEPADA PETANI, NELAYAN, DAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1,00	Dinas Perikanan



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
		PETERNAK TERKAIT	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	Dinas Perikanan
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1,00	Dinas Perikanan
		MELAKUKAN PENDAMPINGAN PRODUSEN PANGAN DALAM PENGENDALIAN FOOD LOSS	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	16,00	Dinas Pertanian
		MELAKUKAN PENDAMPINGAN PRODUSEN PANGAN DALAM PENGENDALIAN FOOD LOSS	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	100,00	Dinas Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	10,00	Dinas Perikanan



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	2,00	Dinas Perikanan
		MENGEMBANGKAN PANGKALAN DATA UNTUK MEMANTAU PROSES PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN PENYIMPANAN DALAM MENGENDALIKAN FOOD LOSS	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	Unit	2,00	Dinas Pertanian
		MENGEMBANGKAN PANGKALAN DATA UNTUK MEMANTAU PROSES PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN PENYIMPANAN DALAM MENGENDALIKAN FOOD LOSS	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	2,00	Dinas Perikanan



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
5	PENGAYAAN NILAI GIZI SUMBER PANGAN MELALUI BIOFORTIFIKASI	MENYUSUN PETA JALAN BIOFORTIFIKASI PANGAN DI INDONESIA UNTUK PERBAIKAN KEBIJAKAN YANG ADA						
		MENGEMBANGKAN BIOFORTIFIKASI DI BERBAGAI KOMODITI PANGAN						
TS 2 : PENINGKATAN KETERJANGKAUAN PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN								
1	PENINGKATAN STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN	MEMANFAATKAN PANEL HARGA PANGAN SEBAGAI EARLY WARNING SYSTEM (EWS) TETAP AKTIF TERPANTAU DAN TERLAPORKAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1,00	Dinas Pertanian
		MENINGKATKAN JENIS KOMODITI PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN TOKO TANI INDONESIA (TTI) MENCAKUP PANGAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH (KELOMPOK HEWANI DAN HORTIKULTURA) DAN PANGAN LOKAL	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	Unit	2,00	Dinas Pertanian
2	PERLUASAN AKSES SISTEM INFORMASI	MENYUSUN PROGNOSE KETERSEDIAAN PRODUKSI DAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1,00	Dinas Pertanian



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PASAR DAN HARGA PANGAN	KEBUTUHAN PANGAN	DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1,00	Dinas Pertanian
3	PANGUATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM), KOPERASI, DAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	MEMBINA UMKM/KOPERASI/BUMDES DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PANGAN LOKAL (PIPL) UNTUK PENINGKATAN GIZI KELOMPOK RAWAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	2,00	Dinas Perikanan
4	PENGEMBANGAN SISTEM JARING PENGAMAN SOSIAL PANGAN DENGAN PEMANFAATAN JENIS PANGAN YANG BERAGAM	MENGEMBANGKAN MEKANISME PEMANFAATAN BERAS BIFORTIFIKASI DAN FORTIFIKASI MENJADI SALAH SATU KOMODITAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)						
		MENGEMBANGKAN KEBERAGAMAN PANGAN DENGAN NILAI GIZI YANG BAIK SEBAGAI KOMODITAS BPNT/PROGRAM SEMBAKO						



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
5	PENYEDIAAAN DAN PENYALURAN PANGAN UNTUK SITUASI DARURAT	MENINTEGRASIKAN PELAYANAN GIZI ESENSIAL PADA PROGRAM BANTUAN SOSIAL UNTUK KELOMPOK TERMARGINALKAN (PEREMPUAN, GELANDANGAN, PENYANDANG DISABILITAS, PENYANDANG MASALAH HUKUM, TERLANTAR, ETNIS MINORITAS)	PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan	18,00	Dinas Sosial
			PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	%	95,00	Dinas Sosial
		REVITALISASI/MENGAKTIFKAN PROGRAM CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD) BEKERJASAMA DENGAN SUPPLIER BAHAN PANGAN LOKAL DI DAERAH MASING-MASING						
		MENDAMPINGI DAERAH RENTAN PANGAN PRIORITAS 1-3 DALAM PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN GIZI	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1,00	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	120,00	Dinas Pertanian



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
			PANGAN MASYARAKAT					
7	PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK PANGAN	PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK PANGAN MELALUI PENGUATAN SUPPLY CHAIN ECOSYSTEM BERDASARKAN KONDISI DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	1,00	Dinas Pertanian
		MENGEMBANGKAN KERJASAMA INDUSTRI START UP DENGAN KELOMPOK TANI UNTUK DISTRIBUSI PANGAN MELALUI JALUR E-COMMERCEE	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	Unit	2,00	Dinas Pertanian
TS 3 : PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN DAN PELAYANAN GIZI (ESENSIAL)								
1	PENGUATAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI DAN PEMANTAUAN STATUS GIZI	MENINTEGRASIKAN SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI (SIPG) DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) DI PUSAT DAN DAERAH BESERTA PEMANFAATANNYA	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1,00	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1,00	Dinas Pertanian



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1,00	Dinas Pertanian
2	PEMUTAKHIRAN STATUS KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN SETIAP TAHUN	MEMAKSIMALKAN PEMANFAATAN PETA RAWAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1,00	Dinas Pertanian
3	EDUKASI POLA KONSUMSI PANGAN PERSEORANGAN DAN MASYARAKAT YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG, DAN AMAN (B2SA) SEJAK USIA DINI	MENINGKATKAN KEGIATAN ADVOKASI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	1,00	Dinas Pertanian
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1.893,00	Dinas Kesehatan
		MELAKSANAKAN KEGIATAN KAMPANYE "ISI PIRINGKU MENU KHAS DAERAH/PANGAN LOKAL" DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	1,00	Dinas Pertanian



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
		MELALUI BERBAGAI KANAL KOMUNIKASI YANG TERSEDIA SECARA PERIODIK	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1.893,00	Dinas Kesehatan
		MELAKUKAN PENGUATAN KAMPANYE GERAKAN MAKAN IKAN (GEMARIKAN)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	2,00	Dinas Perikanan
		MENINGKATKAN KOMITMEN PIMPINAN UNTUK MENG-INTEGRASIKAN PESAN KUNCI PEDOMAN GIZI SEIMBANG (PGS) KE DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH DAN ATAS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1.893,00	Dinas Kesehatan
		MELAKUKAN PENINGKATAN KAPASITAS KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU ANTAR INDIVIDU BAGI TENAGA PENDAMPING DI DESA (TPG, KPM, PLKB, PENDAMPING PKH) UNTUK	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah pendamping dan operator PKH yang mendapat pembinaan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	170,00	Dinas Sosial



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
		MENINGKATKAN KEPATUHAN PENERIMA MANFAAT MENJADI 90%						
		MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN INFLUENCER, TOKOH MASYARAKAT /AGAMA /POLITIK/ SELEBGRAM LOKAL UNTUK KAMPANYE PERUBAHAN PERILAKU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	18,00	Dinas Kesehatan
		MENGEMBANGKAN PLATFORM RUJUKAN INFORMASI BAGI JURNALIS DAN MEDIA UNTUK KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU KONSUMSI PANGAN B2SA						
		MENINGKATKAN PERAN TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA DALAM DALAM PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO PTM MELAUUI POLA MAKAN SEHAT, AKTIVITAS FISIK						



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
		DAN DETEKSI DINI						
		MELAKUKAN ORIENTASI AGENT OF CHANGE PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12,00	Dinas Kesehatan
		MENGEMBANGKAN PLATFORM RUJUKAN INFORMASI BAGI JURNALIS DAN MEDIA UNTUK KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU KONSUMSI PANGAN B2SA						
		MENINGKATKAN PERAN TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA DALAM DALAM PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO PTM MELAU POLA MAKAN SEHAT, AKTIVITAS FISIK DAN DETEKSI DINI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	12,00	Dinas Kesehatan
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	18,00	Dinas Kesehatan



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
		MENINGKATKAN PERAN PKK DALAM PENDAMPINGAN KELUARGA UNTUK PROMOSI AKTIVITAS FISIK, PENINGKATAN KONSUMSI BUAH DAN SAYUR, PEMBATAAN KONSUMSI GULA, GARAM DAN LEMAK	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1,00	Dinas Pertanian
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Hukum Adat	Lembaga	6,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	19,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	PENINGKATAN FREKUENSI KEGIATAN SOSIALISASI DAN EDUKASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN	MENINGKATKAN SOSIALISASI PENTINGNYA PENCANTUMAN INFORMASI KANDUNGAN KADAR GULA, GARAM, LEMAK (GGL) DALAM PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12,00	Dinas Kesehatan



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
		SIAP SAJI						
		MENINGKATKAN SOSIALIASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Penurunan Angka Stunting di Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	60,00	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12,00	Dinas Kesehatan
5	PENINGKATAN KONSUMSI PROTEIN HEWANI, VITAMIN, DAN MINERAL	MENGEMBANGKAN KONSEP ISI PIRINGKU DENGAN PANGAN LOKAL DI KAB/KOTA	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	120,00	Dinas Pertanian



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BERSUMBER SAYUR DAN BUAH UNTUK MENGATASI MASALAH GIZI PADA SASARAN SIKLUS HIDUP, TERUTAMA UNTUK IBU HAMIL DAN ANAK BALITA (DI BAWAH LIMA TAHUN) DAN KELOMPOK RENTAN RAWAN PANGAN	MENGEMBANGKAN PETA JALAN DIVERSIFIKASI PANGAN UNTUK PENINGKATAN KONSUMSI SAYUR, BUAH, DAN PROTEIN HEWANI						
6	PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF SERTA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP	MEMBINA KABUPATEN/KOTA UNTUK MENETAPKAN REGULASI MENGENAI ASI EKSKLUSIF TERMASUK MP-ASI						
		MENINGKATKAN AKSESIBILITAS TERHADAP MAKANAN TAMBAHAN BERBAHAN DASAR PANGAN LOKAL						



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
	ASI) BERBASIS PANGAN LOKAL							
7	PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT	MENDORONG KABUPATEN/KOTA UNTUK MENINGKATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SUPLEMENTASI GIZI (MAKANAN TAMBAHAN, TTD, DAN KAPSUL VIT. A) UNTUK MENCAPAI CAKUPAN TARGET SASARAN SEBESAR 90 % PADA TAHUN 2024	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	24.277,00	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	101.274,00	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	174.659,00	Dinas Kesehatan



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	12,00	Dinas Kesehatan
		MENDORONG PEMANFAATAN RUTF (READY TO USE THERAPEUTIC FOOD) BERBAHAN DASAR PANGAN LOKAL PRODUKSI DALAM NEGERI DALAM PELAYANAN GIZI						
		MENINGKATKAN SASARAN PEMBERIAN BUBUK TABUR GIZI KEPADA ANAK UMUR 6-59 BULAN						
		MEMPERLUAS IMPLEMENTASI PEMBERIAN BUBUK TABUR GIZI KEPADA ANAK UMUR 6-24 BULAN						



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
		MENINGKATKAN TATA KELOLA PELAYANAN GIZI PADA SITUASI DARURAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	25,00	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	52,00	Dinas Kesehatan
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119), Tersediaan, Terkelolaan, dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	55,00	Dinas Kesehatan
		MENINGKATKAN KAPASITAS PUSKESMAS DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN TERPADU (PANDU) PTM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	2,00	Dinas Kesehatan
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1,00	Dinas Kesehatan
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi	Unit	48,00	Dinas Kesehatan



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
					dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alkes/ alat penunjang medik Faskes	Puskesmas	1,00	Dinas Kesehatan
		MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM GERAKAN LAWAN OBESITAS DAN PELAKSANAAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) DI DESA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	24.277,00	Dinas Kesehatan
		MENINGTEGRASIKAN PENGENDALIAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEDOMAN YANG BERKAITAN DENGAN PERBAIKAN GIZI YANG DITERBITKAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIGUNAKAN DI DAERAH	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	52,00	Dinas Kesehatan
		MEMBERIKAN PERLINDUNGAN GIZI KEPADA PEKERJA PEREMPUAN (SEKTOR SWASTA) TERDAMPAK						



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
		PANDEMI COVID-19						
8	PENGENDALIAN PEMBOROSAN PANGAN (FOOD WASTE)	MENGINISIASI GERAKAN MASYARAKAT MENGURANGI FOOD WASTE	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terbentuknya kelompok pengelola sampah (TPS 3R, Bank Sampah dan OMS)	Kelompok	0,68	Dinas Lingkungan Hidup
		MENGEMBANGKAN SISTEM JUAL BELI ATAU JARINGAN PASAR PRODUK PANGAN IMPERFECT						
		MELAKUKAN KERJASAMA KESEPAHAMAN (MOU) DENGAN INDUSTRI PANGAN DAN PERHOTELAN UNTUK MENGENDALIKAN FOOD WASTE						
		MENGEMBANGKAN PANGKALAN DATA UNTUK MEMANTAU PROSES PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN PENYIMPANAN DALAM MENGENDALIKAN FOOD WASTE						



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
		MENGINISIASI GERAKAN MASYARAKAT MENGURANGI FOOD WASTE						
9	PENAMBAHAN JENIS DAN KOMPOSISI ZAT GIZI (FORTIFIKASI) PADA PANGAN TERTENTU SEBAGAI PENGAYAAN NILAI GIZI	MENYUSUN PETA JALAN FORTIFIKASI PANGAN DI INDONESIA UNTUK PERBAIKAN KEBIJAKAN YANG ADA						
		MENGEMBANGKAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA UNTUK MEMPRODUKSI FORTIFIKAN DAN KERNEL FORTIFIKASI						
		MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERPADU LINTAS K/L/D DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN IMPLEMENTASI PANGAN FORTIFIKASI						
		MELAKSANAKAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI ATURAN PANGAN BERFORTIFIKASI SESUAI SNI TERKINI YANG BERLAKU						



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
10	PENINGKATAN JAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN	MENDORONG DITETAPKANNYA MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN SEBAGAI BARANG KENA CUKAI BARU						
TS 4 : PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PANGAN DAN GIZI								
1	PENGUATAN KOORDINASI DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI DI PUSAT DAN DAERAH	MEMBENTUK FORUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR/ PEMANGKU KEPENTINGAN DI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN MONEV YANG TERINTEGRASI DENGAN FORUM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Penurunan Angka Stunting di Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	60,00	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1.893,00	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	19,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		MENGINTEGRASIKAN RAD-PG DI DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Penurunan Angka Stunting di Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	Satuan Pendidikan	60,00	Dinas Pendidikan



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
		PENURUNAN STUNTING (AKSI #2)			Manajemen			
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1.893,00	Dinas Kesehatan
		MEMPERKUAT PERAN KEMENDAGRI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RAD-PG DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA						
2	PENGUATAN PERAN SEKTOR NON PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN	MENINGKATKAN KOORDINASI JEJARING LINTAS PEMANGKU KEPENTINGAN (NON-PEMERINTAH) DALAM SCALING UP PROGRAM PANGAN DAN GIZI DI PUSAT DAN DAERAH						



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
	GIZI DI PUSAT DAN DAERAH	MELIBATKAN SEKTOR SWASTA, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PANGAN UNTUK AKTIF MELAKUKAN KEGIATAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT, FOOD LOSS DAN FOOD WASTE						
3	PENGUATAN DIMENSI GENDER DALAM PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI	MELAKUKAN PENINGKATAN KAPASITAS PUG DAN PURG DI INSTITUSI TERKAIT PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI DI PUSAT DAN DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1,00	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dinas yang menangani Pangan dan Gizi telah memahami penyusunan Anggaran Responsif Gender	Orang	2,00	Dinas KBPPPA
			PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Anggota Organisasi Perempuan se Kabupaten Gresik	Orang	40,00	Dinas KBPPPA
			PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	" Orangtua Murid, Komite Sekolah dan Anak memahami pentingnya makan ikan.	Orang	135,00	Dinas KBPPPA



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
			PEREMPUAN	Kabupaten/Kota				
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Calon Ibu Yang telah Mendapatkan Seminar Pencegahan Stunting	Orang	80,00	Dinas KBPPPA
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Wirausaha Perempuan Yang Telah Memahami Pengolahan Menu Produk Unggulan Setelah Yang Terselenggara	Kegiatan	3,00	Dinas KBPPPA
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Wirausaha Perempuan yang mendapatkan pelatihan pengolahan menu pencegah stunting.	Orang	160,00	Dinas KBPPPA
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Anggota Darma Wanita dari Kabupaten dan Kecamatan se-Kabupaten Gresik	Orang	120,00	Dinas KBPPPA
		MENINGKATKAN KAPASITAS ORGANISASI PEREMPUAN DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	Laporan	1,00	Dinas Pertanian



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Lokal			
		PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBATAAN KONSUMSI GULA, GARAM DAN LEMAK, PENINGKATAN AKTIFITAS FISIK DAN DETEKSI DINI	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sekolah Perempuan Yang Telah Mendapatkan Pembelajaran terkait Kesehatan Anak dan Ibu Hamil / Menyusui	Sekolah Perempuan	17,00	Dinas KBPPPA
		MENGEMBANGKAN MEKANISME PENGAWASAN SOSIAL OLEH ORGANISASI PEREMPUAN, MASYARAKAT DAN MEDIA TERHADAP KEBIJAKAN ASI EKSKLUSIF, SUSU FORMULA, DAN PRODUK BAYI LAINNYA YANG BERLAKU						



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
4	PENGUATAN REGULASI UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN GIZI	MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENERBITKAN REGULASI TERKAIT LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	1,00	Dinas Pertanian
				Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1,00	Dinas Pertanian
		MENETAPKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMANFAATKAN PRODUK INOVASI PANGAN YANG LAYAK (MEMENUHI PERSYARATAN GIZI, KEAMANAN, ACCEPTIBILITAS, HARGA, SHELF LIVE) UNTUK DIADOPSI KE DALAM PELAYANAN GIZI						
5	PENGEMBANGAN PLATFORM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG	MENINGKATKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN FOOD LOSS DAN FOOD WASTE TERMASUK INOVASI						



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PANGAN DAN GIZI	SMART FARMING						
		MELAKUKAN KAJIAN GAP ANALYSIS PROGRAM PENGENDALIAN DEFISIENSI ZAT GIZI MIKRO DI INDONESIA						
		MENYUSUN KAJIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PEMBERIAN SUPLEMENTASI MULTI GIZI MIKRO						
		MENGEMBANGKAN COMMUNITY BASED DATA UNTUK PEMETAAN DAN EVALUASI MASALAH GIZI MIKRO DITINGKAT KABUPATEN/KOTA						
		MENGEMBANGKAN BIOFORTIFIKASI DAN FORTIFIKASI DI BERBAGAI KOMODITI PANGAN						

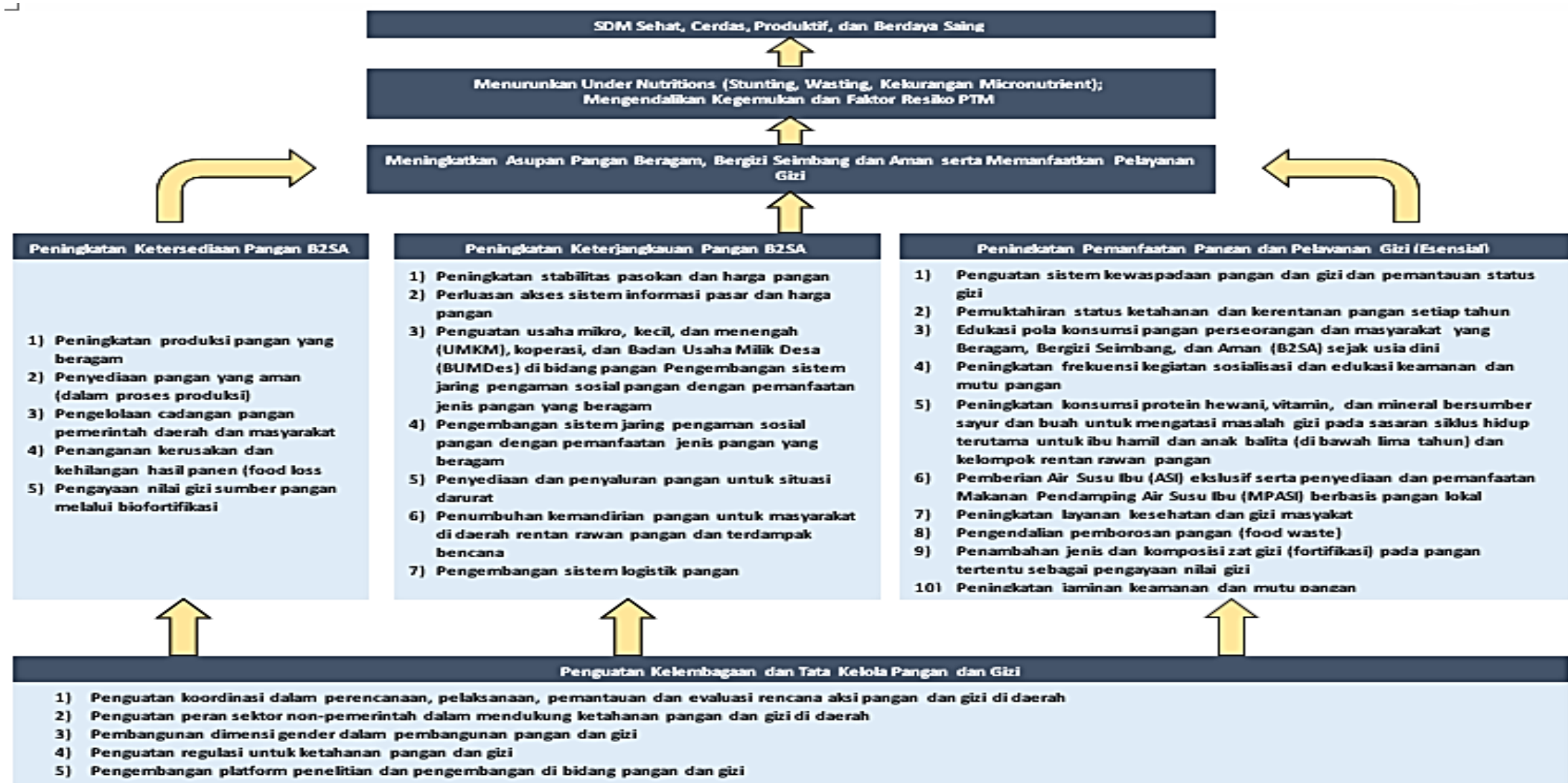


NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
		MENYELENGGARAKAN FORUM NASIONAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN DAN GIZI SECARA BERKALA						
		MENEMBANGKAN INOVASI PEMANFAATAN PANGAN LOKAL UNTUK PERBAIKAN KONSUMSI GIZI KELUARGA						
		MELAKUKAN KAJIAN LITERASI GIZI UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN PERUBAHAN PERILAKU MAKAN B2SA YANG JUGA MEMUAT PEMETAAN PROMOSI PERUBAHAN PERILAKU CEGAH STUNTING YANG SUDAH BEREDAR						
		MENGEMBANGKAN JEJARING LABORATORIUM BIDANG PANGAN DAN GIZI UNTUK PEMBAHARUAN TABEL KOMPOSISI PANGAN INDONESIA (TKPI)/DAFTAR KOMPOSISI BAHAN MAKANAN (DKBM)						



NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
		SESUAI KONDISI INDONESIA						



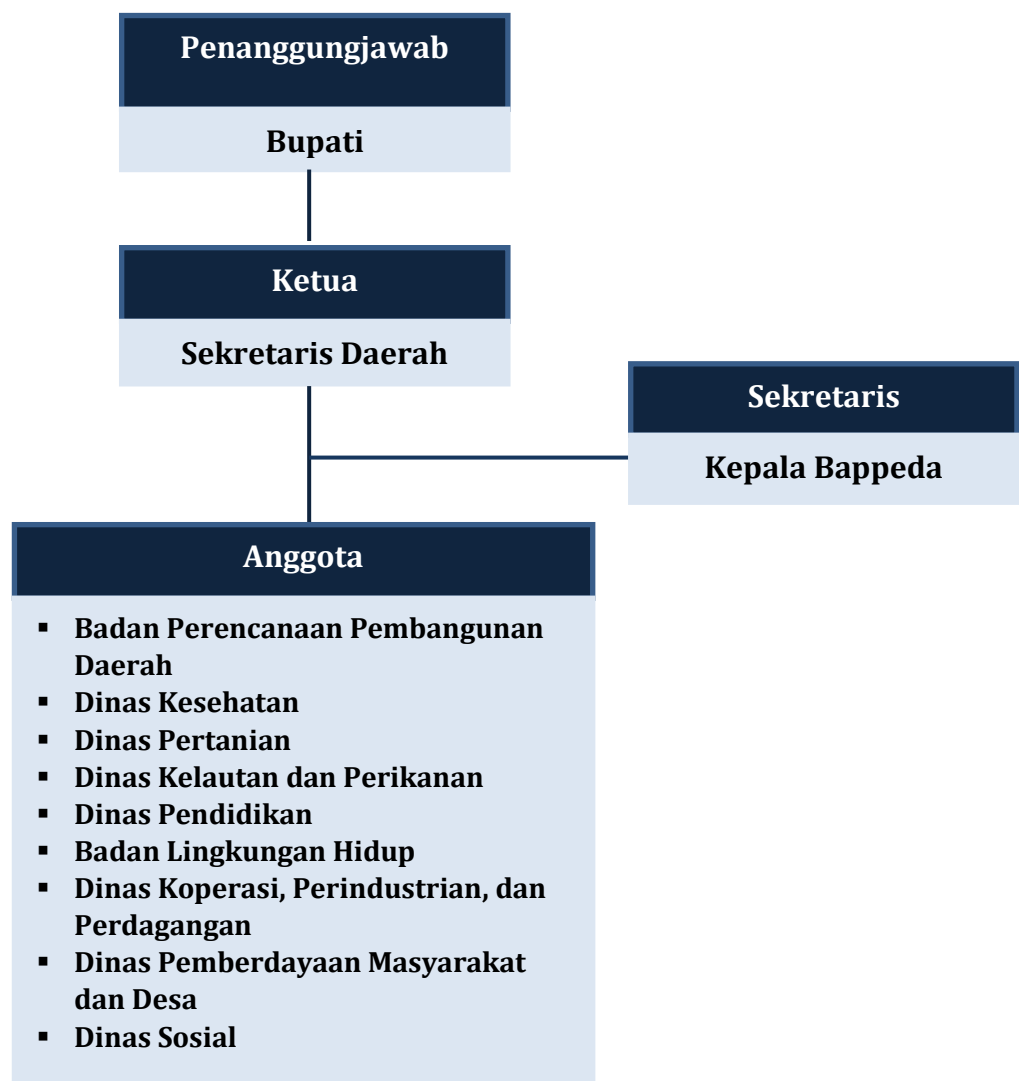


Gambar 4. 1 Kerangka Berpikir RAD -PG Kabupaten Gresik Tahun 2023-2024



4.2. PENGORGANISASIAN RAD PG KABUPATEN GRESIK

Prinsip pelaksanaan RAD-PG Multisektor di Kabupaten Gresik adalah *collaborative actions* dari lembaga-lembaga dalam rangka pendekatan multisektor. Beberapa kelembagaan dan perannya dapat disampaikan sebagai berikut ini



Gambar 4. 2 Tim RAD PG Kabupaten Gresik



Tabel 4. 2 Kelembagaan dan Peranannya Dalam Pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Gresik

NO.	LEMBAGA	PERAN
Pokja Ketersediaan Pangan		
1	Dinas Kesehatan	<div><div>1.</div><div>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</div><div>2.</div><div>Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan</div></div>
2	Dinas Pertanian	<div><div>1.</div><div>Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B</div><div>2.</div><div>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</div><div>3.</div><div>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan</div><div>4.</div><div>Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner</div><div>5.</div><div>Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan</div><div>6.</div><div>Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</div><div>7.</div><div>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</div><div>8.</div><div>Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan</div><div>9.</div><div>Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</div><div>10.</div><div>Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan</div></div>
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	<div><div>1.</div><div>Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan</div><div>2.</div><div>Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</div><div>3.</div><div>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</div><div>4.</div><div>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</div><div>5.</div><div>Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</div><div>6.</div><div>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</div><div>7.</div><div>Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</div></div>



NO.	LEMBAGA	PERAN
4	BPOM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 2. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Pokja Keterjangkauan Pangan		
1	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 3. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 4. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 5. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 6. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 7. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 8. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 9. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 11. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pokja Pemanfaatan Pangan		
1	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 4. Penyusunan dan Penetapan target konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota



NO.	LEMBAGA	PERAN
		7. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2	Dinas Kesehatan	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 3. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 5. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 9. Pembangunan Puskesmas 10. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 11. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 12. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 14. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
3	BPOM	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
6	Dinas Pendidikan	1. Kantin Sekolah yang difasilitasi P2KP 2. Kantin sekolah yang dilatih dan difasilitasi penerapan prinsip-2 Keamanan Pangan di Kantin Sekolah 3. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sehat (PMTAS)
Pokja Kelembagaan		
1	Dinas Pertanian	1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 2. Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik 3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola 4. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B
2	Dinas Pendidikan	1. Pembinaan Kelembagaan PAUD



NO.	LEMBAGA	PERAN
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

4.3. PERAN SEKTOR NON PEMERINTAH

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam untuk penyusunan dokumen RAD-PG di provinsi, atau pendampingan daerah lainnya di kabupaten/kota;
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan & Gizi untuk disampaikan kepada pemetrintah pusat dan daerah;
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal;
4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program serta pendampingan teknis dalam menyusun RAD-PG serta implementasi programnya;
5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka social control terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya;
6. Dukungan inovasi, piloting, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAN-PG dan RAD-PG.

4.4. PEMBIAYAAN

Untuk menjalankan rencana aksi ini, setiap pelaksana memerlukan dukungan dan pengelolaan dana yang dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber pendanaan utama pelaksanaan RAD-PG berasal baik dari APBD, APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah. Penggunaan dana APBD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1. PEMANTAUAN

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama *output* maupun *outcome* dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi dan untuk menjadi arahan metodologi, instrumen dan indikator, maka tim pusat akan menyiapkan pedoman pemantauan dan evaluasi.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan oleh Pusat. Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi adalah :

1. Menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi;
2. Menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi;
3. Menentukan waktu pemantauan tim dan lokasi;
4. Melakukan pemantauan;
5. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk lokasi pemantauan;
6. Evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal;
7. Menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi;
8. Menyiapkan laporan hasil evaluasi.

Pemantauan pada capaian keluaran kegiatan di tingkat Kabupaten/kota dilakukan dengan cara:

1. Pemantauan RAD-PG Kabupaten/Kota
 - a. Substansi yang dipantau

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:

- 1) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian)
menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A;



2) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/skoring terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B. Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

b. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah OPD dan pemangku kepentingan lain dengan dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten/kota atau OPD lain yang ditetapkan kepala daerah.

c. Waktu

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti pemangku kepentingan terkait RAD-PG Kabupaten/kota.

d. Umpan Balik Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D.

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan

a. Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi :

- 1) Pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota dapat dilakukan dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
- 2) Substansi Pemantauan dan Evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG dan pada dokumen perencanaan di daerah, yang terdiri dari beberapa penanda kemajuan serta tantangan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B;
- 3) Pelaksana : Pelaksana pertemuan pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah Kabupaten/kota dengan peserta pemangku kepentingan terutama OPD dan peserta dari kecamatan yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Apabila memungkinkan dapat mengikutsertakan dari pemerintah desa/kelurahan;
- 4) Hasil Workshop : Hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar segera ditindaklanjuti.

b. Kunjungan Lapangan (Supervisi)



- 1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan atau kelurahan/desa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi.
- 2) Substansi kunjungan lapangan adalah hasil dan tantangan pelaksanaan kegiatan terkait pangan dan gizi di tingkat kecamatan.
- 3) Pelaksana : Pelaksana kunjungan lapangan adalah OPD kabupaten/kota dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi.
- 4) Hasil kunjungan lapangan : Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

Untuk pemantauan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG dapat dilakukan dengan metode skoring (skala 1-4) pada indikator kemajuan sebagai berikut. Format lebih lengkap dapat dilihat pada Form Evaluasi B.

5.1.1 Memperkuat Kemitraan Antar Pemangku Kepentingan

Adanya mekanisme koordinasi dalam forum memungkinkan para pemangku kepentingan untuk terlibat dan bekerja lebih baik. Forum teknis RAD-PG dianggap berfungsi jika memungkinkan mobilisasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, membantu OPD yang relevan dalam pengambilan keputusan serta mendorong rekomendasi bersama. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- a. *Memperluas Mekanisme Koordinasi di Daerah Masing-masing* - Penanda kemajuan ini melihat ada/tidaknya mekanisme koordinasi khusus di antara pemangku kepentingan atau mekanisme pembiayaan baru dalam melaksanakan kegiatan RAD-PG
- b. *Berkordinasi Secara Internal dan Memperluas Mitra yang Dilibatkan* - Penanda kemajuan ini melihat koordinasi internal yang terjadi dalam forum teknis RAD-PG serta melihat upaya meningkatkan pengaruh dengan melibatkan pemangku kepentingan baru yang berpotensi.
- c. *Berkontribusi pada Forum Teknis RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG mendorong kolaborasi internal, pada isu-isu yang paling relevan dengan ketahanan pangan dan gizi di daerah.
- d. *Pelaporan dan Refleksi Kontribusi Serta Capaian yang Diraih* - Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG melakukan pelacakan keuangan dan melaporkan implementasi tindakan yang disepakati, oleh



masing-masing pemangku kepentingan. Kemampuan forum untuk mendorong akuntabilitas juga dipertimbangkan.

- e. *Mempertahankan Dampak Politik dari Forum Teknis RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pendekatan multisektoral untuk ketahanan pangan dan gizi diterima sebagai prioritas daerah dan dilembagakan oleh semua pemangku kepentingan serta melihat apakah mekanisme koordinasi yang ada sifatnya berkelanjutan.

5.1.2 Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Mendukung

Keberadaan kebijakan yang koheren akan menginformasikan dan memandu pemangku kepentingan bekerja sama untuk ketahanan pangan dan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- a. *Analisis Berkelanjutan Terhadap Peraturan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan dan peraturan terkait pangan dan gizi (spesifik dan sensitif) yang ada, dianalisis menggunakan proses konsultatif multisektoral.
- b. *Advokasi yang berkelanjutan Untuk Pengembangan, Pemutakhiran dan Penyebaran Kebijakan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi*-Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan bekerja sama, mempengaruhi dan mengadvokasi pengembangan kebijakan pangan dan gizi dan diseminasinya (strategi advokasi dan komunikasi diterapkan untuk mendukung diseminasi kebijakan yang relevan).
- c. *Mengembangkan dan/atau Memperbarui Kebijakan Melalui Upaya Yang Terkoordinasi* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan dan mitra non-pemerintah -mengoordinasikan masukan mereka untuk memastikan pengembangan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi.
- d. *Melaksanakan Kebijakan dan Peraturan* - Penanda kemajuan ini melihat ketersediaan mekanisme untuk mengoperasionalkan dan menegakkan kebijakan/peraturan, seperti peraturan mengenai ASI eksklusif dan cuti orang tua, fortifikasi pangan, keamanan pangan, diversifikasi pangan, dan lainnya.
- e. *Memantau dan Melaporkan Pembelajaran dan Dampak Kebijakan*-Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan pangan dan gizi yang ada telah ditinjau dan dievaluasi untuk mendokumentasikan praktik-praktik yang baik dan dibagikan dalam forum teknis RAD-PG.



5.1.3 Menyelaraskan Kegiatan

Penyelarasan kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan gizi akan menunjukkan sejauh mana pemangku kepentingan bekerja sama secara efektif, dan sejauh mana kebijakan atau peraturan diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak mendapat manfaat dari program perbaikan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- a. *Sinkronisasi Program/Kegiatan Sesuai Target Pembangunan Pangan dan Gizi Nasional* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan di daerah menyelaraskan rencana dan program mereka sendiri di bidang pangan gizi sebagai cerminan kebijakan dan prioritas nasional. Ini berfokus pada penyelarasan kegiatan lintas sektor antar-pemangku kepentingan terkait yang secara signifikan berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan gizi.
- b. *Menerjemahkan Kerangka Kebijakan dan Hukum ke Dalam Matriks Aksi RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan di daerah menyetujui RAD-PG sebagai instrumen untuk menyelaraskan intervensi di bidang pangan dan gizi dengan target pangan dan gizi yang teridentifikasi dengan jelas.
- c. *Mengatur dan Melaksanakan Prioritas Tahunan yang Terdapat dalam RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat kegiatan prioritas dalam RAD-PG terlaksana di daerah.
- d. *Bersama-sama Memantau Kegiatan Prioritas Sesuai Dengan RAD PG* - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana sistem informasi dan laporan kemajuan digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan prioritas untuk ketahanan pangan dan gizi.
- e. *Mengevaluasi Implementasi Kegiatan RAD-PG Untuk Memahami, Mencapai, dan Mempertahankan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi* - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana hasil dievaluasi untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan membangun basis bukti bidang pangan dan gizi yang lebih baik.



5.1.4 Pelacakan Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Menilai kelayakan finansial RAD-PG untuk melaksanakan kegiatan sangat penting untuk menentukan kebutuhan pendanaan. Ini didasarkan pada kemampuan untuk melacak pengeluaran yang direncanakan di seluruh instansi yang terlibat. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- a. *Mengkaji Sumber Pendanaan dan Kemungkinan Pendanaan Lain untuk Kegiatan RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan untuk penetapan biaya terhadap kegiatan RAD-PG lintas sektor. Data keuangan dibagikan secara transparan dengan mitra percepatan perbaikan gizi.
- b. *Memantau dan Melaporkan Pendanaan* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melacak pengalokasian dan pengeluaran keuangan mereka (jika tersedia) di seluruh sektor terkait dan/atau mengidentifikasi mekanisme/inisiatif pembiayaan baru. Forum teknis RAD-PG harus dapat melaporkan data keuangan secara transparan.
- c. *Menyelaraskan Sumber Daya Termasuk Mengatasi Kekurangan Pendanaan Kegiatan* - Penanda kemajuan ini melihat apakah pemerintah dan pemangku kepentingan mengidentifikasi kesenjangan keuangan dan memobilisasi dana tambahan, (termasuk dari mekanisme/inisiatif pembiayaan baru), melalui peningkatan penyelarasan dan alokasi anggaran, advokasi, dan pengaturan mekanisme pendanaan khusus untuk pendanaan kegiatan RAD-PG.
- d. *Distribusi Pendanaan* - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan mengubah alokasi pendanaan menjadi pencairan yang sebenarnya.
- e. *Melakukan Kajian dan Penganggaran Pendanaan Tahunan Untuk Menjamin Keberlangsungan Pelaksanaan Kegiatan* - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan secara kolektif memastikan pendanaan yang dapat diprediksi dan berjangka Panjang untuk dampak yang lebih baik. Ini melihat pada perubahan penting, seperti keberlanjutan pendanaan, pembentukan mekanisme pendanaan yang fleksibel tetapi dapat diprediksi dan mengatasi kesenjangan pendanaan.



5.1.5 Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Stunting

Penanda kemajuan ini merupakan penanda tambahan dikhususkan untuk pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan dokumen RAD-PG dalam pelaksanaan aksi penurunan stunting di daerah sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi RADPG.

a. *Analisis Situasi*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu memaksimalkan penggunaan analisis situasi seperti: analisis sebaran analisis sebaran masalah stunting; analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan; analisis penyampaian layanan pada sasaran; analisis kebutuhan penguatan koordinasi antar program dan antar lokasi.

b. *Penyusunan Rencana Kegiatan*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu memanfaatkan RAD-PG dalam menyusun rencana program dan kegiatan terintegrasi dengan memanfaatkan hasil analisis situasi program pencegahan dan penurunan stunting.

c. *Rembuk Stunting*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu menjadi memanfaatkan RAD-PG instrumen advokasi sekaligus sosialisasi bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam rembuk stunting.

d. *Sistem dan Manajemen Data Stunting*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu memanfaatkan RAD-PG untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan data; menilai sistem manajemen data saat ini; menyusun rencana tindak lanjut perbaikan sistem data; melakukan review terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data.

e. *Review Kinerja Tahunan*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu mengelaborasi data hasil pemantauan dan evaluasi RADPG untuk melaksanakan kegiatan review kinerja tahunan; mengidentifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan, serta menyusun dokumen hasil review kinerja tahunan.



1.1. EVALUASI

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/ *mid-term* dan akhir periode RAD-PG dengan ruang lingkup evaluasi terhadap *intermediate outcome* (16 indikator pembangunan bidang pangan) dan *outcome* (3 indikator pembangunan bidang gizi).

Apabila pemerintah daerah melaksanakan evaluasi tersendiri, maka pelaksana evaluasi dapat dilakukan secara mandiri atau dapat pula dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk resmi oleh pemerintah daerah. Evaluasi terkait Rencana Aksi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Lampiran 1.

1.2. RENCANA TINDAK LANJUT RAD – PG KABUPATEN GRESIK

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan RAD-PG akan muncul setelah pemantauan dan evaluasi dilaksanakan. Kendala-kendala yang ditemukan akan berdampak pada capaian rencana aksi yang tidak memenuhi target. Kendala-kendala ini merupakan suatu masalah yang membutuhkan pembenahan dan perbaikan lebih lanjut. Skema rencana tindak lanjut RAD-PG Kabupaten Gresik dapat dijelaskan pada Lampiran 2.

1.3. LAPORAN

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur. Selanjutnya gubernur menyampaikan Laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi termasuk kabupaten/kota kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun. Tujuan pelaporan RAD-PG Kabupaten Gresik, antara lain :

- a. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- b. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;



- c. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
- d. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.



BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024 merupakan kebijakan yang bersifat strategis Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka mendukung komitmen pencapaian nasional sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMN tahun 2020-2024.

RAD-PG Kabupaten Gresik ini merupakan perencanaan sistematis dalam mencapai target-target Pembangunan bidang pangan dan gizi yang dijabarkan secara kuantitatif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. RAD-PG ini selanjutnya akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang ada, baik jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra OPD, maupun jangka pendek/tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik dan Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahun anggaran sampai dengan tahun 2024.

RAD-PG Kabupaten Gresik disusun oleh perangkat daerah terkait, secara bersamasama dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik. RAD-PG Kabupaten Gresik merupakan operasionalisasi Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG) yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

RAD-PG Kabupaten Gresik menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan stunting. RAD-PG Kabupaten Gresik penting untuk dipedomani untuk tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang dibagi menjadi empat tujuan strategis yaitu:

- a. Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA;
- b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA;
- c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial);
- d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.



Pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Gresik ini secara sinergis memerlukan dukungan pendanaan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi Jawa Timur, dan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

6.2 HARAPAN

Keberhasilan implementasi atas RAD-PG Kabupaten Gresik ini sangat tergantung dari partisipasi segenap pihak, mulai dari pengelola program di tingkat OPD, organisasi profesi, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan juga wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik. Peran legislatif ini sangat penting dalam hal kebijakan dan dalam alokasi penganggaran. Selanjutnya langkah-langkah proaktif perlu dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik dengan melibatkan peran aktif perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha termasuk perbankan sebagai bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Harapan Kami, Dokumen ini dapat menjadi acuan semua stakeholder di Kabupaten Gresik terkait Pangan dan Gizi, serta dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang nyata untuk Masyarakat.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESEK
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN GRESEK TAHUN 2023-2024

NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT				ANGGARAN (JUTAAN RUPIAH)				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN STUNTING (YATIDAM)			
									TARGET				CAPAIAN ANGGARAN									
									2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024						
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
15.1. PENINGKATAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG, DAN AMAN																						
1	PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN BERAGAM	MENINGKATKAN PENGEMBANGAN SENTRA PRODUKSI PANGAN UNGGULAN YANG BERAGAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan(KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LCP2B)	-	Jumlah gapoktan yang menerima hibah sarana produksi pertanian untuk pengelolaan LP2B	Kelompok	5,00	7,00	-	-	247.290.000	239.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian				
						-	Jumlah validasi lahan baku sawah Ka. Gresik	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan(KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LCP2B) yang Dikelola	Dokumen	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	225.000.000	225.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
						-	Jumlah Pertemuan Pendukung Kegiatan	-	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MENINGKATKAN PRODUKSI SAYUR, BUAH, PAKAN HEWANI, DAN PANGAN LOKAL DI SETIAP KABUPATEN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	Jumlah bantuan saprodi tanaman pangan dan hortikultura	-	1,00	1,00	-	-	727.060.000	494.916.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian				
						-	Jumlah Gerakan Pelestarian Musuh Alami, Pencegadaan Penyakit dan HamaTanaman	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	Terkendalanya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	-	-	1.044,45	1.043,45	-	-	523.331.000	596.063.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian				
						-	Jumlah Pengembangan kawasan pangan dan non pangan	-	1,00	1,00	-	-	215.766.000	658.554.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian				
						-	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan	-	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	Jumlah pengadaan sarana produksi	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	Tertangannya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	-	-	3.169,60	5.496,55	-	-	697.775.000	794.751.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian				
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	-	Jumlah kelompok yang di nilai untuk penilaian kelas kelompok	-	40,00	40,00	-	-	92.306.000	95.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian	
	-								Jumlah Rekapitulasi Database Sosial Ekonomi Terpadu Petani	-	278,00	278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-								Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas Petani tanam pangan, hortikultura, biofarmaka dan perkebunan	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-								Terluasnya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	-	-	40,00	40,00	-	-	110.000.000	140.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
	-								Jumlah Alat sarana pertanian yang diadakan	Unit	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Jumlah Monitoring Pemanfaatan sarana pertanian	Kali	4,00	16,00				-	-	260.400.000	260.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian						
	PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN BERAGAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan	Kali	4,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	-	-	16,00	16,00	-	-	350.000.000	300.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian					
					-	Jumlah Kelompok Ternak Penerima Hibah	Kelompok	116,00	116,00	-	-	4.965.333.000	4.070.181.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian					
					-	Jumlah pengadaan sarana pembibitan ternak	Unit	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan	Kali	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	-	-	1,00	1,00	-	-	4.487.744.000	4.777.715	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian					
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknik Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-	Jumlah ingasi air tanah dangkal/dalam yang di bantuan	Unit	12,00	15,00	-	-	3.640.374.000	2.435.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
								-	Jumlah long storage	Unit	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	-	-	2,00	4,00	-	-	2.910.000.000	3.492.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
								-	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten Gresik, jumlah Desa yang diperdayakan melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Kelompok	4,00	4,00	-	-	263.910.000	122.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
								-	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	-	-	1,00	1,00	-	-	225.000.000	235.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
								-	Jumlah Uji Sampel Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sampel	-	3,00	-	-	-	39.080.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
	PENYEDIAAN PANGAN YANG AMAN (DALAM PROSES PRODUKSI)	MENINGKATKAN KERJASAMA DENGAN BPOM DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DALAM PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	-	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	2,00	2,00	-	-	42.866.000	45.676.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian				
-						Jumlah pengadaan sarana pendukung	Unit	1,00	1,00	-	-	90.342.000	61.668.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian					
-						Jumlah Pendampingan Kegiatan	Kegiatan	4,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-						Terkelanya Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	-	-	2,00	2,00	-	-	73.042.000	100.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian					
-						Jumlah Hasil Pemeriksaan Laboratorium bahan asal hewan	-	36,00	36,00	-	-	58.440.000	50.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian					
-						Jumlah obat-obatan untuk kesehatan ternak	-	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PROGRAM SEDUHAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriks aan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan/Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	Terkelanya any Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	12,00	12,00	12,00	12,00	109.385.400	195.000.000	214.500.000	235.950.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan				
						-	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan/Minuman Industri Rumah Tangga yang Dikelola Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	25,00	38,00	33,00	36,00	87.695.000	87.695.000	96.464.500	106.110.950	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan				

NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT				ANGGARAN (JUTAAN RUPIAH)				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN STUNTING (YATIDAM)	
									CAPAIAN OUTPUT		TARGET		CAPAIAN ANGGARAN		ALOKASI ANGGARAN					
									2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
		MENGUATKAN KAPASITAS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKSPD) UNTUK KEAMANAN PANGAN ASAL TUMBUHAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Uji Sampel Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sampel	-	3,00	-	-	-	-	39.080.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian	
		PENGUATAN KAPASITAS PENGAWASAN BAGI BALAI VETERINER DALAM RANGKA KEAMANAN PANGAN ASAL HEWAN				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	2,00	2,00	-	-	41.866.000	45.676.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian			
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN MASYARAKAT	MENINGKATKAN KETERSEDIAAN CADANGAN PANGAN DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	-	-	1,00	1,00	1	1	10.000.000	10.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian			
				Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	-	-	1,00	1,00	1	1	10.000.000	10.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian			
				Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan kelompok tani dan penggilingan padi yang berperan dalam jaringan distribusi dan tersedianya data pangan di Kabupaten Gresik	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	Kelompok	3,00	3,00	-	-	18.071.000	62.480.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian			
				Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	Jumlah Capoktan (LUPM) yang difasilitasi untuk penyediaan dan penyaluran komoditas/pangan untuk kemudahan akses pangan masyarakat	Unit	-	-	2,00	2,00	-	-	30.000.000	47.137.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian			
				Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Capoktan (LUPM) yang difasilitasi untuk penyediaan dan penyaluran komoditas/pangan untuk kemudahan akses pangan masyarakat	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	Kelompok	10,00	2,00	-	-	31.758.000	50.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian			
				Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Unit	-	-	2,00	2,00	-	-	41.487.000	32.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian			
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Infrastruktur Kawasan Cadangan Pangan Terintegrasi	Keluarga	-	-	120,00	120,00	-	-	20.000.000	20.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian			
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Infrastruktur Kawasan Cadangan Pangan Terintegrasi		Unit	2,00	-	-	-	-	-	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian			
				Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia		Unit	-	-	44,00	45,00	-	-	300.000.000	300.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian			
PENANGANAN KERUSAKAN DAN KEHILANGAN HASIL PANEN (FOOD LOSS)	MENGEMBANGKAN PERTANIAN MODERN (SMART FARMING) UNTUK MENGURANGI FOOD LOSS	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Alat sarana pertanian yang diadakan	Jumlah Monitoring Pemanfaatan sarana pertanian	Unit	-	4,00	-	-	-	260.400.000	260.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
				Terawasainya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kali	4,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
							Kali	4,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
	MENYEDIAKAN AKSES/BANTUAN INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN TEKNOLOGI KEPADA PETANI, NELAYAN, DAN PETERNAK TERKAIT	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Alat sarana pertanian yang diadakan	Jumlah Monitoring Pemanfaatan sarana pertanian	Unit	-	4,00	-	-	-	260.400.000	260.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
				Terawasainya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kali	4,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
							Kali	4,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Pemududayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data Base (Paket)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Perikanan		
				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Data dan Informasi Pemududayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	1,00	-	-	-	50.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Perikanan			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	-	20,00	50,00	100,00	-	156.282.160	18.000.000	75.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Perikanan				
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	-	-	-	10,00	-	-	-	100.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Perikanan				
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	-	2,00	1,00	2,00	-	310.036.840	59.500.000	100.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Perikanan				
	MENGEMBANGKAN PANGKALAN DATA UNTUK MEMANTAU PROSES PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN PENYIMPANAN DALAM MENGENDALIKAN FOOD LOSS	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan kelompok tani dan penggilingan padi yang berperan dalam jaringan distribusi dan tersedianya data pangan di Kabupaten Gresik	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kelompok	3,00	3,00	-	-	18.071.000	62.480.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian			
				Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Unit	-	-	2,00	2,00	-	-	82.140.000	-	50.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Perikanan		
5	PENGANTARAN NILAI GIZI SUMBER PANGAN MELALUI BIOFORTIFIKASI	MENYUSUN PETA JALAN BIOFORTIFIKASI PANGAN DI INDONESIA UNTUK PERBAIKAN KEBUJUKAN YANG ADA																		
		MENGEMBANGKAN BIOFORTIKASI DI BERBAGAI KOMODITI PANGAN																		
TS 3 : PENINGKATAN KETERJANGKAUAN PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN																				
PENINGKATAN STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN		MEMANFAATKAN PANEL HARGA PANGAN SEBAGAI EARLY WARNING SYSTEM (EWS) TETAP AKTIF TERPANTAU DAN TERLAPORKAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	-	-	1,00	1,00	1	1	10.000.000	10.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
		MENINGKATKAN JENIS KOMODITI PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN TOKO TANI INDONESIA (TTI)		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha	Jumlah Capoktan (LUPM) yang difasilitasi untuk penyediaan dan penyaluran komoditas/pangan untuk kemudahan akses pangan masyarakat	Jumlah Capoktan (LUPM) yang difasilitasi untuk penyediaan dan penyaluran komoditas/pangan untuk kemudahan akses pangan masyarakat	Kelompok	10,00	2,00	-	-	31.758.000	50.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		

NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT				ANGGARAN (JUTAAN RUPIAH)				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN STUNTING (YA/TIDAK)	
									CAPAIAN OUTPUT		TARGET		CAPAIAN ANGGARAN		ALOKASI ANGGARAN					
									2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
		MENCAKUP PANGAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH (KELOMPOK HEWANI DAN HORTIKULTURA) DAN PANGAN LOKAL	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	Unit	-	-	2,00	2,00	-	-	42.487.000	32.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
2	PERLUASAN AKSES SISTEM INFORMASI PASAR DAN HARGA PANGAN	MENYUSUN PROGNOSA KETERSEDIAAN PRODUKSI DAN KEBUTUHAN PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	-	-	1,00	1,00	1	1	10.000.000	10.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
					Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	-	-	1,00	1,00	1	1	10.000.000	10.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
	PANGUATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM), KOPERASI, DAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	MEMBINA UMKM/KOPERASI/BUMDES DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PANGAN LOKAL (PIPL) UNTUK PENINGKATAN GIZI KELOMPOK RAWAN (BUMDES)	PROGRAM PENGELOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	-	1,00	1,00	2,00	-	210.439.000	175.000.000	200.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Perikanan		
4	PENGEMBANGAN SISTEM JARING PENGAMAN SOSIAL PANGAN DENGAN PEMANFAATAN JENIS PANGAN YANG BERAGAM	MENGEMBANGKAN MEKANISME PEMANFAATAN BERAS BIFORTIFIKASI DAN FORTIFIKASI MENJADI SALAH SATU KOMODITAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)																		
		MENGKOMBINIRKAN PELAYANAN GIZI ESENSIAL PADA PROGRAM BANTUAN SOSIAL UNTUK KELOMPOK TERMARGINALKAN (PEREMPUAN, GELANDANGAN, PENYANDANG DISABILITAS, PENYANDANG MASALAH HUKUM, TERLANTAR, ETNIS MINORITAS)	PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Home visit, Rakor dengan Mitra Kerja Dinas	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan	18,00	18,00	18,00	18,00	80.140.900	75.000.000	80.140.900	75.000.000	APBD	Dinas Sosial	Ya	
			PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Biometrik Aplikasi Siksi-NG dan Update/Permutakhiran Data PPKS, Pembentukan Tim Assessment	umlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	%	95,00	95,00	95,00	95,00	499.999.707	322.260.000	113.559.350	100.000.000	APBD	Dinas Sosial		
5	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN UNTUK SITUASI DARURAT	REVITALISASI/MENGAKTIFKAN PROGRAM CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD) BEKERJASAMA DENGAN SUPPLIER BAHAN PANGAN LOKAL DI DAERAH Masing-Masing	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Desa	-	3,00	-	-	-	11.976.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
7	PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK PANGAN	PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK PANGAN MELALUI PENGUATAN SUPPLY CHAIN ECOSYSTEM BERDASARKAN KONDISI DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUHLATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah pertemuan penyediaan infrastruktur logistik	Kali	-	2,00	-	-	-	40.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
		MENGEMBANGKAN KERJASAMA INDUSTRI START UP DENGAN KELOMPOK TANI UNTUK DISTRIBUSI PANGAN MELALUI JALUR E-COMMERCE	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan kelompok tani dan penyelenggara padi yang berperan dalam jaringan distribusi dan tersedianya data pangan di Kabupaten Gresik	Kelompok	3,00	3,00	-	-	18.071.000	62.480.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
TS 3: PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN DAN PELAYANAN GIZI (ESENSIAL)																				
	PENGUATAN SISTEM KEMASPOKAN PANGAN DAN GIZI DAN PEMANTAUAN STATUS GIZI	MENGKOMBINIRKAN SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI (SIPG) DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM KEMASPOKAN PANGAN DAN GIZI (SIPG) DI PUSAT DAN DAERAH BESERTA PEMANFAATANNYA	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	-	-	1,00	1,00	1	1	10.000.000	10.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian	
2	PEMUTAKHIRAN STATUS KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN SETAP TAHUN	MEMAKSIMALKAN PEMANFAATAN PETA RAWAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta SKPG / FSWA	Unit	1,00	1,00	-	-	21.516.000	74.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
		MENINGKATKAN KEGIATAN ADVOKASI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten Gresik, jumlah Desa yang diperdayakan melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	-	4,00	4,00	-	-	263.910.000	122.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
									2.043,00	1.993,00	1.943,00	1.893,00	869.625.405	1.957.628.146	3.353.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya	

NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT				ANGGARAN (JUTAAN RUPIAH)				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN STUNTING (YA/TIDAK)
									CAPAIAN OUTPUT		TARGET		CAPAIAN ANGGARAN		ALOKASI ANGGARAN				
									2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
	MELAKSANAKAN KEGIATAN KAMPANYE "ISI PRINGKU MENU KHAS DAERAH/PANGAN LOKAL" DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA MELALUI BERBAGAI KANAL KOMUNIKASI YANG TERSEDIA SECARA PERIODIK		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenakargaraman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pengenalakargaraman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik, jumlah Desa yang diperdayakan melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	-	6,00	4,00	-	-	263.910.000	122.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian	
						Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenakargaraman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	-	-	1,00	1,00	-	-	126.000.000	130.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2.043,00	1.993,00	1.943,00	1.893,00	869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya	
		MELAKUKAN PENGUATAN KAMPANYE GERAKAN MAKAN IKAN (GEMARIKAN)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	-	1,00	1,00	2,00	-	210.439.000	175.000.000	200.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Perikanan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2.043,00	1.993,00	1.943,00	1.893,00	869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya
		MENINGKATKAN KOMITMEN PIMPINAN UNTUK MENG-INTEGRASIKAN PESAN KUNCI PEDOMAN GIZI SEIMBANG (PGS) KE DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR, MENENANG DAN ATAS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2.043,00	1.993,00	1.943,00	1.893,00	869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya
	MELAKUKAN KEMUSAMBAH DENGAN INFLUENCER, TOKOH MASYARAKAT, JAGAMA, POLITIK, SELEBRAN LOKAL UNTUK KAMPANYE PERUBAHAN PERILAKU	PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping dan operator PKH yang mendapat pembinaan	Pembinaan kepada Mitra Kerja Dinas	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	170,00	170,00	170,00	170,00	152.897.450	614.400.000	614.400.000	614.400.000	APBD	Dinas Sosial	Ya	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Goo Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	18,00	18,00	18,00	18,00	762.909.500	2.000.000.000	2.000.000.000	2.420.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	
EDUKASI POLA KONSUMSI PANGAN PERSEORANGAN DAN MASYARAKAT YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG, DAN AMAN (BISA) SEJAK USIA DINI	MENINGKATKAN PERAN TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA DALAM DALAM PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO PTM MELALUI POLA MAKAN SEHAT, AKTIVITAS FISIK DAN DETEKSI DINI		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12,00	12,00	12,00	12,00	1.154.325.750	668.000.000	670.000.000	675.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	
		MELAKUKAN ORIENTASI AGENT OF CHANGE PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12,00	12,00	12,00	12,00	1.154.325.750	668.000.000	670.000.000	675.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	
		MENGEMBANGKAN PLATFORM RUJUKAN INFORMASI BAGI JURNALIS DAN MEDIA UNTUK KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU KONSUMSI PANGAN BISA																	
		MENINGKATKAN PERAN TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA DALAM DALAM PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO PTM MELALUI POLA MAKAN SEHAT, AKTIVITAS FISIK DAN DETEKSI DINI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	12,00	12,00	12,00	12,00	1.537.966.689	1.703.551.865	1.873.907.052	2.061.397.757	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	18,00	18,00	18,00	18,00	762.909.500	2.000.000.000	2.000.000.000	2.420.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	
	MENINGKATKAN PERAN PKK DALAM PENDAMPINGAN KELUARGA UNTUK PROMOSI AKTIVITAS FISIK, PENINGKATAN KONSUMSI BUAH DAN SAYUR, PEMBATASAN KONSUMSI GULA, GARAM DAN LEMAK	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenakargaraman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pengenalakargaraman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik, jumlah Desa yang diperdayakan melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Kelompok	6,00	4,00	-	-	263.910.000	122.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian	
							Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenakargaraman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenakargaraman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	-	-	1,00	1,00	-	-	225.000.000	235.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Hukum Adat	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Difasilitasi	Orang	-	300,00	-	-	-	130.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Hukum Adat	Lembaga	-	-	6,00	6,00	-	-	147.000.000	170.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah PKK yang difasilitasi	Kelompok	375,00	375,00	-	-	399.999.990	600.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	-	-	19,00	19,00	-	-	755.000.000	868.289.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
PENINGKATAN FREKUENSI KEGIATAN SOSIALISASI DAN EDUKASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN	MENINGKATKAN SOSIALISASI PENTINGNYA PENCANTUMAN INFORMASI KANDUNGAN KADAR GULA, GARAM, LEMAK (GGL) DALAM PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN SIAP SAJI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12,00	12,00	12,00	12,00	567.410.760	680.892.912	817.071.494	980.485.793	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya	
						Jumlah Uji Sampel Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sampel	-	3,00	-	-	-	39.080.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian		
	MENINGKATKAN SOSIALISASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	2,00	2,00	-	42.866.000	45.676.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian			
	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Pembinaan Kelembagaan PAUD	Penurunan Angka Stunting di Satuan PAUD	APIK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	-	40,00	60,00	60,00	-	130.781.500	130.315.000	130.315.000	APBD	Dinas Pendidikan	Ya		

NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT				ANGGARAN (JUTAAN RUPIAH)				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN STUNTING (TA/IDAM)																
									CAPAIAN OUTPUT		TARGET		CAPAIAN ANGGARAN		ALOKASI ANGGARAN																				
									2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024																			
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12,00	12,00	12,00	12,00	567.410.760	680.892.912	817.071.494	980.485.793	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya																
5	PENINGKATAN KONSUMSI PROTEIN HEWANI, VITAMIN, DAN MINERAL BERSUMBER SAYUR DAN BUAH UNTUK MENGATASI MASALAH GIZI PADA SASARAN SIRKLUS HIDUP, TERUTAMA UNTUK IBU HAMIL DAN ANAK BALITA (DI BAWAH LIMA TAHUN) DAN KELOMPOK RENTAN RAWAN PANGKAN	MENGEMBANGKAN KONSEP/ISI PIRINGKU DENGAN PANGAN LOKAL DI KABUPATEN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	-	-	120,00	120,00	-	-	20.000.000	20.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian																	
		MENGEMBANGKAN PETA JALAN DIVERSIFIKASI PANGAN UNTUK PENINGKATAN KONSUMSI SAYUR, BUAH, DAN PROTEIN HEWANI																																	
6	PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF SERTA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP-ASI) BERBASIS PANGAN LOKAL	MEMBINA KABUPATEN/KOTA UNTUK MENETAPKAN REGULASI MENGENAI ASI EKSKLUSIF TERMASUK MP-ASI																																	
		MENINGKATKAN AKSESIBILITAS TERHADAP MAKANAN TAMBAHAN BERBAHAN DASAR PANGAN LOKAL																																	
7	PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT	MENDORONG KABUPATEN/KOTA UNTUK MENINGKATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SUPLEMENSTASI GIZI (MAKANAN TAMBAHAN, TTD, DAN KAPSUL VIT. A) UNTUK MENCAPI CAKUPAN TARGET SASARAN SEBESAR 90 % PADA TAHUN 2024	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	21.277,00	22.277,00	23.277,00	24.277,00	987.122.000	2.850.120.196	3.155.132.116	3.448.645.437	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya																
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	89.274,00	93.274,00	97.274,00	101.274,00	18.972.000	1.054.035.780	1.159.439.358	1.275.383.294	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya																
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	144.659,00	154.659,00	164.659,00	174.659,00	1.096.197.874	1.205.871.661	1.306.399.428	1.459.039.370	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya																
																						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	12,00	12,00	12,00	12,00	869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya
																						-	Kunjungan Ibu hamil (K)						869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya
																						-	Kunjungan Ibu hamil (K4)						869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya
																						-	Persentase balita 6 - 59 bulan mendapat kapsul vitamin A						869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya
																						-	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC (Ante Natal Care) berkualitas						869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya
																						-	Persentase balita ditimbang berat badannya DiS						869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya
																						-	Berat Badan Bayi Lahir Rendah						869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya
																						-	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan						869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya
																						-	Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A						869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya
		-	BADUTA ditimbang badannya						869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya																				
		-	BADUTA dengan BCM						869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya																				
		-	Anak Balita Mendapat Vitamin A						869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya																				
		-	Pelayanan kesehatan anak balita						869.625.405	2.957.628.146	3.253.390.961	3.578.730.057	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan	Ya																				
		MENDORONG PEMANFAATAN RUTF (READY TO USE THERAPEUTIC FOOD) BERBAHAN DASAR PANGAN LOKAL PRODUKSI DALAM NEGERI DALAM PELAYANAN GIZI																																	
		MENINGKATKAN SASARAN PEMBERIAN BUBUK TABUR GIZI KEPADA ANAK UMUR 6-59 BULAN																																	
		MEMPERLUAS IMPLEMENTASI PEMBERIAN BUBUK TABUR GIZI KEPADA ANAK UMUR 6-24 BULAN																																	
		MENINGKATKAN TATA KELOLA PELAYANAN GIZI PADA SITUASI DARURAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan n bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	25,00	25,00	25,00	25,00	50.000.000	4.383.672.000	4.706.441.000	200.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan																	
					Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspasaan Diri dan Respon Wabah	Dokumen	52,00	52,00	52,00	52,00	40.800.000	4.442.000.000	75.000.000	100.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan																	
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119), Tersediaan, Terkelola, dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Publik Safety Center (PSC 119), Tersediaan, Terkelola, dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	-	30,00	50,00	55,00	113.421.950	482.240.000	530.464.000	583.510.400	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan																	
					Pembangunan Puskesmas	-	Jumlah Puskesmas dibangun	Puskesmas	3,00	1,00	-	-	15.02.026.000	7.800.000.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan																	
				Terbanggunya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	-	-	2,00	2,00	-	-	14.000.000.000	15.400.000.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Kesehatan																			

NO	STRATEGI	AKSI	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT				ANGGARAN (JUTAAN RUPIAH)				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN STUNTING (YA/TIDAK)				
									CAPAIAN OUTPUT		TARGET		CAPAIAN ANGGARAN		ALOKASI ANGGARAN								
									2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024							
3	PENGUATAN DIMENSI GENDER DALAM PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI	DAN GIZI DI PUSAT DAN DAERAH																					
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Seminar Pencegahan Stunting bagi Calon Ibu	Calon Ibu yang telah Mendapatkan Seminar Pencegahan Stunting	orang	-	80,00	80,00	80,00	-	6.830.000	6.830.000	6.830.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas KBPPPA	YA					
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Wirausaha Perempuan Pengolahan Menu Produk Unggulan Setempat	Wirausaha Perempuan Yang Telah Memahami Pengolahan Menu Produk Unggulan Setelah Yang Terselenggara	kegiatan	-	3,00	3,00	3,00	-	24.010.000	24.010.000	24.010.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas KBPPPA						
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Wirausaha Pengolahan Menu Pencegah Stunting	Wirausaha Perempuan yang mendapatkan pelatihan pengolahan menu pencegah stunting.	orang	-	-	160,00	160,00	-	-	35.213.200	35.213.200	APBN/APBD/Lainnya	Dinas KBPPPA	YA					
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Seminar Kesehatan tentang Stunting	Anggota Darma Wanita dari Kabupaten dan Kecamatan se-Kabupaten Gresik	orang	-	120,00	120,00	120,00	-	7.430.000	7.430.000	7.430.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas KBPPPA	YA					
		MENINGKATKAN KAPASITAS ORGANISASI PEREMPUAN DALAM Mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik, jumlah Desa yang diperdayakan melalui Pekarangan Pangan Lestari (PpL)	Kelompok	4,00	4,00	4,00	4,00	263.910	122.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian					
							Tertelaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	-	-	1,00	1,00	-	-	225.000	235.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian				
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pembelajaran di Sekolah Perempuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas perempuan akar rumput terkait kesehatan anak dan Ibu hamil / menyusui	Sekolah Perempuan Yang Telah Mendapatkan Pembelajaran terkait Kesehatan Anak dan Ibu Hamil / Menyusui	Sekolah Perempuan	17,00	17,00	17,00	17,00	16.980.000	28.730.000	32.142.000	32.142.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas KBPPPA						
MENGEMBANGKAN MEKANISME PENGAWASAN SOSIAL OLEH ORGANISASI PEREMPUAN, MASYARAKAT DAN MEDIA TERHADAP KEBIJAKAN ASI EKSKLUSIF, SUSU FORMULA, DAN PRODUK BAYI LAINNYA YANG BERLARU																							
4	PENGUATAN REGULASI UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN GIZI	MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENERBITKAN REGULASI TERKAIT LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	-	Jumlah gapoktan yang menerima hibah sarana produk pertanian untuk pengelolaan LP2B	Kelompok	5,00	7,00	-	-	247.290	239.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian					
						-	Jumlah validasi lahan baku sawah Kab. Gresik	-	1,00	1,00	-	-											
						Tertelaksananya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	-	-	1,00	1,00	-	-	225.000	225.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian					
						-	Jumlah peta pemilik LP2B kecamatan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	-	-	159.960	150.000	-	-	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian					
						Tersusunnya Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	-	-	1,00	1,00	1	1	180.000	190.000	APBN/APBD/Lainnya	Dinas Pertanian					
						MENETAPKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMANFAATKAN PRODUK INOVASI PANGAN YANG LAYAK (MEMENUHI PERSYARATAN GIZI, KEAMANAN, ACCEPTIBILITAS, HARGA, SHELF LIFE) UNTUK DIADOPTSI KE DALAM PELAYANAN GIZI																	
						5	PENGEMBANGAN PLATFORM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG PANGAN DAN GIZI	MENINGKATKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN FOOD LOSS DAN FOOD WASTE TERMASUK INOVASI SMART FARMING.															
MELAKUKAN KAJIAN GAP ANALYSIS PROGRAM PENGENDALIAN DEFISIENSI ZAT GIZI MIKRO DI INDONESIA																							
MENYUSUN KAJIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PEMBERIAN SUPLEMENSTASI MILITI GIZI MIKRO																							
MENGEMBANGKAN COMMUNITY BASED DATA UNTUK PEMETAAN DAN EVALUASI MASALAH GIZI MIKRO DITINGKAT KABUPATEN/KOTA																							
MENGEMBANGKAN BIOFORTIFIKASI DAN FORTIFIKASI DI BERBAGAI KOMODITI PANGAN																							
MENYELenggarakan FORUM NASIONAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN DAN GIZI SECARA BERKALA																							
MENEMBANGKAN INOVASI PEMANFAATAN PANGAN LOKAL UNTUK PERBAIKAN KONSUMSI GIZI KELUARGA																							
MELAKUKAN KAJIAN LITERASI GIZI UNTUK Mendukung KEBERAKSIAN PERUBAHAN PERILAKU MAKAN B2SA YANG JUGA MEMUAT PEMETAAN PROMOSI PERUBAHAN PERILAKU CEGAH STUNTING YANG SUDAH BERESDAK																							
MENGEMBANGKAN JEJARING LABORATORIUM BIDANG PANGAN DAN GIZI UNTUK PEMBAHARUAN TABEL KOMPOSISI PANGAN INDONESIA (TKPI) DAFTAR KOMPOSISI BAHAN MAKANAN (DKBM) SESUAI KONDISI INDONESIA																							

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI